



BUPATI PASURUAN  
PROVINSI JAWA TIMUR

PERATURAN BUPATI PASURUAN  
NOMOR 34 TAHUN 2022

TENTANG

PERUBAHAN RENCANA STRATEGIS SEKRETARIAT DAERAH  
KABUPATEN PASURUAN  
TAHUN 2018 – 2023

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI PASURUAN,

- Menimbang :
- a. bahwa Dokumen Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Pasuruan Tahun 2018 - 2023 telah ditetapkan melalui Peraturan Daerah Nomor 10 Tahun 2021 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Nomor 1 Tahun 2019 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Pasuruan Tahun 2018-2023;
  - b. bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 273 ayat (1) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015, jo. Pasal 123 ayat (2) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah, disebutkan bahwa penetapan Rencana Strategis Perangkat Daerah dengan Perkada paling lambat 1 (satu) bulan setelah Peraturan Daerah tentang RPJMD ditetapkan;
  - c. bahwa Sekretariat Daerah Kabupaten Pasuruan memerlukan adanya dokumen Perubahan Rencana Strategis (Renstra) Sekretariat Daerah sebagai dokumen perencanaan Sekretariat Daerah untuk periode 5 (lima) tahun;

- d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b dan huruf c, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Perubahan Rencana Strategis Sekretariat Daerah Kabupaten Pasuruan Tahun 2018-2023;

- Mengingat :
1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
  2. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1950 tentang Pemerintahan Daerah Kabupaten di Djawa Timur (Berita Negara Tahun 1950 Nomor 32) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1965 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1965 Nomor 19, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2730);
  3. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
  4. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
  5. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2007 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional Tahun 2005-2025 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 33, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4700);
  6. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5233) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2019 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 183, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6398);
  7. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58; Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);

8. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan Antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi, dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2008 tentang Pedoman Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 19, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4815);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian, dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 21, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4817);
11. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2017 tentang Pedoman Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 73 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6041);
12. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);
13. Peraturan Presiden Nomor 2 Tahun 2015 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional Tahun 2015-2019 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 3);
14. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 157);
15. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1312);

16. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1781);
17. Peraturan Daerah Propinsi Jawa Timur Nomor 1 Tahun 2009 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) Propinsi Jawa Timur Tahun 2005–2025;
18. Peraturan Daerah Kabupaten Pasuruan Nomor 2 Tahun 2008 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Kabupaten Pasuruan Tahun 2005–2025;
19. Peraturan Daerah Kabupaten Pasuruan Nomor 12 Tahun 2010 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Pasuruan Tahun 2009–2029;
20. Peraturan Daerah Kabupaten Pasuruan Nomor 10 Tahun 2021 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Pasuruan Nomor 1 Tahun 2019 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Kabupaten Pasuruan Tahun 2018–2023;
21. Peraturan Bupati Pasuruan 137 Tahun 2021 Tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi Serta Tata Kerja Sekretariat Daerah Kabupaten Pasuruan.

**MEMUTUSKAN :**

**Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG PERUBAHAN RENCANA STRATEGIS SEKRETARIAT DAERAH KABUPATEN PASURUAN TAHUN 2018-2023**

**BAB I  
KETENTUAN UMUM**

**Pasal 1**

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kabupaten Pasuruan.
2. Kepala Daerah dan wakil Kepala Daerah adalah Bupati dan Wakil Bupati Pasuruan.
3. Pemerintah Daerah adalah Kepala Daerah sebagai unsur penyelenggara pemerintahan daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah Otonom.
4. Sekretariat Daerah adalah unsur pendukung Kepala Daerah dalam penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah.
5. Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah yang selanjutnya disingkat RPJPD adalah Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Kabupaten Pasuruan Tahun 2005-2025.
6. Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah yang selanjutnya disingkat RPJMD adalah Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Pasuruan Tahun 2018-2023.

7. Rencana Pembangunan 5 (Lima) tahun Daerah yang selanjutnya disebut Rencana Strategis Pemerintah Daerah Kabupaten Pasuruan yang selanjutnya disingkat RENSTRA adalah dokumen perencanaan Daerah untuk periode 5 (lima) tahun. Rencana Strategis Sekretariat Daerah adalah dokumen perencanaan Sekretariat Daerah untuk periode 5 (lima) tahun.
8. Rencana Strategis Sekretariat Daerah adalah dokumen perencanaan Sekretariat Daerah untuk periode 5 (lima) tahun.
9. Rencana Kerja Sekretariat Daerah adalah dokumen perencanaan Sekretariat Daerah untuk periode 1 (satu) tahun.

## BAB II KEDUDUKAN PERUBAHAN RENSTRA SEKRETARIAT DAERAH

### Pasal 2

- (1) Perubahan Renstra Sekretariat Daerah Tahun 2018-2023 merupakan penjabaran dari Perubahan RPJMD Kabupaten Pasuruan Tahun 2018-2023.
- (2) Perubahan Renstra Sekretariat Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) digunakan sebagai pedoman bagi Sekretariat Daerah dalam menyusun Renja Sekretariat Daerah dan digunakan sebagai bahan penyusunan rancangan RKPD.

### Pasal 3

Sistematika Penulisan Renstra Sekretariat Daerah disusun sebagai berikut:

- BAB I : PENDAHULUAN;
- BAB II : GAMBARAN PELAYANAN SEKRETARIAT DAERAH;
- BAB III : PERMASALAHAN DAN ISU-ISU STRATEGIS  
SEKRETARIAT DAERAH;
- BAB IV : TUJUAN DAN SASARAN;
- BAB V : STRATEGI DAN ARAH KEBIJAKAN;
- BAB VI : RENCANA PROGRAM DAN KEGIATAN SERTA  
PENDANAAN;
- BAB VII : KINERJA PENYELENGGARAAN BIDANG URUSAN;
- BAB VIII : PENUTUP.

### Pasal 4

Perubahan Renstra Sekretariat Daerah berikut matriknya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

### Pasal 5

Sekretariat Daerah wajib melaksanakan Renstra Sekretariat Daerah dalam rangka mendukung capaian Visi dan Misi Kepala Daerah yang tertuang dalam Perubahan RPJMD Kabupaten Pasuruan Tahun 2018-2023.

BAB III  
PENGENDALIAN DAN EVALUASI

Pasal 6

- (1) Sekretaris Daerah wajib melakukan pengendalian dan evaluasi terhadap pelaksanaan dan hasil Perubahan Renstra Sekretariat Daerah.
- (2) Sekretariat Daerah menyampaikan laporan hasil pengendalian dan evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) kepada Bupati melalui Sekretaris Daerah.

BAB IV  
KETENTUAN PERALIHAN

Pasal 7

Untuk menghindari terjadinya kekosongan Renstra Sekretariat Daerah Tahun 2024, Renstra Sekretariat Daerah Tahun 2018–2023 ini dapat digunakan sebagai acuan untuk menyusun Renja Sekretariat Daerah Tahun 2024.

BAB V  
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 8

Pada saat Peraturan Bupati ini mulai diundangkan, maka Peraturan Bupati Nomor 24 Tahun 2019 tentang Rencana Strategis Sekretariat Daerah Kabupaten Pasuruan Tahun 2018-2023 dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 9

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.  
Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Pasuruan.

Ditetapkan di Pasuruan  
pada tanggal 3 Januari 2022  
BUPATI PASURUAN,

ttd.

M. IRSYAD YUSUF

Diundangkan di Pasuruan  
pada tanggal 3 Januari 2022  
SEKRETARIS DAERAH  
KABUPATEN PASURUAN,

ttd.

PENJELASAN ATAS  
PERATURAN BUPATI PASURUAN  
NOMOR 34 TAHUN 2022  
TENTANG

PERUBAHAN RENCANA STRATEGIS SEKRETARIAT DAERAH  
KABUPATEN PASURUAN TAHUN 2018 – 2023

I. UMUM.

Bahwa dalam rangka mewujudkan Visi Pemerintah Daerah Kabupaten Pasuruan yang akan dicapai sampai pada akhir tahun perencanaan yaitu pada Tahun 2023 diperlukan dokumen perencanaan yang lebih operasional dan implementatif maka diperlukan Renstra Sekretariat Daerah, sebagai arahan kebijakan perencanaan lima tahun kedepan. Oleh sebab itu dokumen renstra Sekretariat Daerah harus selaras dengan RPJMD dalam hal permasalahan daerah, isu- isu strategis, tujuan, sasaran, strategi, arah kebijakan, program, kegiatan berikut indikatornya.

Dalam rangka penyusunan Renstra Sekretariat Daerah dan Renja Sekretariat Daerah, Sekretariat Daerah melakukan koordinasi, sinergi dan harmonisasi dengan para pemangku kepentingan, selain itu penyusunan Perubahan Renstra Sekretariat Daerah dilakukan satu bulan setelah penetapan penyusunan Perubahan RPJMD.

Adapun tahapan penyusunan Renstra Sekretariat Daerah meliputi, Persiapan Penyusunan, Penyusunan Rancangan Awal, Penyusunan Rancangan, Pelaksanaan Forum Sekretariat Daerah /lintas Renstra Sekretariat Daerah, Perumusan Rancangan Akhir dan Penetapan Renstra.

Renstra Sekretariat Daerah memuat tujuan, sasaran, program, dan kegiatan pembangunan dalam rangka pelaksanaan urusan pemerintahan wajib dan/atau urusan pemerintahan pilihan sesuai dengan tugas dan fungsi setiap Sekretariat Daerah yang disusun berpedoman kepada RPJMD dan bersifat indikatif.

II. PASAL DEMI PASAL

Pasal 1

Cukup jelas.

Pasal 2

Cukup jelas.

Pasal 3

Cukup jelas.

Pasal 4

Cukup jelas.

Pasal 5

Cukup jelas.

Pasal 6

Tata Cara Pengendalian dan Evaluasi Renstra berpedoman terhadap Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, serta Tata Cara Perubahan Rencana

Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah :

1. Lampiran E.8.2.1 tentang Pengendalian dan Evaluasi terhadap pelaksanaan Renstra Perangkat Daerah kabupaten/Kota (Hal. 609);
2. Lampiran E.9.4 tentang evaluasi terhadap hasil Renstra Perangkat Daerah Lingkup Kabupaten/Kota (Hal. 623).

Pasal 7

Dokumen Perubahan Renstra Sekretariat Daerah Tahun 2018-2023 ini dapat diberlakukan sebagai untuk pedoman dalam penyusunan Renja Bappeda Tahun 2023 dan Perubahan Renja Tahun 2022 disusun dan ditetapkan dengan Peraturan Kepala Daerah.

Pasal 8

Cukup jelas.

Pasal 9

Cukup jelas.

TAMBAHAN BERITA DAERAH KABUPATEN PASURUAN NOMOR 88



**PERUBAHAN RENSTRA  
SEKRETARIAT DAERAH  
KABUPATEN PASURUAN  
TAHUN 2018 - 2023**



**BAGIAN PERENCANAAN DAN KEUANGAN**

## **KATA PENGANTAR**

Puji syukur kami panjatkan ke hadirat Allah SWT atas semua limpahan rahmat dan karuniaNya yang tak terhingga, sehingga penyusunan Perubahan Rencana Strategis (Perubahan Renstra) Sekretariat Daerah Kabupaten Pasuruan Tahun 2018–2023 dapat terlaksana dan menghasilkan dokumen untuk acuan pelaksanaan pembangunan Sekretariat Daerah selama tiga tahun yang akan datang. Penyusunan Perubahan Rencana Strategis ini mengacu pada dokumen Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (P-RPJMD ) Kabupaten Pasuruan tahun 2018-2023.

Sehubungan dengan hal tersebut di atas, sebagai operasionalisasi P-RPJMD dilaksanakan melalui penyusunan Perubahan Renstra OPD. Hal ini sejalan dengan Pasal 109 Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 menyebutkan bahwa penyusunan awal Perubahan Renstra-OPD dilakukan bersamaan dengan penyusunan rancangan awal P-RPJMD.

Kami sampaikan terima kasih kepada seluruh pihak yang telah memberikan dukungan, bimbingan serta partisipasi dalam penyusunan Perubahan Renstra Sekretariat Daerah Kabupaten Pasuruan Tahun 2018-2023, semoga nantinya bermanfaat bagi kemajuan dan perkembangan pembangunan di Kabupaten Pasuruan pada umumnya dan dalam meningkatkan kinerja Sekretariat Daerah Kabupaten Pasuruan di masa yang akan datang pada khususnya.

Pasuruan, Januari 2022  
SEKRETARIS DAERAH

ttd.

ANANG SAIFUL WIJAYA, SH,MM.  
Pembina Utama Muda  
NIP. 19671129 198809 1 001

## DAFTAR ISI

	Halaman
<b>HALAMAN JUDUL</b>	<b>i</b>
<b>KATA PENGANTAR</b>	<b>ii</b>
<b>DAFTAR ISI</b>	<b>iii</b>
<b>BAB I. PENDAHULUAN</b>	<b>1</b>
1.1. LATAR BELAKANG	1
1.2. LANDASAN HUKUM	2
1.3. MAKSUD DAN TUJUAN	4
1.4. SISTEMATIKA PENULISAN	5
<b>BAB II. GAMBARAN PELAYANAN SEKRETARIAT DAERAH</b>	<b>6</b>
2.1. TUGAS, FUNGSI, DAN STRUKTUR ORGANISASI	8
2.2. SUMBER DAYA PERANGKAT DAERAH	23
2.3. KINERJA PELAYANAN PERANGKAT DAERAH	27
2.4. TANTANGAN DAN PELUANG PENGEMBANGAN PELAYANAN PERANGKAT DAERAH	36
<b>BAB III. PERMASALAHAN DAN ISU-ISU STRATEGIS</b>	<b>40</b>
3.1. IDENTIFIKASI PERMASALAHAN BERDASARKAN TUGAS DAN FUNGSI	40
3.2. TELAAHAN VISI, MISI DAN PROGRAM KEPALA DAERAH	42
3.3. TELAAHAN RENSTRA K/L DAN RENSTRA	46
3.4. TELAAHAN RENCANA TATA RUANG WILAYAH DAN KAJIAN LINGKUNGAN HIDUP STRATEGIS	48
3.5. PENENTUAN ISU-ISU STRATEGIS	49
<b>BAB IV. TUJUAN DAN SASARAN</b>	<b>51</b>
4.1. TUJUAN DAN SASARAN JANGKA MENENGAH PRANGKAT DAERAH	51
<b>BAB V. STRATEGI DAN ARAH KEBIJAKAN</b>	<b>54</b>
<b>BAB VI. RENCANA PROGRAM DAN KEGIATAN SERTA PENDANAAN</b>	<b>57</b>
<b>BAB VII. KINERJA PENYELENGGARAAN BIDANG URUSAN</b>	<b>113</b>
<b>BAB VIII. PENUTUP</b>	<b>114</b>

### DAFTAR TABEL :

Tabel II-1	: Struktur Organisasi Sekretariat Daerah Kabupaten Pasuruan	8
Tabel II-2	: Komposisi Pegawai di Lingkungan Sekretariat Daerah	23
Tabel II-3	: Komposisi Pegawai Sesuai Tingkat Pendidikan	24
Tabel II-4	: Data Sarana dan Prasarana pada Sekretariat Daerah	25
Tabel II-5	: Pencapaian Kinerja Pelayanan Sekretariat Daerah Kabupaten Pasuruan	28
Tabel II-6	: Anggaran dan Realisasi Pendanaan Daerah Kabupaten Pasuruan	36

Tabel III-1	: Analisis Potensi dan Masalah	40
Tabel III-2	: Faktor Penghambat dan Pendorong Pelayanan Sekretariat Daerah Terhadap Pencapaian Visi, Misi, dan Program Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah	44
Tabel III-3	: Telaah Renstra Sekretariat Daerah Kabupaten Pasuruan dengan Renstra Perangkat Daerah di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Pasuruan	46
Tabel IV-1	: Tujuan dan Sasaran Jangka Menengah Pelayanan Perangkat Daerah	52
Tabel V-1	: Tujuan, Sasaran, Strategi dan Arah Kebijakan	56
Tabel VI-1	: Rencana Program, Kegiatan dan Pendanaan Sekretariat Daerah Kabupaten Pasuruan Tahun 2013 – 2018	59
Tabel VII-1	: Indikator Kinerja Sekretariat Daerah Yang Mengacu pada P-RPJMD	113

**DAFTAR GRAFIK :**

Grafik II-1	: Grafik Komposisi Pegawai Sesuai Gender Unit Kerja	24
Grafik II-2	: Daftar Pegawai Sesuai Unit Kerja	25



LAMPIRAN : PERATURAN BUPATI PASURUAN  
NOMOR : TAHUN 2022  
TANGGAL : 2022

---

## **BAB I**

### **PENDAHULUAN**

#### **1.1 LATAR BELAKANG**

Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (P-RPJMD) adalah merupakan penjabaran dari visi, misi dan program Kepala Daerah yang memuat tujuan, sasaran, strategi, arah kebijakan, Pembangunan Daerah dan Keuangan Daerah serta program Perangkat Daerah yang disertai dengan kerangka pendanaan bersifat indikatif untuk jangka waktu 5 (lima) tahun yang disusun dengan berpedoman pada RPJPD, RTRW dan RPJMN.

Perubahan Rencana Strategis (P-Renstra) Organisasi Perangkat Daerah (OPD) Tahun 2018 - 2023 merupakan penjabaran dari Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (P-RPJMD) Kabupaten Pasuruan Tahun 2018-2023 sebagaimana dituangkan dalam Peraturan Daerah Kabupaten Pasuruan Nomor 10 Tahun 2021 tentang Perubahan Atas Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Pasuruan 2018 - 2023. Perubahan Rencana Strategis (P-Renstra) Perangkat Daerah ini merupakan dokumen perencanaan jangka menengah Perangkat daerah yang tidak terpisahkan dengan dokumen Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Menengah (P-RPJMD).

Dalam penyusunannya Perubahan Renstra Perangkat Daerah melewati tahapan-tahapan seperti persiapan penyusunan, penyusunan rancangan, penyusunan rancangan akhir dan penetapan Perubahan Renstra, sebagaimana diatur dalam Pasal 89 Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 54 Tahun 2010 Tentang Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor Tahun 2008 Tentang Tahapan, Tatacara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah, kemudian dokumen Perubahan Renstra Perangkat Daerah di evaluasi dan dikendalikan untuk mendapatkan untuk mendapatkan kesesuaian dengan



dokumen P-RPJMD. Rancangan Akhir Perubahan Renstra Perangkat Daerah disusun dengan mengacu kepada P-RPJMD yang sudah ditetapkan dengan Peraturan Daerah.

Perubahan Renstra Sekretariat Daerah Kabupaten Pasuruan 2018-2023 yang berfungsi sebagai dokumen perencanaan kinerja dalam penyelenggaraan pemerintah daerah memiliki keterkaitan dan diselaraskan dengan Visi, Misi, Tujuan, Sasaran, Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan dengan P-RPJMD Kabupaten Pasuruan Tahun 2018-2023. Perubahan Renstra ini disusun untuk mendukung pencapaian P-RPJMD yang diimplementasikan melalui pelaksanaan program pembangunan daerah yang berisi program-program prioritas untuk mewujudkan visi dan misi Kepala Daerah.

## **1.2 LANDASAN HUKUM**

Landasan Hukum penyusunan Perubahan Renstra Sekretariat Daerah Kabupaten Pasuruan Tahun 2018 - 2023 adalah sebagai berikut :

1. Landasan Idiil : Pancasila
2. Landasan konstitusional : Undang-Undang Dasar RI Th 1945
3. Landasan konseptual :
  - a. Undang-undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional;
  - b. Undang-undang Nomor 17 Tahun 2007 tentang RPJP Nasional Tahun 2005 - 2025;
  - c. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah;
  - d. Peraturan Presiden RI Nomor 07 Tahun 2005 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional Tahun 2004 - 2009;
  - e. Peraturan Daerah Kabupaten Pasuruan Nomor 2 Tahun 2008 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) Kabupaten Pasuruan 2005 - 2025;
  - f. Peraturan Daerah Kabupaten Pasuruan Nomor 1 Tahun 2019 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Pasuruan 2018 - 2023.



4. Landasan Operasional:

- a. Undang-undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara;
- b. Undang-undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah;
- c. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian Dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah;
- d. Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2008 tentang Pedoman Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintah Daerah;
- e. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah;
- f. Instruksi Presiden Nomor 7 Tahun 1999 tentang Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintahan;
- g. Instruksi Presiden Nomor 9 Tahun 2000 tentang Pengarusutamaan Gender Dalam Pembangunan Nasional;
- h. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 67 Tahun 2011 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 15 Tahun 2008 Tentang Pedoman Umum Pelaksanaan Pengarusutamaan Gender di Daerah;
- i. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Reviu atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah.
- j. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang RPJPD dan RPJMND, serta Tata Cara Perubahan RPJPD dan RPJMN dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah;
- k. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019 tentang Klasifikasi, Kodefikasi dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah;
- l. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 050-5889 Tahun 2021 tentang Hasil Verifikasi, Validasi dan Inventarisasi Pemutakhiran Klasifikasi, Kodefikasi dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah;



- m. Keputusan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor HK.01.07/Menkes/4641/2021 Tentang Panduan Pelaksanaan Pemeriksaan, Pelacakan, Karantina dan Isolasi dalam rangka Percepatan Pencegahan dan Pengendalian *Corona Virus Disease* 2019(Covid-19)
- n. Peraturan Daerah Nomor 16 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Organisasi Perangkat Daerah
- o. Peraturan Daerah Nomor 10 Tahun 2021 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Pasuruan Nomor 1 Tahun 2019 Tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Pasuruan Tahun 2018-2023;
- p. Peraturan Bupati Pasuruan Nomor 25 tahun 2020 tentang Pencegahan Penularan *Corona Virus Disease* 2019 (Covid-19) di Kabupaten Pasuruan;
- q. Peraturan Bupati Pasuruan Nomor 137 tahun 2021 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Sekretariat Daerah Kabupaten Pasuruan.

### **1.3 MAKSUD DAN TUJUAN**

Perubahan Renstra Sekretariat Daerah merupakan penjabaran dari dokumen perencanaan Kepala Daerah yang dituangkan kedalam Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (P-RPJMD).

1. Maksud Penyusunan Perubahan Rencana Strategis (P-Renstra) Sekretariat Daerah Kabupaten Pasuruan Tahun 2018 - 2023 adalah menjamin adanya keterkaitan, kesinergisan dengan P-RPJMD dalam setiap perencanaan, penganggaran, serta pelaksanaan program dan kegiatan setiap tahun anggaran selama 5 (lima) tahun kedepan oleh Sekretariat Daerah Kabupaten Pasuruan.
2. Sedangkan tujuannya adalah sebagai acuan dalam memberikan arahan mengenai strategi pembangunan, sasaran-sasaran strategis, kebijakan umum, program dan kegiatan pembangunan yang ingin dicapai dalam jangka waktu 5 (lima) tahun ke depan sekaligus sebagai alat kendali dalam menjalankan tugas pokok dan fungsinya dalam mendukung pencapaian Visi dan Misi Pemerintah Kabupaten Pasuruan.



#### **1.4 SISTEMATIKA PENULISAN**

Perubahan Rencana Strategis Sekretariat Daerah Kabupaten Pasuruan Tahun 2018-2023 terdiri dari 8 BAB dan lampirannya yang disusun dengan sistematika sebagai berikut :

- Bab I       PENDAHULUAN
  - 1.1   Latar Belakang
  - 1.2   Landasan Hukum
  - 1.3   Maksud dan Tujuan
  - 1.4   Sistematika Penulisan
- Bab II      Gambaran Pelayanan Sekretariat Daerah
  - 2.1   Tugas, Fungsi dan Struktur Organisasi
  - 2.2   Sumber Daya
  - 2.3   Kinerja Pelayanan
  - 2.4   Tantangan dan Peluang Pengembangan Pelayanan
- Bab III     Permasalahan dan Isu-Isu Strategis Sekretariat Daerah
  - 3.1   Identifikasi Permasalahan Berdasarkan Tugas Dan Fungsi
  - 3.2   Telaahan Visi, Misi Dan Program Kepala Daerah
  - 3.3   Telaahan Renstra K/L Dan Renstra
  - 3.4   Telaahan Rencana Tata Ruang Wilayah    Dan Kajian Lingkungan Hidup Strategis
  - 3.5   Penentuan Isu-Isu Strategis
- Bab VI     Tujuan dan Sasaran
  - 4.1   Tujuan dan Sasaran Jangka Menengah Sekretariat Daerah
- Bab V      Strategi dan Arah Kebijakan
- Bab VI     Rencana Program dan Kegiatan Serta Pendanaan
- Bab VII    Kinerja Penyelenggaraan Bidang Urusan
- Bab VIII   Penutup



## **BAB II**

### **GAMBARAN PELAYANAN SEKRETARIAT DAERAH**

#### **2.1 TUGAS, FUNGSI DAN STRUKTUR ORGANISASI SEKRETARIAT DAERAH**

Sekretariat Daerah merupakan unsur staf yang dipimpin oleh Sekretaris Daerah yang berkedudukan dibawah dan bertanggung jawab kepada Bupati. Sekretariat Daerah mempunyai tugas dan fungsi membantu Bupati dalam penyusunan kebijakan dan pengkoordinasian administratif terhadap pelaksanaan tugas Perangkat Daerah serta pelayanan administratif.

Untuk melaksanakan tugas dan kewajibannya, Sekretariat Daerah menyelenggarakan fungsi sebagai berikut :

1. Pengkoordinasian penyusunan kebijakan daerah
2. Pengkoordinasian pelaksanaan tugas satuan kerja Perangkat Daerah
3. Pemantauan dan evaluasi pelaksanaan kebijakan daerah
4. Pelayanan administratif dan pembinaan aparatur sipil negara pada instansi daerah
5. Pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Bupati sesuai dengan tugas dan fungsinya.

Dalam pelaksanaan tugasnya, Sekretaris Daerah mengkoordinasikan Staf Ahli Bupati serta memimpin 3 (tiga) Asisten dan 10 (sepuluh) Bagian serta kelompok jabatan fungsional yaitu :

##### **1. Staf Ahli**

- a. Staf Ahli Bupati Bidang Hukum, Politik dan Pemerintahan;
- b. Staf Ahli Bupati Bidang Kemasyarakatan dan Sumber Daya Manusia;
- c. Staf Ahli Bupati Bidang Pembangunan, Ekonomi dan Keuangan.

##### **2. Asisten**

- a. Asisten Pemerintahan dan Kesejahteraan Rakyat;
- b. Asisten Perekonomian dan Pembangunan;
- c. Asisten Administrasi Umum.



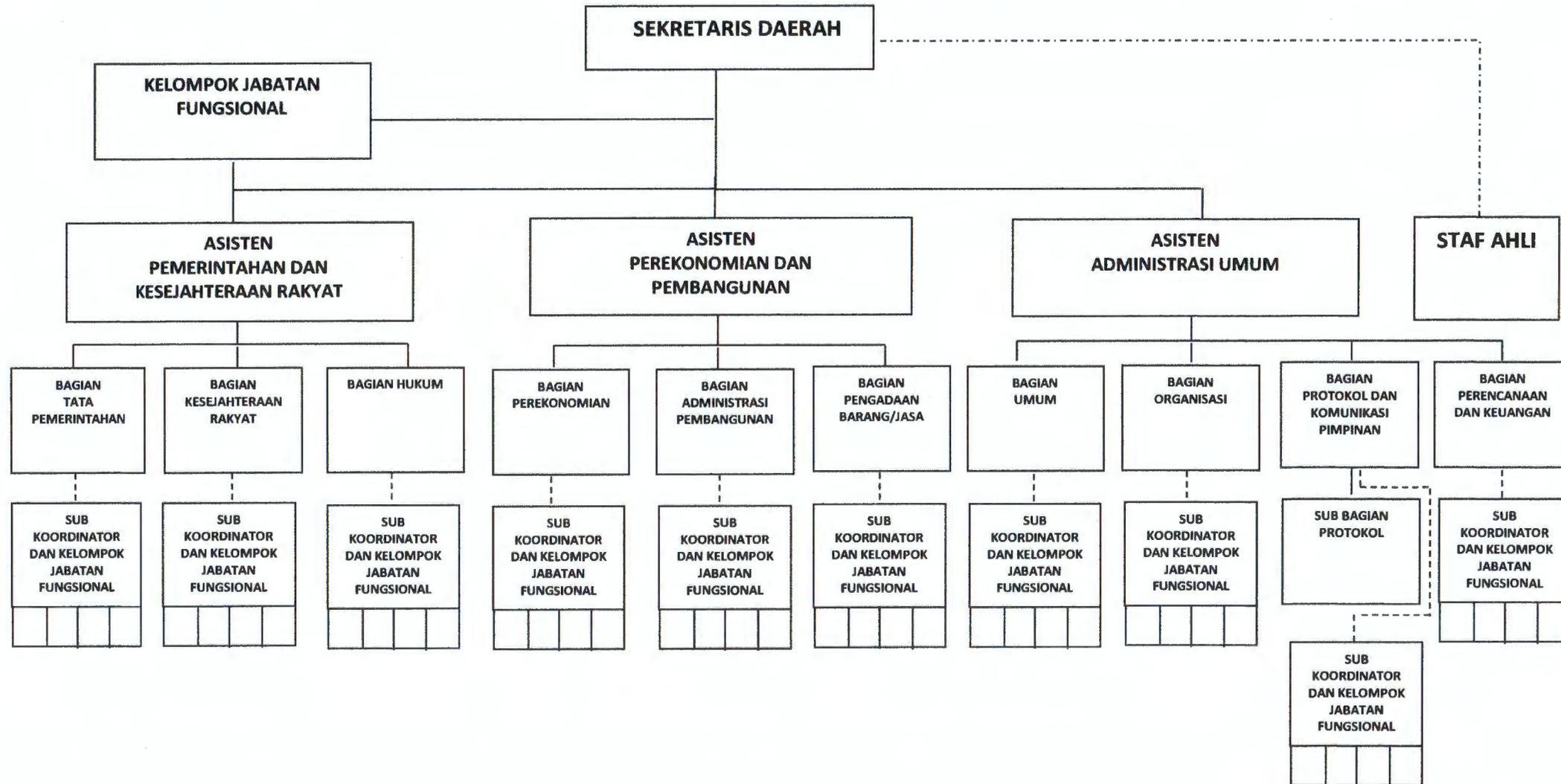
### **3. Bagian**

- a. Bagian Tata Pemerintahan;
- b. Bagian Kesejahteraan Rakyat;
- c. Bagian Hukum;
- d. Bagian Perekonomian;
- e. Bagian Administrasi Pembangunan;
- f. Bagian Pengadaan Barang/Jasa;
- g. Bagian Umum;
- h. Bagian Organisasi;
- i. Bagian Protokol dan Komunikasi Pimpinan;
- j. Bagian Perencanaan dan Keuangan.



Tabel II.1

STRUKTUR ORGANISASI SEKRETARIAT DAERAH KABUPATEN PASURUAN





Tugas dan fungsi masing-masing Staf Ahli sebagai berikut :

- 1. Staf Ahli Bidang Hukum, Politik dan Pemerintahan, mempunyai fungsi :**
  - a. penyiapan bahan perumusan kebijakan pemerintahan daerah di bidang hukum, politik dan pemerintahan;
  - b. pengumpulan data di bidang hukum, politik dan pemerintahan untuk pemecahan masalah dan pengembangan kebijakan;
  - c. pelaksanaan konsultasi dan koordinasi dengan perangkat daerah dan pihak lain yang terkait di bidang hukum, politik dan pemerintahan apabila diperlukan dalam rangka penyampaian saran dan pertimbangan kepada Bupati;
  - d. penyusunan konsep tinjauan akademis dan atau non akademis suatu kebijakan Pemerintah Daerah di bidang hukum, politik dan pemerintahan;
  - e. penyelia dan pengamatan pelaksanaan kebijakan pemerintah, pemerintah provinsi dan pemerintah daerah di bidang hukum, politik dan pemerintahan;
  - f. penyusunan telaahan yang berkaitan dengan di bidang hukum, politik dan pemerintahan;
  - g. penyusunan laporan kegiatan staf ahli dibidang hukum, politik dan pemerintahan kepada Bupati yang secara administrasi melalui Sekretaris Daerah; dan
  - h. pelaksanaan tugas-tugas lain yang diberikan oleh Bupati.
  
- 2. Staf Ahli Bidang Kemasyarakatan, dan Sumber Daya Manusia, mempunyai fungsi :**
  - a. penyiapan bahan perumusan kebijakan pemerintahan daerah di bidang kemasyarakatan dan sumber daya manusia;
  - b. pengumpulan data di kemasyarakatan dan sumber daya manusia untuk pemecahan masalah dan pengembangan kebijakan;
  - c. pelaksanaan konsultasi dan koordinasi dengan perangkat daerah dan pihak lain yang terkait di bidang kemasyarakatan dan sumber daya manusia apabila diperlukan dalam rangka penyampaian saran dan pertimbangan kepada Bupati;



- d. penyusunan konsep tinjauan akademis dan atau non akademis suatu kebijakan Pemerintah daerah di bidang kemasyarakatan dan sumber daya manusia;
- e. penyelia dan pengamatan pelaksanaan kebijakan pemerintah, pemerintah provinsi dan pemerintah daerah di bidang kemasyarakatan dan sumber daya manusia;
- f. penyusunan telaahan yang berkaitan dengan di bidang kemasyarakatan dan sumber daya manusia;
- g. penyusunan laporan kegiatan staf ahli di bidang kemasyarakatan dan sumber daya manusia kepada bupati yang secara administrasi melalui sekretaris daerah; dan
- h. pelaksanaan tugas-tugas lain yang diberikan oleh Bupati.

**3. Staf Ahli Bidang Pembangunan, Ekonomi dan Keuangan, mempunyai fungsi :**

- a. penyiapan bahan perumusan kebijakan pemerintahan daerah di bidang pembangunan, ekonomi dan keuangan;
- b. pengumpulan data di bidang pembangunan, ekonomi dan keuangan untuk pemecahan masalah dan pengembangan kebijakan;
- c. pelaksanaan konsultasi dan koordinasi dengan perangkat daerah dan pihak lain yang terkait di bidang pembangunan, ekonomi dan keuangan apabila diperlukan dalam rangka penyampaian saran dan pertimbangan kepada bupati;
- d. penyusunan konsep tinjauan akademis dan atau non akademis suatu kebijakan pemerintah daerah di bidang pembangunan, ekonomi dan keuangan;
- e. penyelia dan pengamatan pelaksanaan kebijakan pemerintah, pemerintah provinsi dan pemerintah daerah di bidang pembangunan, ekonomi dan keuangan;
- f. penyusunan telaahan yang berkaitan dengan di bidang pembangunan, ekonomi dan keuangan;
- g. penyusunan laporan kegiatan staf ahli di bidang pembangunan, ekonomi dan keuangan kepada Bupati yang secara administrasi melalui Sekretaris Daerah; dan
- h. pelaksanaan tugas-tugas lain yang diberikan oleh Bupati.



Tugas dan fungsi masing-masing Asisten Sekretaris Daerah sebagai berikut :

**I. Asisten Pemerintahan dan Kesejahteraan Rakyat**

Asisten Pemerintahan dan Kesejahteraan Rakyat melaksanakan tugas membantu Sekretaris Daerah dalam penyusunan kebijakan daerah, koordinasi urusan pemerintahan, dan evaluasi serta pemantauan pelaksanaan kebijakan di bidang tata pemerintahan, kesejahteraan rakyat, hukum serta perangkat daerah yang melaksanakan fungsi layanan dukungan kesekretariatan DPRD dan perangkat daerah yang melaksanakan urusan pemerintahan bidang pendidikan, kebudayaan, perpustakaan dan kearsipan, pemuda dan olah raga, kesehatan sosial, pengendalian penduduk dan keluarga berencana, pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak, ketentraman, ketertiban umum dan perlindungan masyarakat, penanggulangan bencana daerah, pemberdayaan masyarakat dan desa, administrasi kependudukan dan pencatatan sipil serta koordinasi kerukunan umat beragama serta Sekretariat DPRD. Untuk melaksanakan tugas, Asisten Pemerintahan dan Kesejahteraan Rakyat mempunyai fungsi :

- a. penyusunan kebijakan daerah di bidang kesejahteraan rakyat, tata pemerintahan, hukum;
- b. pengkoordinasian penyelenggaraan kebijakan daerah yang dilaksanakan oleh perangkat daerah sesuai dengan pembidangan tugas Asisten Pemerintahan dan Kesejahteraan Rakyat;
- c. pengkoordinasian pelaksanaan tugas perangkat daerah di bidang Kesejahteraan Rakyat, Tata Pemerintahan dan Hukum;
- d. pelaksanaan pembinaan administrasi di bidang Kesejahteraan Rakyat Tata Pemerintahan dan Hukum ;
- e. pelaksanaan pemantauan dan evaluasi penyelenggaraan kebijakan daerah yang dilaksanakan oleh Perangkat Daerah sesuai dengan pembidangan tugas Asisten Pemerintahan dan Kesejahteraan Rakyat;
- f. pelaksanaan pemantauan dan evaluasi penyelenggaraan kebijakan daerah terkait pencapaian tujuan kebijakan, dampak yang tidak diinginkan, dan factor yang



- mempengaruhi pencapaian tujuan kebijakan perangkat daerah sesuai dengan pembidangan tugas Asisten Pemerintahan dan Kesejahteraan Rakyat; dan
- g. pelaksanaan fungsi-fungsi lain yang diberikan oleh Sekretaris Daerah di bidang Kesejahteraan Rakyat, Tata Pemerintahan dan Hukum sesuai dengan bidang tugasnya.

Asisten Pemerintahan dan Kesejahteraan Rakyat membawahi :

**1. Bagian Tata Pemerintahan**

Bagian Tata Pemerintahan mempunyai tugas melaksanakan penyiapan perumusan kebijakan daerah, pengoordinasian perumusan kebijakan daerah, pengoordinasian pelaksanaan tugas perangkat daerah, pemantauan dan evaluasi pelaksanaan kebijakan daerah, pelaksanaan pembinaan administrasi di bidang administrasi pemerintahan, administrasi kewilayahan dan kerjasama serta fasilitasi perangkat daerah di bidang kependudukan dan pencatatan sipil, pemberdayaan masyarakat dan desa, ketentraman, ketertiban umum perlindungan masyarakat, kesatuan bangsa dan politik dalam negeri serta Sekretariat DPRD.

*Untuk melaksanakan tugas, Bagian Tata Pemerintahan mempunyai fungsi :*

- a. Penyiapan bahan perumusan kebijakan daerah di bidang administrasi pemerintahan, administrasi kewilayahan, kerjasama dan fasilitasi kegiatan Pemerintahan Daerah;
- b. Penyiapan bahan pengoordinasian perumusan kebijakan daerah di bidang administrasi pemerintahan, administrasi kewilayahan dan Kerjasama dan fasilitasi kegiatan Pemerintahan Daerah;
- c. Penyiapan bahan pengoordinasian pelaksanaan tugas Perangkat Daerah di bidang administrasi pemerintahan, administrasi kewilayahan dan kerjasama;
- d. Pelaksanaan penyusunan konsep keputusan Bupati tentang peresmian pemberhentian, pengangkatan dan penggantian antar waktu anggota/pimpinan DPRD hasil pemilihan;



- e. Penyiapan bahan pemantauan dan evaluasi pelaksanaan kebijakan daerah di bidang administrasi pemerintahan, administrasi kewilayahan dan Kerjasama; dan
- f. Pelaksanaan tugas-tugas lain yang diberikan oleh Sekretaris Daerah melalui Asisten Pemerintahan dan Kesejahteraan Rakyat.

Bagian Tata Pemerintahan membawahi :

- a. Sub Koordinator dan;
- b. Kelompok Jabatan Fungsional.

## **2. Bagian Kesejahteraan Rakyat**

Bagian Kesejahteraan Rakyat mempunyai tugas melaksanakan penyiapan pengoordinasian perumusan kebijakan daerah, pengoordinasian pelaksanaan tugas Perangkat Daerah, pemantauan dan evaluasi pelaksanaan kebijakan daerah di bidang keagamaan, pendidikan, kesehatan, kepemudaan dan olah raga, kebudayaan, social dan kesejahteraan masyarakat.

*Untuk melaksanakan tugas, Bagian Kesejahteraan Rakyat mempunyai fungsi :*

- a. Penyiapan bahan pengoordinasian perumusan kebijakan daerah di bidang mental dan keagamaan, social budaya dan kesejahteraan masyarakat;
- b. Penyiapan bahan pengoordinasian pelaksanaan tugas Perangkat Daerah di bidang mental dan keagamaan, social budaya dan kesejahteraan masyarakat;
- c. Penyiapan bahan pemantauan dan evaluasi pelaksanaan kebijakan daerah terkait pencapaian tujuan kebijakan, dampak yang tidak diinginkan, dan factor yang mempengaruhi pencapaian tujuan kebijakan di bidang mental dan keagamaan, social budaya dan kesejahteraan masyarakat; dan
- d. pelaksanaan tugas-tugas lain yang diberikan oleh asisten sesuai dengan bidang tugasnya.



Bagian Kesejahteraan Rakyat membawahi :

- a. Sub Koordinator dan;
- b. Kelompok Jabatan Fungsional.

### **3. Bagian Hukum**

Bagian Hukum mempunyai tugas melaksanakan penyiapan perumusan kebijakan daerah, pengoordinasian perumusan kebijakan daerah, pengoordinasian pelaksanaan tugas Perangkat daerah, pelaksanaan pemantauan dan evaluasi di bidang perundang-undangan, bantuan hokum dan dokumentasi dan informasi, hak asasi manusia dan publikasi produk hukum.

*Untuk melaksanakan tugas, Bagian Hukum mempunyai fungsi :*

- a. Penyiapan bahan perumusan kebijakan daerah di bidang perundang-undangan, bantuan hokum serta dokumentasi dan informasi;
- b. Penyiapan bahan pengoordinasian perumusan kebijakan daerah di bidang perundang-perundangan, bantuan hokum serta dokumentasi dan informasi;
- c. Penyiapan bahan pengoordinasian pelaksanaan tugas Perangkat daerah di bidang perundang-undangan, bantuan hokum serta dokumentasi dan informasi;
- d. Penyiapan bahan pelaksanaan pemantauan dan evaluasi di bidang perundang-undangan, bantuan hokum serta dokumentasi dan informasi;
- e. Pengoordinasian pelaksanaan Hak Asasi Manusia (HAM); dan
- f. Pelaksanaan tugas-tugas lain yang diberikan oleh Sekretaris Daerah melalui Asisten Pemerintahan dan Kesejahteraan Rakyat.

Bagian Hukum membawahi:

- a. Sub Koordinator dan;
- b. Kelompok Jabatan Fungsional.



## **II. Asisten Perekonomian dan Pembangunan**

Asisten Perekonomian dan Pembangunan melaksanakan tugas membantu Sekretaris Daerah dalam pengoordinasian penyusunan kebijakan daerah, pengoordinasian pelaksanaan tugas Perangkat Daerah, penyusunan kebijakan daerah dan pemantauan dan evaluasi pelaksanaan kebijakan daerah di bidang perekonomian, administrasi pembangunan, pengadaan barang/jasa serta perangkat daerah yang melaksanakan urusan pemerintahan bidang pangan, perindustrian, perdagangan, koperasi usaha kecil dan menengah, penanaman modal, pertanian, kehutanan, kelautan, dan perikanan, lingkungan hidup, pariwisata, energy dan sumber daya mineral, pekerjaan umum dan penataan ruang, infrastruktur, perumahan rakyat dan kawasan permukiman, pertanahan, perhubungan, BUMD serta penunjang urusan bidang perencanaan, penelitian dan pengembangan.

*Untuk menyelenggarakan tugas, Asisten Perekonomian dan Pembangunan mempunyai fungsi :*

- a. Pengoordinasian penyusunan kebijakan daerah di bidang perekonomian, administrasi pembangunan, dan pengadaan barang/jasa
- b. Pengoordinasian pelaksanaan tugas Perangkat Daerah di bidang perekonomian, administrasi pembangunan, pengadaan barang dan jasa;
- c. Pemantauan dan evaluasi pelaksanaan kebijakan daerah terkait pencapaian tujuan kebijakan, dampak yang tidak diinginkan, dan faktor yang mempengaruhi pencapaian tujuan kebijakan di bidang perekonomian, administrasi pembangunan dan pengadaan barang/jasa; dan
- d. Pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh sekretaris daerah perekonomian, administrasi pembangunan, pengadaan barang/jasa yang berkaitan dengan tugasnya.



Asisten Perekonomian dan Pembangunan membawahi :

### **1. Bagian Perekonomian**

Bagian Perekonomian mempunyai tugas melaksanakan pengoordinasian perumusan kebijakan daerah, pengoordinasian pelaksanaan tugas Perangkat daerah, pemantauan dan evaluasi pelaksanaan kebijakan daerah di bidang pembinaan BUMD dan BLUD, Pengendalian dan Distribusi Perekonomian dan Sumber Daya Alam, dan pengembangan perekonomian rakyat dan ekonomi kreatif serta perangkat daerah yang melaksanakan urusan pemerintahan bidang pangan, perindustrian, perdagangan, koperasi usaha kecil dan menengah, penanaman modal, pertanian, kehutanan, kelautan dan perikanan, lingkungan hidup, energi dan sumber daya mineral dan pariwisata.

*Untuk melaksanakan tugas, Bagian Perekonomian mempunyai fungsi :*

- a. Penyiapan bahan pengoordinasian perumusan kebijakan daerah di bidang pembinaan BUMD dan BLUD, pengendalian dan distribusi perekonomian dan sumber daya alam, dan pengembangan perekonomian rakyat dan ekonomi kreatif;
- b. Penyiapan bahan pengoordinasian pelaksanaan tugas Perangkat Daerah di bidang pembinaan BUMD dan BLUD, pengendalian dan distribusi perekonomian dan sumber daya alam, dan pengembangan perekonomian rakyat dan ekonomi kreatif;
- c. Perumusan kebijakan, fasilitasi dan pelayanan administrasi di bidang pembinaan BUMD dan BLUD, pengendalian dan distribusi perekonomian dan sumber daya alam, dan pengembangan perekonomian rakyat dan ekonomi kreatif;
- d. Penyiapan bahan pemantauan dan evaluasi pelaksanaan kebijakan daerah terkait pencapaian tujuan kebijakan, dampak yang tidak diinginkan, dan faktor yang mempengaruhi pencapaian tujuan kebijakan di bidang pembinaan BUMD dan BLUD, pengendalian dan distribusi



- perekonomian dan sumber daya alam, dan pengembangan perekonomian rakyat dan ekonomi kreatif; dan
- e. Pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Asisten Perekonomian dan pembangunan yang berkaitan dengan tugasnya.

Bagian Perekonomian membawahi:

- a. Sub Koordinator dan;
- b. Kelompok Jabatan Fungsional.

## **2. Bagian Administrasi Pembangunan**

Bagian Administrasi Pembangunan mempunyai tugas melaksanakan penyiapan pengoordinasian perumusan kebijakan daerah, pengoordinasian pelaksanaan tugas Perangkat Daerah, pemantauan dan evaluasi pelaksanaan kebijakan daerah di bidang penyusunan program, pengendalian program dan evaluasi dan pelaporan.

*Untuk melaksanakan, Bagian Administrasi Pembangunan mempunyai fungsi :*

- a. Penyiapan bahan pengoordinasian perumusan kebijakan daerah di bidang penyusunan program, pengendalian program, evaluasi dan pelaporan;
- b. Penyiapan bahan pengoordinasian pelaksanaan tugas Perangkat Daerah di bidang penyusunan program, pengendalian program, evaluasi dan pelaporan;
- c. Penyusunan bahan kebijakan perencanaan program pembangunan daerah meliputi penyusunan pedoman APBD dan petunjuk teknis maupun standar kegiatan pembangunan, serta perumusan kebijakan, maupun fasilitasi pada pelayanan administrasi di bidang perumahan dan kawasan pemukiman, pekerjaan umum dan penataan ruang, pertanahan, perhubungan, penelitian dan pengembangan;
- d. Penyiapan bahan pemantauan dan evaluasi pelaksanaan kebijakan daerah terkait pencapaian tujuan kebijakan, dampak yang tidak diinginkan, dan factor yang mempengaruhi pencapaian tujuan kebijakan di bidang



penyusunan program, pengendalian program dan evaluasi dan pelaporan; dan

Bagian Administrasi Pembangunan membawahi :

- a. Sub Koordinator dan;
- b. Kelompok Jabatan Fungsional.

### **3. Bagian Pengadaan Barang/Jasa**

Bagian Pengadaan Barang/Jasa mempunyai tugas melaksanakan penyiapan perumusan kebijakan daerah, pengoordinasian perumusan kebijakan daerah, pengoordinasian pelaksanaan tugas Perangkat Daerah, pelaksanaan pemantauan dan evaluasi di bidang pengelolaan pengadaan barang/jasa, pengelolaan layanan pengadaan secara elektronik, pembinaan dan advokasi pengadaan barang/jasa.

*Untuk melaksanakan tugas, Bagian Pengadaan Barang/Jasa mempunyai fungsi :*

- a. Penyiapan bahan perumusan kebijakan daerah di bidang pengelolaan pengadaan barang/jasa, pengelolaan layanan pengadaan secara elektronik, pembinaan dan advokasi pengadaan barang/jasa;
- b. Penyiapan bahan pengoordinasian perumusan kebijakan daerah di bidang pengelolaan pengadaan barang/jasa, pengelolaan layanan pengadaan secara elektronik, pembinaan dan advokasi pengadaan barang/jasa;
- c. Penyiapan bahan pengoordinasian pelaksanaan tugas Perangkat Daerah di bidang pengelolaan pengadaan barang/jasa, pengelolaan layanan pengadaan secara elektronik, pembinaan dan advokasi pengadaan barang/jasa;
- d. Penyiapan bahan pemantauan dan evaluasi pelaksanaan kebijakan daerah terkait pengelolaan pengadaan barang/jasa, pengelolaan layanan pengadaan secara elektronik, pembinaan dan advokasi pengadaan barang/jasa; dan



- e. Pelaksanaan tugas-tugas lain yang diberikan oleh Sekretaris Daerah melalui Asisten Perekonomian dan Pembangunan.

Bagian Pengadaan Barang/Jasa membawahi :

- a. Sub Koordinator dan;
- b. Kelompok Jabatan Fungsional.

### **III. Asisten Administrasi Umum**

Asisten Administrasi Umum mempunyai tugas membantu Sekretaris Daerah dalam penyusunan kebijakan daerah, pelaksanaan kebijakan, pengkoordinasian pelaksanaan tugas Perangkat Daerah dan pemantauan dan evaluasi pelaksanaan kebijakan daerah di bidang umum, organisasi, protocol dan komunikasi pimpinan dan perencanaan dan keuangan serta perangkat daerah yang melaksanakan urusan pemerintahan di bidang komunikasi dan informastika. Statistic dan persandian, dan perangkat daerah yang melaksanakan penunjang urusan kepegawaian, pendidikan dan pelatihan; keuangan; dan perangkat daerah yang melaksanakan fungsi pengawasan..

*Untuk menyelenggarakan tugas, Asisten Administrasi Umum mempunyai fungsi :*

- a. Penyusunan kebijakan daerah di bidang organisasi;
- b. Pelaksanaan kebijakan di bidang umum, protokol dan komunikasi pimpinan dan perencanaan dan keuangan;
- c. Pengoordinasian pelaksanaan tugas Perangkat Daerah di bidang organisasi;
- d. Penyiapan pelaksanaan pemantauan dan evaluasi di bidang umum, organisasi, protokol dan komunikasi pimpinan, dan perencanaan dan keuangan;
- e. Penyiapanpelaksanaan pembinaan administrasi dan ASN pada instansi daerah;
- f. Pemantauan dan evaluasi pelaksanaan kebijakan daerah di bidang organisasi; dan
- g. Pelaksanaan tugas-tugas lain yang diberikan oleh Sekretaris Daerah sesuai dengan bidang tugasnya.



Asisten Administrasi Umum membawahi :

### **1. Bagian Umum**

Bagian Umum mempunyai tugas melaksanakan penyiapan pelaksanaan kebijakan, pemantauan dan evaluasi di bidang tata usaha pimpinan, staf ahli dan kepegawaian, perlengkapan dan rumah tangga.

*Untuk melaksanakan tugas, Bagian Umum mempunyai fungsi :*

- a. Penyiapan bahan pelaksanaan kebijakan di bidang tata usaha pimpinan, staf ahli dan kepegawaian, perlengkapan dan rumah tangga;
- b. Penyiapan bahan pelaksanaan pemantauan dan evaluasi di bidang tata usaha pimpinan, staf ahli dan kepegawaian, perlengkapan dan rumah tangga; dan
- c. Pelaksanaan tugas-tugas lain yang diberikan oleh sekretaris Daerah melalui Asisten Administrasi Umum..

Bagian Umum membawahi:

- a. Sub Koordinator dan;
- b. Kelompok Jabatan Fungsional.

### **2. Bagian Organisasi**

Bagian Organisasi mempunyai tugas melaksanakan penyiapan perumusan kebijakan daerah, pengoordinasian perumusan kebijakan daerah, pengoordinasian pelaksanaan tugas Perangkat daerah, pemantauan dan evaluasi pelaksanaan kebijakan daerah di bidang kelembagaan dan analisis jabatan, pelayanan publikpublicata laksana, serta kinerja dan reformasi birokrasi.

*Untuk melaksanakan tugas, Bagian Organisasi mempunyai fungsi :*

- a. Penyiapan bahan perumusan kebijakan daerah di bidang kelembagaan dan analisis jabatan, pelayanan publik dan tata laksana serta kinerja dan reformasi birokrasi;
- b. Penyiapan bahan pengoordinasian perumusan kebijakan daerah di bidang kelembagaan dan analisis jabatan,



- pelayanan public dan tata laksana serta kinerja dan reformasi birokrasi;
- c. Penyiapan bahan pengoordinasian pelaksanaan tugas Perangkat daerah di bidang Kelembagaan dan Analisis Jabatan, Pelayanan Publik dan Tata Laksana serta Kinerja dan reformasi Birokrasi;
  - d. Penyiapan bahan pemantauan dan evaluasi pelaksanaan kebijakan daerah di bidang Kelembagaan dan analisis jabatan, pelayanan publik dan tata laksana serta kinerja dan reformasi birokrasi; dan
  - e. Pelaksanaan fungsi-fungsi lain yang diberikan Sekretaris Daerah melalui Asisten Administrasi Umum.

Bagian Organisasi membawahi:

- a. Sub Koordinator dan;
- b. Kelompok Jabatan Fungsional.

### **3. Bagian Protokol dan Komunikasi Pimpinan**

Bagian Protokol dan Komunikasi Pimpinan mempunyai tugas melaksanakan penyiapan bahan pelaksanaan kebijakan, pengkoordinasian, dan pelaksanaan tugas perangkat daerah, pemantauan dan evaluasi pelaksanaan kebijakan daerah di bidang protokol, komunikasi pimpinan, dan dokumentasi pimpinan.

*Untuk melaksanakan tugas, Bagian Protokol dan Komunikasi Pimpinan mempunyai fungsi :*

- a. Penyiapan bahan pelaksanaan kebijakan di bidang protokol, komunikasi pimpinan, dokumentasi pimpinan;
- b. Penyiapan bahan pengkoordinasian pelaksanaan tugas perangkat daerah di bidang protokol, komunikasi pimpinan dan dokumentasi pimpinan;
- c. Penyiapan bahan pemantauan dan evaluasi pelaksanaan kebijakan daerah terkait di bidang protocol, komunikasi pimpinan dan dokumentasi pimpinan;
- d. Perumusan kebijakan, fasilitasi dan pelayanan administrasi bidang komunikasi dan informastika, statistik dan persandian;



- e. Pelaksanaan pemantauan dan evaluasi di bidang protocol, komunikasi pimpinan dan dokumentasi pimpinan; dan
- f. Pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Asisten Administrasi Umum.

Bagian Protokol dan komunikasi Pimpinan membawahi :

- a. Sub Koordinator dan;
- b. Kelompok Jabatan Fungsional.

#### **4. Bagian Perencanaan dan Keuangan**

Bagian Perencanaan dan Keuangan mempunyai tugas melaksanakan penyiapan pengoordinasian perumusan kebijakan daerah, pengoordinasian pelaksanaan tugas Sekretariat Daerah, dan pemantauan dan evaluasi pelaksanaan kebijakan daerah di bidang perencanaan, keuangan dan pelaporan.

*Untuk melaksanakan tugas, Bagian Perencanaan dan Keuangan mempunyai fungsi :*

- a. Penyiapan bahan pengoordinasian perumusan kebijakan Sekretariat Daerah di bidang perencanaan, keuangan dan pelaporan
- b. Penyiapan bahan pengoordinasian pelaksanaan tugas Sekretariat Daerah di bidang perencanaan, keuangan dan pelaporan;
- c. Penyiapan bahan pemantauan dan evaluasi pelaksanaan kebijakan Sekretariat daerah terkait pencapaian tujuan kebijakan, dampak yang tidak diinginkan, dan factor yang mempengaruhi pencapaian tujuan kebijakan di bidang perencanaan, keuangan dan pelaporan; dan
- d. Pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Sekretaris Daerah melalui Asisten Administrasi Umum.

Bagian Perencanaan dan Keuangan membawahi :

- a. Sub Koordinator dan;
- b. Kelompok Jabatan Fungsional.

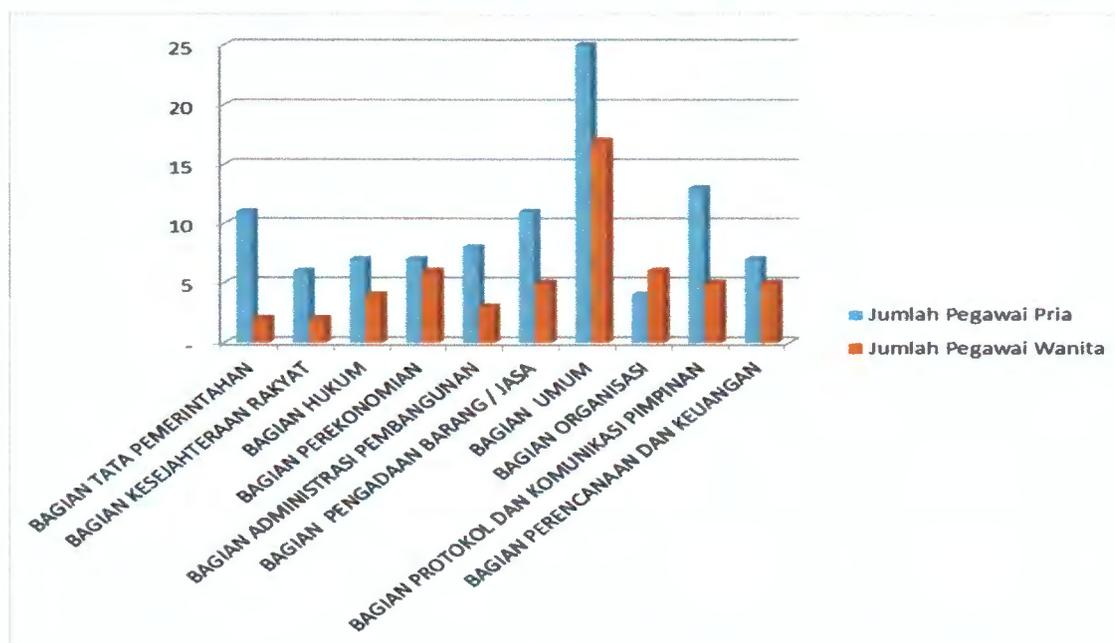


## 2.2. SUMBER DAYA

Keadaan/Jumlah pegawai di Lingkungan Sekretariat Daerah Kab. Pasuruan pada Tahun 2021 sebanyak 151 Pegawai dengan 130 Pegawai Negeri Sipil (PNS) dan 19 Pegawai Tidak Tetap (PTT). Komposisi pegawai di lingkungan Sekretariat Daerah dapat dikelompokkan sebagaimana dijabarkan dalam tabel dibawah ini :

Tabel II.2  
Komposisi Pegawai di Lingkungan Sekretariat Daerah  
Kabupaten Pasuruan

Bagian	Pria	Wanita	Jumlah
Bagian Tata Pemerintahan	11	2	13
Bagian Kesejahteraan Rakyat	6	2	8
Bagian Hukum	7	4	11
Bagian Perekonomian	7	6	13
Bagian Administrasi Pembangunan	8	3	11
Bagian Pengadaan Barang/Jasa	11	5	16
Bagian Umum	25	17	42
Bagian Organisasi	4	6	10
Bagian Protokol dan Komunikasi Pimpinan	13	5	18
Bagian Perencanaan dan Keuangan	7	5	12
<b>TOTAL</b>	<b>99</b>	<b>55</b>	<b>154</b>



Grafik II.1  
Grafik Komposisi Pegawai Sesuai Gender dan Unit Kerja

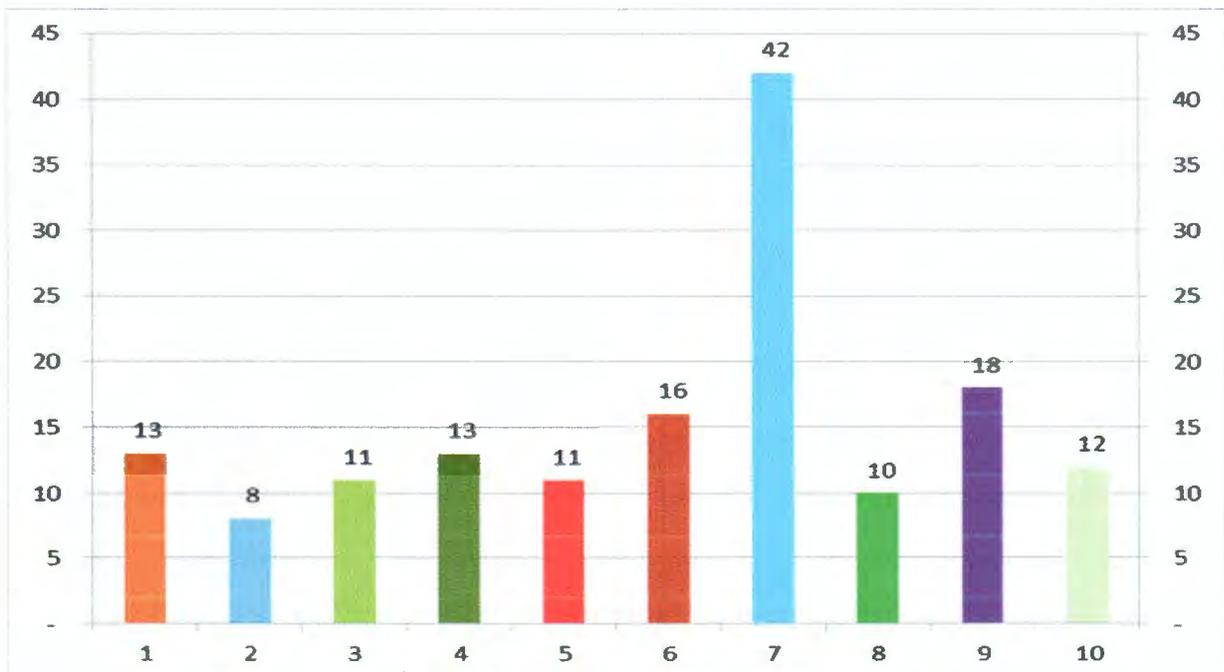
Keterangan:

Data Pegawai Sekretariat Daerah Per 1 Januari 2022



Tabel II.3  
Komposisi Pegawai Sesuai Tingkat Pendidikan

NO.	BAGIAN	TINGKAT PENDIDIKAN							JUMLAH
		S2	S1	D.III	D.I	SMU / SMK	SMP	SD	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1	BAGIAN TATA PEMERINTAHAN	2	7	1	-	2	1	-	13
2	BAGIAN KESEJAHTERAAN RAKYAT	4	2	-	-	2	-	-	8
3	BAGIAN HUKUM	3	4	-	-	4	-	-	11
4	BAGIAN PEREKONOMIAN	3	6	-	-	4	-	-	13
5	BAGIAN ADMINISTRASI PEMBANGUNAN	4	3	1	-	3	-	-	11
6	BAGIAN PENGADAAN BARANG / JASA	6	10	-	-	-	-	-	16
7	BAGIAN UMUM	3	8	2	-	29	-	-	42
8	BAGIAN ORGANISASI	4	3	-	-	2	1	-	10
9	BAGIAN PROTOKOL DAN KOMUNIKASI PIMPINAN	3	9	-	-	6	-	-	18
10	BAGIAN PERENCANAAN DAN KEUANGAN	1	7	-	-	4	-	-	12
<b>TOTAL</b>		<b>33</b>	<b>59</b>	<b>4</b>	<b>-</b>	<b>56</b>	<b>2</b>	<b>-</b>	<b>154</b>



Grafik II.2  
Daftar Pegawai Sesuai Unit Kerja

Keterangan:  
Data Pegawai Sekretariat Daerah Per 1 Januari 2022



Sekretariat Daerah Kabupaten Pasuruan menempati ruangan/gedung seluas 7.930 M<sup>2</sup> yang berdiri diatas tanah seluas ± 13.970 M<sup>2</sup> yang terletak di Jl. Hayam Wuruk No. 14 Pasuruan.

Untuk menunjang kegiatan administratif dan operasional Sekretariat Daerah Kabupaten Pasuruan didukung dengan fasilitas, sarana dan prasarana penunjang.

Secara umum sarana dan prasarana di Sekretariat Daerah Kabupaten Pasuruan telah tersedia tetapi jumlahnya terbatas. Berikut kondisi sarana prasarana pada masing-masing Bagian di lingkungan Sekretariat Daerah.

Tabel II.4  
Data Sarana dan Prasarana pada Sekretariat Daerah

NO.	BAGIAN	SARANA DAN PRASARANA	JUMLAH
1	2	3	4
1.	BAGIAN TATA PEMERINTAHAN	KOMPUTER	6
		LAPTOP	6
		PRINTER	5
		MESIN KETIK	0
		MOBIL DINAS	1
		SEPEDA MOTOR	5
		TELEPON	0
		MESIN FAX	1
2.	BAGIAN KESEJAHTERAAN RAKYAT	KOMPUTER	7
		LAPTOP	6
		PRINTER	9
		MESIN KETIK	0
		MOBIL DINAS	1
		SEPEDA MOTOR	0
		TELEPON	2
		MESIN FAX	1
3.	BAGIAN HUKUM	KOMPUTER	8
		LAPTOP	15
		PRINTER	5
		MESIN KETIK	1
		MOBIL DINAS	1
		SEPEDA MOTOR	8
		TELEPON	2
		MESIN FAX	1
4.	BAGIAN PEREKONOMIAN	KOMPUTER	8
		LAPTOP	7
		PRINTER	11
		MESIN KETIK	1
		MOBIL DINAS	1
		SEPEDA MOTOR	3
		TELEPON	1
		MESIN FAX	1



**Perubahan Rencana Strategis (P-RENSTRA)  
Sekretariat Daerah Kabupaten Pasuruan  
Tahun 2018-2023**

<b>NO.</b>	<b>BAGIAN</b>	<b>SARANA DAN PRASARANA</b>	<b>JUMLAH</b>
<b>1</b>	<b>2</b>	<b>3</b>	<b>4</b>
5.	BAGIAN ADMINISTRASI PEMBANGUNAN	KOMPUTER	3
		LAPTOP	10
		PRINTER	5
		MESIN KETIK	0
		MOBIL DINAS	2
		SEPEDA MOTOR	2
		TELEPON	0
		MESIN FAX	0
6.	BAGIAN PENGADAAN BARANG / JASA	KOMPUTER	2
		LAPTOP	30
		PRINTER	11
		MESIN KETIK	1
		MOBIL DINAS	2
		SEPEDA MOTOR	1
		TELEPON	1
		MESIN FAX	1
7.	BAGIAN UMUM	KOMPUTER	9
		LAPTOP	13
		PRINTER	12
		MESIN KETIK	0
		MOBIL DINAS	59
		SEPEDA MOTOR	34
		TELEPON	9
		MESIN FAX	3
8.	BAGIAN ORGANISASI	KOMPUTER	7
		LAPTOP	5
		PRINTER	8
		MESIN KETIK	0
		MOBIL DINAS	1
		SEPEDA MOTOR	5
		TELEPON	1
		MESIN FAX	1
9.	BAGIAN PROTOKOL DAN KOMUNIKASI PIMPINAN	KOMPUTER	5
		LAPTOP	5
		PRINTER	5
		MESIN KETIK	0
		MOBIL DINAS	1
		SEPEDA MOTOR	0
		TELEPON	1
		MESIN FAX	1
10.	BAGIAN PERENCANAAN DAN KEUANGAN	KOMPUTER	9
		LAPTOP	7
		PRINTER	14
		MESIN KETIK	0
		MOBIL DINAS	2
		SEPEDA MOTOR	3
		TELEPON	2
		MESIN FAX	0
<b>TOTAL</b>			<b>417</b>



Kondisi sarana prasarana tersebut direncanakan ditingkatkan baik kualitas maupun kuantitasnya agar tidak menghambat pekerjaan Sekretariat Daerah.

### **2.3 KINERJA PELAYANAN**

Sesuai dengan tugas pokok Sekretariat Daerah membantu Bupati dalam penyusunan kebijakan dan pengkoordinasian administratif terhadap pelaksanaan tugas perangkat daerah, Kinerja pelayanan Sekretariat Daerah Kabupaten Pasuruan berdasarkan Renstra Tahun 2013-2018 dapat diketahui dari tingkat capaian kinerja Sekretariat Daerah Kabupaten Pasuruan berdasarkan sasaran/target Renstra Tahun 2013-2018 yaitu sebagai berikut :



Tabel II.5  
( Tabel T-C.23)  
Pencapaian Kinerja Pelayanan Sekretariat Daerah Kabupaten Pasuruan

No	Indikator Kinerja sesuai Tugas dan Fungsi SKPD	Target NSPK	Target IKK	Target Indikator Lainnya	Target Renstra SETDA Tahun ke-					Realisasi Capaian Tahun ke-					Rasio Capaian Pada Tahun ke-				
					2016	2017	2018	2019	2020	2016	2017	2018	2019	2020	2016	2017	2018	2019	2020
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)	(18)	(19)	(20)
<b>Renstra 2013-2018</b>																			
1.	<b>Sasaran Meningkatnya perluasan dan pengembangan kerjasama daerah</b>																		
	Jumlah kesepakatan bersama dan perjanjian kerjasama yang ditindaklanjuti				10 MoU	10 MoU	12 MoU	12 MoU	15 MoU	26 MoU	18 MoU	17 MoU	29 MoU	24 MoU	260%	180%	142%	193%	160%
2.	<b>Sasaran Meningkatnya kinerja penyelenggaraan pemerintah daerah</b>																		
	- Hasil Evaluasi atas LPPD				ST	ST	ST	ST	ST	ST	ST	ST	n/a	n/a	100%	100%	100%	n/a	n/a
	- Persentase Perangkat Daerah yang berkinerja baik/akuntabel				85%	90%	80 %	n/a	n/a	100%	100%	100%	n/a	n/a	117,65%	111,1%	125%	n/a	n/a
	- Persentase produk hukum daerah yang diterbitkan sesuai dengan kebutuhan daerah				100%	95%	85%	n/a	n/a	80,55%	60%	87,5%	n/a	n/a	80,55%	63,16%	102,94%	n/a	n/a
3.	<b>Sasaran "Meningkatnya tertib administrasi pelaksanaan pembangunan OPD"</b>																		
	Persentase kebijakan yg ditindak-lanjuti oleh OPD/Instansi				100%	100%	100%	n/a	n/a	94%	95%	85,71	n/a	n/a	94%	95%	85,71	n/a	n/a
4.	<b>Sasaran "Terwujudnya pengadaan Barang dan Jasa yang terintegrasi sesuai prinsip-prinsip pengadaan"</b>																		
	Persentase paket pengadaan barang/jasa yang berhasil dilelangkan				n/a	96%	97%	n/a	n/a	99,16%	99,59%	99,64%	n/a	n/a	n/a	103,74%	102,72%	n/a	n/a
5.	<b>Sasaran "Meningkatnya kualitas pelayanan publik"</b>																		
	Nilai IKM Pemda				85%	Baik	Baik	n/a	n/a	80,56 %	Baik	Baik	n/a	n/a	94,78	100	100	n/a	n/a



**Perubahan Rencana Strategis (P-RENSTRA)  
Sekretariat Daerah Kabupaten Pasuruan  
Tahun 2018-2023**

No	Indikator Kinerja sesuai Tugas dan Fungsi SKPD	Target NSPK	Target IKK	Target Indikator Lainnya	Target Renstra SETDA Tahun ke-					Realisasi Capaian Tahun ke-					Rasio Capaian Pada Tahun ke-				
					2016	2017	2018	2019	2020	2016	2017	2018	2019	2020	2016	2017	2018	2019	2020
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)	(18)	(19)	(20)
<b>Renstra 2018-2023</b>																			
<b>1.</b>	<b>Sasaran " Meningkatkan Tertib Administrasi Penyelenggaraan Pemerintah Daerah</b>																		
	Hasil Evaluasi atas LPPD				ST	ST	ST	ST	ST	ST	ST	ST	n/a	n/a	100%	100%	100%	n/a	n/a
	Persentase Perangkat Daerah yang berkinerja sangat baik/Nilai SAKIP minimal BB				n/a	n/a	n/a	28%	33%	n/a	n/a	n/a	35,71%	58,92%	n/a	n/a	n/a	127,53%	194%
	Persentase OPD yang Ber-IKM minimal baik				n/a	n/a	n/a	100%	100%	n/a	n/a	n/a	94,64%	83,97%	n/a	n/a	n/a	94,64%	83,97%
	Persentase Produk Kebijakan daerah yang diterbitkan sesuai dengan kebutuhan daerah				n/a	n/a	n/a	80%	92%	n/a	n/a	n/a	98,38%	98%	n/a	n/a	n/a	122,98%	106,52%
<b>2.</b>	<b>Meningkatnya Kualitas Pelayanan Kepada Pimpinan dan Kesekretariatan Daerah</b>																		
	Persentase Ketersediaan kebutuhan pimpinan dan kesekretariatan daerah				n/a	n/a	n/a	85%	86%	n/a	n/a	n/a	98,24%	92,19%	n/a	n/a	n/a	115,58%	107%

Keterangan : ST = Sangat Tinggi



Dari Tabel II.5 dapat digambarkan bahwa **pencapaian kinerja sasaran 1 pada periode Renstra 2013-2018 yaitu meningkatnya perluasan dan pengembangan kerjasama daerah** dengan indikator kinerja jumlah kesepakatan bersama dan perjanjian kerjasama yang ditindaklanjuti dalam kurun waktu tahun dari tahun 2016-2020 target mengalami peningkatan begitu pula realisasi capaian setiap tahun juga berhasil melampaui target yang telah ditetapkan, hal ini dapat dilihat dari rasio capaian yang melampaui 100 %. Pada akhir renstra (tahun 2018) dari 12 MoU yang ditargetkan telah terealisasi 17 MoU, sudah melampaui 5 MoU dengan tingkat keberhasilan 142%. Pada tahun 2019 dan 2020 juga mengalami trend peningkatan yang cukup signifikan, dari 12 dan 15 MoU yang ditargetkan pada tahun 2019 dan 2020 telah dapat terealisasi menjadi 29 dan 24 MoU dengan rasio capaian di atas 100%. Dari data tersebut dapat dikatakan bahwa sasaran ini telah Berhasil. Keberhasilan sasaran Sekretariat Daerah yang telah berusaha untuk meningkatkan jumlah mitra kerjasama untuk menindaklanjuti dengan memperluas aspek dan bidang kerjasama serta mengembangkan sumber daya dan potensi yang dimiliki oleh daerah sehingga MoU yang dapat tertandatangani dan ditindaklanjuti terus meningkat setiap tahunnya.

**Pencapaian sasaran 2 yaitu meningkatnya kinerja penyelenggaraan pemerintah daerah** dengan indikator kinerja hasil evaluasi atas LPPD dalam kurun waktu 2016 – 2020 realisasi telah sesuai dengan yang ditargetkan yaitu mendapatkan predikat sangat tinggi, sedangkan realisasinya pada akhir periode renstra tetap sesuai target yaitu sangat tinggi. Pada tahun 2019 dan 2020 hasilnya belum dapat disimpulkan karena pada saat buku ini disusun masih dalam tahap penilaian. Dalam pencapaian kinerja dengan indikator hasil evaluasi atas LPPD dibutuhkan strategi yang baik, walaupun hasil penilaian evaluasi atas LPPD yang diserahkan oleh Kementerian Dalam Negeri (KEMENDAGRI) belum ditetapkan, namun hal tersebut tidak mengurangi dari target dalam pencapaian kinerja hasil evaluasi atas LPPD, dikarenakan data evaluasi di tingkat Regional Provinsi Jawa Timur telah diperoleh dimana Kabupaten Pasuruan mendapatkan nilai 3,2905 dengan kategori sangat tinggi. Diharapkan di akhir tahun renstra nilai ini tetap dapat ditingkatkan begitu pula di tahun 2019 dan 2020. Pada indikator kinerja kedua yaitu persentase perangkat daerah yang berkinerja baik/akuntabel dalam kurun waktu tahun 2016-2017 target meningkat 5% setiap tahunnya sedangkan tahun 2018 target turun 10% dari tahun sebelumnya, hal ini berdasarkan hasil evaluasi dari capaian tahun sebelumnya yang belum memenuhi target sehingga perlu dilakukan penyesuaian target sambil terus dilakukan pembinaan dan pendampingan terhadap perangkat daerah. Berkat



upaya tersebut pada tahun 2017 dan 2018 capaian kinerja persentase perangkat daerah yang berkinerja baik/akuntabel dinilai berhasil karena telah terealisasi 100 % dengan rasio capaian lebih besar dari 100%. Pada akhir periode renstra yaitu tahun 2018 indikator persentase perangkat daerah yang berkinerja baik/akuntabel memiliki capaian sebesar 125%. Pada tahun 2018 dari 56 perangkat Daerah yang dievaluasi SAKIP-nya oleh Inspektorat Kabupaten Pasuruan mendapatkan nilai minimal B. Keberhasilan ini tidak terlepas dari upaya yang telah dilakukan Sekretariat Daerah antara lain dengan asistensi perbaikan mutu Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP).

Capaian kinerja indikator persentase produk hukum daerah yang diterbitkan sesuai dengan kebutuhan daerah dalam kurun waktu (2016-2018) mengalami kenaikan realisasi meskipun belum dapat mencapai target 100 %. Dari Pada akhir periode renstra tahun 2018, capaian kinerja dapat disimpulkan berhasil dengan capaian sebesar 102,94%, diperoleh dari target sebesar 85% terealisasi sebesar 87,5%. Pada tahun 2018 produk hukum daerah yang dibutuhkan sebanyak 88 produk hukum, namun baru sebanyak 80 produk hukum yang yang dihasilkan/diterbitkan. Hal ini dikarenakan terdapat 2 produk rancangan peraturan daerah yang masih belum disahkan dan 6 draft peraturan bupati yang masih dalam proses lebih lanjut oleh Perangkat Daerah pengusul. Keberhasilan ini tidak terlepas dari upaya yang telah dilakukan oleh Sekretariat Daerah yang telah melakukan koordinasi baik itu dengan Perangkat Daerah terkait juga dengan DPRD dan Lembaga Bantuan Hukum dan Kejaksaan.

**Pencapaian kinerja Sasaran 3 yaitu meningkatnya tertib administrasi pelaksanaan pembangunan OPD** dengan indikator persentase kebijakan yang ditindaklanjuti oleh OPD/instansi dapat disampaikan bahwa pencapaian sasaran kinerja tersebut belum dapat mencapai target 100% sebagaimana yang telah ditetapkan akan tetapi dalam kurun waktu 5 tahun secara kontinyu terdapat peningkatan realisasi. Capaian realisasi telah berada diatas 90 % dan terus meningkat sebesar 1% setiap tahunnya dan dinilai cukup berhasil. Upaya yang dilakukan untuk mendukung tercapainya sasaran meningkatnya tertib administrasi pelaksanaan pembangunan OPD tidak terlepas dari upaya yang telah dilakukan Sekretariat daerah dengan melakukan koordinasi yang intensif dengan OPD dan instansi terkait untuk pemenuhan data yang dibutuhkan, pelaksanaan rapat secara rutin, koordinasi dengan instansi vertikal terkait dengan kebijakan yang ada di propinsi maupun pusat serta terus dilakukan upaya monitoring dan evaluasi atas pelaksanaan program ,kegiatan dan kebijakan serta upaya perbaikan agar hasil yang dicapai dapat memenuhi target.



**Pencapaian kinerja sasaran 4 yaitu terwujudnya Pengadaan Barang dan Jasa yang Terintegrasi Sesuai dengan Prinsip-prinsip Pengadaan** dengan indikator persentase paket pengadaan barang/jasa yang berhasil dilelangkan, dari tabel II.5 tersebut dapat disimpulkan berhasil karena realisasi telah melampaui target yang ditetapkan bahkan rasio capaian di akhir periode renstra tahun 2018 mencapai 102,94%. Keberhasilan tersebut berkat upaya yang dilakukan yaitu pelaksanaan proses tender sesuai peraturan yang berlaku dan sesuai jadwal yang ditetapkan, komitmen dari anggota Pokja Pemilihan yang sebelum tender dilaksanakan melaksanakan rapat koordinasi persiapan pelaksanaan tender untuk memastikan persyaratan dokumen sebelum pelaksanaan tender telah dilengkapi dan memenuhi persyaratan.

**Pencapaian kinerja sasaran ke-5 yaitu Meningkatnya kualitas pelayanan publik.** Untuk menilai keberhasilan pencapaian sasaran 5 tersebut digunakan indikator Nilai Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) Pemerintah Daerah. Dari data di atas dapat disimpulkan bahwa sasaran telah tercapai dan dinilai berhasil. Hal ini dapat dilihat dari realisasi dan rasio capaian yang telah di atas 90%, bahkan pada akhir tahun periode renstra IKM Pemerintah Daerah telah masuk kategori Baik, terealisasi juga Baik. Ketercapaian sasaran ini dikarenakan upaya dari Sekretariat Daerah yang telah melakukan pembinaan pada unit pelayanan publik, evaluasi kelembagaan dan evaluasi jabatan Organisasi Perangkat Daerah, kerjasama serta koordinasi yang efektif mulai dari proses perencanaan sampai dengan pelaksanaan kegiatan serta komitmen dari pimpinan.

Pada Tabel II.5 ini juga disajikan capaian kinerja pelayanan Sekretariat Daerah pada tahun 2019-2020. Dalam kurun waktu renstra tahun 2018-2023 Sekretariat Daerah memiliki 2 sasaran dan 5 indikator.

**Sasaran pertama yaitu Meningkatnya tertib administrasi penyelenggaraan pemerintah daerah.** Untuk menilai keberhasilan pencapaian sasaran pertama digunakan indikator yaitu hasil evaluasi atas LPPD. Pada tahun 2019 dan 2020 ditargetkan nilai sangat tinggi, sebagaimana evaluasi pada tahun-tahun sebelumnya target ini telah dapat tercapai. Sedangkan pada tahun 2019 dan 2020 belum dapat diketahui hasilnya karena masih dalam proses penilaian oleh KEMENDAGRI.

Pada indikator kedua yaitu persentase perangkat daerah yang berkinerja sangat baik/Nilai SAKIP minimal BB, pada tahun 2019 dari 28% Perangkat Daerah yang ditargetkan telah tercapai 35,71% dengan rasio capaian 127,53%. Sedangkan pada tahun 2020 mengalami peningkatan yang cukup signifikan dari 33% Perangkat Daerah yang ditargetkan telah terealisasi 58,92% dengan capaian 178,54%.



Perkembangan jumlah Perangkat Daerah yang berkinerja sangat baik dengan nilai SAKIP minimal BB dalam kurun waktu 5 tahun terakhir (2016-2020) menunjukkan trend peningkatan, hal ini tidak terlepas dari upaya yang telah dilakukan Tim SAKIP Kabupaten dan Sekretariat Daerah melalui Bagian Organisasi baik melalui bimbingan Teknis, sosialisasi, koordinasi maupun upaya-upaya untuk meningkatkan komitmen OPD dalam rangka meningkatkan kualitas SAKIP.

Pada indikator ketiga yaitu Persentase OPD yang ber-IKM minimal baik, pada tahun 2019 dan 2020 belum dapat mencapai dari 100% yang ditargetkan. Tahun 2019 terealisasi 94,64% , dan tahun 2020 turun menjadi 83,93%. Meskipun belum dapat mencapai target 100% akan tetapi capaian Sekretariat Daerah dalam hal ini termasuk tinggi dan perlu ditingkatkan lagi pada periode waktu yang akan datang sehingga dapat mencapai target yang ditetapkan. Hal-hal yang dapat diupayakan antara lain melalui sosialisasi penilaian indeks pelayanan publik yang diikuti oleh seluruh OPD, monitoring dan evaluasi penyelenggaraan pelayanan publik kepada seluruh OPD agar meningkatkan pelayanannya serta terus mendorong OPD agar meningkatkan inovasinya dalam hal pelayanan publik.

Pada indikator ke empat yaitu Persentase Produk Kebijakan daerah yang diterbitkan sesuai dengan kebutuhan daerah, pada tahun 2019 telah terealisasi sebesar 98,38% dari 80% yang ditargetkan dengan rasio capaian sebesar 122,98 % dan pada tahun 2020 targetnya meningkat lagi menjadi 92% dan terealisasi sebesar 98%, melampaui target dengan rasio capaian sebesar 106,52%. Keberhasilan ini perlu terus ditingkatkan melalui koordinasi dengan OPD dan instansi terkait serta melakukan kerjasama dengan Lembaga Bantuan Hukum dan Kejaksaan juga melakukan konsultasi dan koordinasi dengan instansi vertikal baik itu di propinsi maupun pusat.

**Pada sasaran kedua yaitu meningkatnya kualitas pelayanan kepada pimpinan dan kesekretariatan daerah** dapat dinilai melalui indikator persentase ketersediaan kebutuhan pimpinan dan kesekretariatan daerah. Pada tahun 2019 dan 2020 Target mengalami peningkatan yaitu dari 85% menjadi 86% dengan realisasi 98,24% pada tahun 2019 dan 92,19% pada tahun 2020. Realisasi pada tahun 2020 mengalami penurunan bila dibandingkan dengan tahun 2019. Akan tetapi secara umum dapat dikatakan berhasil karena telah dapat melampaui target yang ditetapkan dengan rasio capaian sebesar 115,58% pada tahun 2019 dan 107% pada tahun 2020. Untuk dapat mempertahankan keberhasilan ini perlu dilakukan serangkaian upaya antara lain validasi data inventarisasi dan rekapitulasi kebutuhan dan pemeliharaan barang/jasa pada 10 bagian di lingkup Sekretariat Daerah



secara cermat dan akurat serta meningkatkan koordinasi, kerjasama dan sinergitas antar bagian di Sekretariat Daerah.



**Tabel II.6  
(Tabel T-C.24)  
Anggaran dan Realisasi Pendanaan Pelayanan Sekretariat Daerah  
Kabupaten Pasuruan**

Uraian	Anggaran pada Tahun ke (Juta Rp.)					Realisasi Anggaran pada Tahun ke (Juta Rp.)					Rasio antara Realisasi dan Anggaran Tahun ke (%)					Rata-rata Pertumbuhan (%)	
	2016	2017	2018	2019	2020	2016	2017	2018	2019	2020	2016	2017	2018	2019	2020	Anggaran	Realisasi
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)	(18)
Bagian Otonomi Daerah	2.066,7	945,4	1.026,9	1.226,90	478,10	1.676,2	901,7	1.002,6	1.179,40	478,10	81,11	95,38	97,63	96,13	100	-21,80	-19,21
Bagian Kerjasama dan Kependudukan	929,6	720,6	700,3	800,3	0	678,2	629,9	667,2	768,5	0	72,96	87,43	95,27	96,03	0	-27,76	-21,50
Bagian Hukum	1.739,5	1.857,4	1.607,6	2.007,60	1.229,40	1.454,6	1.381,8	1.543,6	1.873,7	1.189,20	83,62	74,40	96,02	93,33	96,73	-5,14	-2,11
Bagian Perekonomian	3.418,8	1.130,2	1.080,0	1.320,00	838,90	2.929,0	971,0	888,7	1.156,9	679,9	85,67	85,91	82,29	87,64	81,05	-21,40	-21,59
Bagian Pembangunan	3.065,4	9.911,6	714,4	814,4	154,3	2.885,8	869,3	667,9	808,9	132,9	94,14	8,77	93,50	99,32	86,13	15,78	-38,88
Bagian Kesejahteraan Sosial	4.164,5	11.966,9	4.594,8	6.732,80	3.494,10	3.736,5	9.679,2	3.670,8	6.052,5 4.553,4	1.630,8	89,72	80,88	79,89	89,90	46,67	31,04	22,20
Bagian Adm. Keuangan dan Perlengkapan Setda	6.915,0	4.265,3	11.090,3	4.978,00	17.390,5	6.148,3	3.837,6	10.714,3	13.677,8	16.571,2	88,91	89,97	96,61	91,47	95,29	78,98	87,01
Bagian Umum	11.986,7	11.234,7	11.035,6	14.431,60	12.027,7	11.139,5	10.747,1	10.393,5	2.766,8	11.384,5	92,93	95,66	94,18	94,78	94,65	1,52	2,01
Bagian Organisasi:	2.171,6	1.759,9	1.745,4	2.931,40	1.404,70	1.685,1	1.615,8	1.655,2	1.326,8	1.237,0	77,60	91,81	94,83	94,38	88,06	-0,98	3,55
Bagian Layanan Pengadaan	-	1.372,6	1.265,9	1.385,9	1.403,30	-	1.343,8	1.209,1	1.326,8	1.294,9	-	-	92,98	95,74	92,28	n/a	n/a



Realisasi anggaran, belanja pada Sekretariat Daerah Kabupaten Pasuruan dalam kurun waktu lima tahun yaitu tahun 2016 -2020 dapat dilihat dalam tabel II.6. Jumlah anggaran tersebut telah dialokasikan per sasaran pembangunan untuk dapat mencapai sasaran Sekretariat Daerah Kabupaten Pasuruan yaitu: meningkatnya perluasan dan pengembangan kerjasama daerah, meningkatnya kinerja penyelenggaraan pemerintah daerah, meningkatnya tertib administrasi pelaksanaan pembangunan OPD serta terwujudnya pengadaan barang dan jasa yang terintegrasi sesuai prinsip-prinsip pengadaan. Dari gambaran di atas dapat dilihat bahwa nilai anggaran setiap tahunnya fluktuatif disesuaikan dengan analisa kebutuhan yang dilakukan oleh masing-masing bagian di lingkup Sekretariat Daerah. Rasio realisasi anggaran secara umum di Sekretariat Daerah dari tahun 2016 sampai dengan tahun 2020 mengalami *trend* peningkatan setiap tahunnya. Apabila dirata-rata rasio antara realisasi dan jumlah anggaran telah melampaui 70%.

#### **2.4 TANTANGAN DAN PELUANG PENGEMBANGAN PELAYANAN SEKRETARIAT DAERAH**

Dalam analisis SWOT tantangan (*threat*) didefinisikan sebagai faktor-faktor yang berpotensi merugikan organisasi. Sedangkan peluang (*opportunity*) didefinisikan sebagai faktor-faktor eksternal yang menguntungkan organisasi yang apabila dimanfaatkan dapat memberikan keunggulan kompetitif.

Sekretariat Daerah Kabupaten Pasuruan terdiri dari 10 unit kerja. Masing-masing unit kerja memiliki tugas pokok yang berbeda-beda. Bagian Tata Pemerintahan memiliki tugas melaksanakan penyiapan perumusan kebijakan daerah, pengoordinasian perumusan kebijakan daerah, pengoordinasian pelaksanaan tugas perangkat daerah, pemantauan dan evaluasi pelaksanaan kebijakan daerah, pelaksanaan pembinaan administrasi di bidang administrasi pemerintahan, administrasi kewilayahan dan kerjasama serta fasilitasi perangkat daerah di bidang kependudukan dan pencatatan sipil, pemberdayaan masyarakat dan desa, ketentraman, ketertiban umum perlindungan masyarakat, kesatuan bangsa dan politik dalam negeri serta Sekretariat DPRD. Bagian Kesejahteraan Rakyat mempunyai tugas pokok melaksanakan penyiapan pengoordinasian perumusan kebijakan daerah, pengoordinasian pelaksanaan tugas Perangkat Daerah,



pemantauan dan evaluasi pelaksanaan kebijakan daerah di bidang keagamaan, pendidikan, kesehatan, kepemudaan dan olah raga, kebudayaan, sosial dan kesejahteraan masyarakat. Bagian Hukum mempunyai tugas pokok melaksanakan penyiapan perumusan kebijakan daerah, pengoordinasian perumusan kebijakan daerah, pengoordinasian pelaksanaan tugas Perangkat daerah, pelaksanaan pemantauan dan evaluasi di bidang perundang-undangan, bantuan hukum dan dokumentasi dan informasi, hak asasi manusia dan publikasi produk hukum. Bagian Perekonomian mempunyai tugas pokok melaksanakan pengoordinasian perumusan kebijakan daerah, pengoordinasian pelaksanaan tugas Perangkat daerah, pemantauan dan evaluasi pelaksanaan kebijakan daerah di bidang pembinaan BUMD dan BLUD, Pengendalian dan Distribusi Perekonomian dan Sumber Daya Alam, dan pengembangan perekonomian rakyat dan ekonomi kreatif serta perangkat daerah yang melaksanakan urusan pemerintahan bidang pangan, perindustrian, perdagangan, koperasi usaha kecil dan menengah, penanaman modal, pertanian, kehutanan, kelautan dan perikanan, lingkungan hidup, energy dan sumber daya mineral dan pariwisata. Bagian Administrasi Pembangunan mempunyai tugas pokok melaksanakan penyiapan pengoordinasian perumusan kebijakan daerah, pengoordinasian pelaksanaan tugas Perangkat Daerah, pemantauan dan evaluasi pelaksanaan kebijakan daerah di bidang penyusunan program, pengendalian program dan evaluasi dan pelaporan. Bagian Pengadaan Barang/Jasa mempunyai tugas melaksanakan penyiapan perumusan kebijakan daerah, pengoordinasian perumusan kebijakan daerah, pengoordinasian pelaksanaan tugas Perangkat Daerah, pelaksanaan pemantauan dan evaluasi di bidang pengelolaan pengadaan barang/jasa, pengelolaan layanan pengadaan secara elektronik, pembinaan dan advokasi pengadaan barang/jasa. Bagian Umum mempunyai tugas melaksanakan penyiapan pelaksanaan kebijakan, pemantauan dan evaluasi di bidang tata usaha pimpinan, staf ahli dan kepegawaian, perlengkapan dan rumah tangga. Bagian Organisasi mempunyai tugas melaksanakan penyiapan perumusan kebijakan daerah, pengoordinasian perumusan kebijakan daerah, pengoordinasian pelaksanaan tugas Perangkat daerah, pemantauan dan evaluasi pelaksanaan kebijakan daerah di bidang kelembagaan dan analisis



jabatan, pelayanan publik tata laksana, serta kinerja dan reformasi birokrasi. Bagian Protokol dan Komunikasi Pimpinan mempunyai tugas melaksanakan penyiapan bahan pelaksanaan kebijakan, pengkoordinasian, dan pelaksanaan tugas perangkat daerah, pemantauan dan evaluasi pelaksanaan kebijakan daerah di bidang protokol, komunikasi pimpinan, dan dokumentasi pimpinan. Bagian Perencanaan dan Keuangan mempunyai tugas melaksanakan penyiapan pengoordinasian perumusan kebijakan daerah, pengoordinasian pelaksanaan tugas Sekretariat Daerah, dan pemantauan dan evaluasi pelaksanaan kebijakan daerah di bidang perencanaan, keuangan dan pelaporan.

Dalam melaksanakan tugas serta fungsi pelayanan Sekretariat Daerah tentu tidak terlepas dari berbagai tantangan. Secara umum tantangan yang harus dihadapi oleh masing-masing unit kerja adalah sebagai berikut:

- a. Keterbatasan sumber daya manusia yang berkualitas terkait dengan pengetahuan dan kemampuan SDM dalam mengidentifikasi dan memahami permasalahan pemerintahan yang berkembang, kurangnya disiplin aparatur Sekretariat Daerah;
- b. Keterbatasan sarana dan prasarana guna menunjang kelancaran pelaksanaan administrasi pemerintahan dan pembangunan;
- c. Belum tertatanya sistem administrasi dan kearsipan dengan baik sehingga menyebabkan pelayanan Sekretariat Daerah menjadi kurang efisien dan optimal;
- d. Kurang optimalnya pelaksanaan tugas dan fungsi administrasi dan pelayanan publik;
- e. Belum terintegrasinya koordinasi lintas sektor yang dapat menghambat pembangunan daerah.
- f. Berubahnya peraturan/regulasi yang sedikit banyak berpengaruh terhadap pelayanan dan penatausahaan keuangan di lingkungan Sekretariat Daerah.
- g. Perlunya peningkatan kualitas Reformasi Birokrasi.

Sementara itu kondisi yang dianggap dapat memberikan peluang untuk melaksanakan fungsi atau pengembangan pelayanan di Sekretariat Daerah adalah :



- a. Tersedianya Sumber Daya Manusia/aparatur dari berbagai macam disiplin ilmu ;
- b. Anggaran pendukung pencapaian tugas dan fungsi Sekretariat Daerah;
- c. Predikat penyelenggaraan pemerintahan dengan predikat WTP
- d. Kondisi Geografis Kabupaten Pasuruan yang strategis dan potensial;
- e. Kondisi masyarakat yang kondusif di wilayah Kabupaten Pasuruan;
- f. Perkembangan informasi dan teknologi yang makin pesat dalam mendukung pengelolaan data dan informasi.;
- g. Tertatanya kelembagaan pada Sekretariat Daerah yang mendukung terlaksananya tupoksi untuk mencapai target yang ditetapkan;
- h. Adanya kebijakan Pemerintah Daerah dan dukungan dari Kepala Daerah yang mendukung peningkatan program pembangunan daerah.



### BAB III

## PERMASALAHAN DAN ISU-ISU STRATEGIS

### 3.1 IDENTIFIKASI PERMASALAHAN BERDASARKAN TUGAS DAN FUNGSI PELAYANAN SEKRETARIAT DAERAH

Isu-isu strategis berdasarkan tugas dan fungsi Perangkat Daerah adalah kondisi atau hal yang harus diperhatikan atau dikedepankan dalam perencanaan pembangunan karena dampaknya yang signifikan bagi pelaksanaan tugas dan fungsi pelayanan Perangkat Daerah di masa yang akan datang. Suatu kejadian/kondisi yang menjadi isu strategis adalah keadaan yang apabila tidak diantisipasi akan menimbulkan kerugian yang besar atau sebaliknya dalam hal tidak dimanfaatkan, akan menghilangkan peluang untuk meningkatkan layanan kepada masyarakat dalam jangka panjang.

Dalam menyusun Perubahan Rencana Strategis Sekretariat Daerah Kabupaten Pasuruan telah dikaji potensi dan masalah terkait dengan kondisi Sekretariat Daerah Kabupaten Pasuruan. Berikut ini adalah analisis potensi dan masalah terkait kondisi Sekretariat Daerah Kabupaten Pasuruan yang merupakan potensi dan masalah strategis:

**Tabel III.1**  
**Analisis Potensi dan Masalah**

<b>Potensi</b>	<b>Analisis</b>	<b>Masalah</b>	<b>Analisis</b>
Tertatanya kelembagaan pada Sekretariat Daerah	Melalui kelembagaan yang telah tertata akan mempermudah pelaksanaan tugas dan fungsi Sekretariat Daerah sehingga hasil kerja yang diperoleh juga dapat menjadi lebih optimal	Kurangnya kedisiplinan aparatur sekretariat Daerah	Kurangnya kedisiplinan aparatur sangat berpengaruh pada pelayanan Sekretariat Daerah sehingga perlu adanya peningkatan kedisiplinan terhadap aparatur
Adanya kebijakan Pemerintah Daerah yang mendukung peningkatan program pembangunan daerah	Kebijakan Pemerintah Daerah sangat mendukung program-program pembangunan daerah	Belum tertatanya sistem administrasi dan kearsipan dengan baik	Sistem administrasi dan kearsipan yang belum tertata baik akan menyebabkan pelayanan Sekretariat Daerah menjadi tidak efisien dan optimal



Adanya potensi SDM	Adanya potensi SDM terutama yang berkualifikasi akan berpengaruh pada kinerja dan pelayanan Sekretariat Daerah	Kurang optimalnya pelaksanaan tugas dan fungsi administrasi dan pelayanan publik	Kurang optimalnya pelaksanaan tugas dan fungsi administrasi dan pelayanan publik akan menurunkan kinerja Sekretariat Daerah dan dapat menghambat pembangunan daerah
Tersedianya anggaran yang memadai	Tersedianya anggaran yang memadai sangat membantu mempermudah dalam realisasi program dan kegiatan Sekretariat Daerah	Kualitas SDM aparat masih perlu ditingkatkan	Kualitas SDM yang kurang menyebabkan pelaksanaan tugas dan fungsi Sekretariat Daerah tidak efektif dan efisien sehingga hasil kerja kurang optimal
		Keterbatasan sarana dan prasarana	Keberadaan sarana dan prasarana sangat penting dalam mendukung kerja Sekretariat Daerah sehingga perlu peningkatan sarana dan prasarana yang saat ini masih terbatas
		Masih belum terintegrasinya koordinasi lintas sektor	Masih belum tertibnya pelaksanaan kerjasama/ koordinasi lintas sektor menyebabkan tidak adanya integrasi antar sektor sehingga menghambat pembangunan daerah

Pada dasarnya strategi ini dilakukan dengan pemilihan hal yang dianggap penting sebagai berikut :

- ♣ Peningkatan pelayanan Sekretariat Daerah;
- ♣ Peningkatan ketersediaan sarana dan prasarana;
- ♣ Peningkatan kualitas SDM;
- ♣ Peningkatan kedisiplinan aparatur;
- ♣ Penataan sistem administrasi dan kearsipan;
- ♣ Peningkatan integrasi dalam koordinasi lintas sektor.



Berdasarkan hasil pembobotan terhadap isu-isu strategis setelah melakukan analisis faktor internal dan eksternal, maka dapat ditentukan ranking prioritas pilihan asumsi strategis yang merupakan Faktor Kunci Keberhasilan (FKK) sebagai berikut :

- ♣ Peningkatan Kualitas SDM aparatur Sekretariat Daerah;
- ♣ Peningkatan ketersediaan sarana dan prasarana;
- ♣ Peningkatan integrasi dalam koordinasi lintas sektor.

Pada dasarnya seluruh strategi yang diperoleh dari analisis sebelumnya tetap perlu dilakukan karena keseluruhan strategi memiliki peran penting dalam upaya meningkatkan pelayanan Sekretariat Daerah secara umum. Namun kunci keberhasilan merupakan prioritas untuk dilaksanakan lebih dahulu karena bersifat mendesak dan sangat penting.

### **3.2 TELAAHAN VISI, MISI DAN PROGRAM BUPATI DAN WAKIL BUPATI**

Berdasarkan Visi Bupati Pasuruan, “**Menuju Kabupaten Pasuruan yang Sejahtera, Maslahat dan Berdaya Saing**”, berikut Misi yang telah disusun untuk mencapai Visi tersebut, antara lain :

1. Meningkatkan kualitas dan produktivitas sektor-sektor produksi dan produk-produk unggulan melalui penguatan kelembagaan sosial dan meningkatkan nilai tambah ekonomi desa berbasis masyarakat dengan cara mempermudah aspek legal dan pembiayaan dalam rangka percepatan pembangunan daerah menuju kesejahteraan masyarakat.
2. Melaksanakan pembangunan berbasis keluarga dengan memanfaatkan modal sosial berbasis religiusitas dan budaya, guna mewujudkan kohesi sosial.
3. Meningkatkan kualitas infrastruktur daerah untuk penguatan konektivitas dan aksesibilitas masyarakat dalam rangka peningkatan daya saing daerah dengan memperhatikan pemanfaatan segenap potensi sumberdaya alam secara



bertanggungjawab dan berkelanjutan sebagai bentuk konservasi lingkungan di Kabupaten Pasuruan.

4. Memperkuat dan memperluas Reformasi Birokrasi yang mendukung tata kelola pemerintahan dan pelayanan publik yang inovatif, bersih, efektif, akuntabel, dan demokratis berbasis teknologi informasi.
5. Meningkatkan pelayanan dasar, terutama pelayanan kesehatan, permukiman dan pendidikan dengan mengintegrasikan pendidikan formal dan nonformal sebagai wujud afirmasi pendidikan karakter di Kabupaten Pasuruan.

Berdasarkan tugas dan fungsi Sekretariat Daerah yaitu berkewajiban membantu Bupati dalam menyusun kebijakan dan mengkoordinasikan administrasi terhadap pelaksana tugas Perangkat Daerah serta pelayanan administrasi dalam melaksanakan tugas dan fungsi tersebut, Sekretariat Daerah tidak terlepas dari tugas dan fungsi Organisasi Perangkat Daerah lain baik yang bersifat koordinatif maupun teknis.

Oleh karena itu untuk mencapai hasil yang optimal maka diperlukan koordinasi, komunikasi, integrasi, sinkronisasi dan simplifikasi baik yang bersifat horizontal maupun vertikal. Capaian kinerja Sekretariat Daerah selama ini telah diukur berdasarkan indikator dan parameter yang jelas. Selanjutnya Sasaran indikator kinerja dan hasil capaian kinerja Sekretariat Daerah disesuaikan dengan visi, misi dan program Bupati dan Wakil Bupati khususnya misi Bupati yang keempat yaitu Memperkuat dan memperluas Reformasi Birokrasi yang mendukung tata kelola pemerintahan dan pelayanan publik yang inovatif, bersih, efektif, akuntabel, dan demokratis berbasis teknologi informasi.



**Tabel III.2**  
**Faktor Penghambat dan Pendorong Pelayanan Sekretariat Daerah Terhadap Pencapaian Visi, Misi, dan Program Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah**

Visi : “Menuju Kabupaten Pasuruan yang Sejahtera, Maslahat dan Berdaya Saing”				
No.	Misi dan Program Bupati dan Wakil Bupati terpilih	Permasalahan Pelayanan SKPD	Faktor	
			Penghambat	Pendorong
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
1.	Misi 4: Memperkuat dan memperluas Reformasi Birokrasi yang mendukung tata kelola pemerintahan dan pelayanan publik yang inovatif, bersih, efektif, akuntabel, dan demokratis berbasis teknologi informasi	1. Perlunya peningkatan pelayanan Sekretariat Daerah  2. Perlunya peningkatan ketersediaan sarana dan prasarana  3. Perlunya peningkatan dari segi kuantitas dan kualitas SDM	1. Keterbatasan sarana dan prasarana yang ada di sekretariat daerah  2. Ketersediaan anggaran yang kurang mencukupi serta data kebutuhan yang tidak update  3. - Distribusi pegawai yang kurang merata bila dibandingkan dengan jumlah pekerjaan. - Mutasi pegawai	1. Meningkatkan pemenuhan kebutuhan sarana-dan prasarana serta menyusun skala prioritas disesuaikan dengan data yang ada dalam RKBMD dan RKPBMMD serta ketersediaan anggaran.  2. - Meningkatkan pemenuhan kebutuhan sarana-dan prasarana serta menyusun skala prioritas disesuaikan dengan data yang ada dalam RKBMD dan RKPBMMD serta ketersediaan anggaran. - Melakukan pemeliharaan sarana dan prasarana secara berkala  3. Meningkatkan minat dan kesadaran dari ASN di lingkungan Setda untuk meningkatkan kapasitasnya melalui bimtek dan webinar



			<ul style="list-style-type: none"> <li>- Kurangnya minat para ASN di lingkungan Sekretariat Daerah untuk mengikuti seminar dan bimtek</li> <li>- Keterbatasan anggaran bimtek</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>yang tidak berbayar yang banyak dilakukan oleh Pemda maupun lembaga pendidikan/universitas sesuai dengan tupoksinya masing-masing.</li> <li>- Menambah anggaran untuk bimtek pegawai</li> </ul>
		4. Perlunya peningkatan kedisiplinan aparatur	4. Kurangnya pemahaman pegawai tentang disiplin aparatur	4. - Adanya sosialisasi terkait disiplin pegawai - Adanya system reward punishment yang diterapkan kepada pegawai
		5. Perlunya peningkatan sistem administrasi kearsipan	5. Kurangnya diklat teknis tentang kearsipan	5. mendorong Penggunaan aplikasi kearsipan/paperless
		6. Perlunya peningkatan integrasi dalam koordinasi lintas sektor	6. Kurangnya koordinasi lintas sektor	6. Meningkatnya koordinasi dengan perangkat daerah terkait

Keterangan : Sekretariat Daerah termasuk dalam misi Bupati dan Wakil Bupati ke-4



### 3.3 TELAHAH RENSTRA SEKRETARIAT DAERAH DAN RENSTRA PERANGKAT DAERAH KABUPATEN PASURUAN

Renstra Sekretariat Daerah Kabupaten Pasuruan memiliki hubungan dengan Renstra seluruh Perangkat Daerah di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Pasuruan karena tugas dan fungsi Sekretariat Daerah Kabupaten Pasuruan selain sebagai pengkoordinasi pelaksanaan fungsi seluruh perangkat daerah, secara umum Sekretariat Daerah memiliki peran untuk mewujudkan efektifitas manajemen penyelenggaraan pemerintah daerah. Berikut gambaran hubungan relasional pelaksanaan tugas dan fungsi Sekretariat Daerah terkait pencapaian Renstra seluruh perangkat daerah.

Tabel III.3

**Telaah Renstra Sekretariat Daerah Kabupaten Pasuruan dengan Renstra Perangkat Daerah di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Pasuruan**

NO.	RENSTRA PERANGKAT DAERAH	TUPOKSI PERANGKAT DAERAH	PERMASALAHAN	FAKTOR PENGHAMBAT DAN PENDORONG
1.	Renstra seluruh Perangkat Daerah Kabupaten Pasuruan	1. Pengkoordinasian penyusunan kebijakan daerah	1. Penyusunan Kebijakan tidak didasarkan pada landasan pemikiran (teotitis) yang kuat tentang hubungan sebab akibat antara kebijakan dengan hasil yang akan dicapai	1. <i>Faktor Penghambat</i> : Ketersediaan data/informasi pendukung dan penguasaan analisis kebijakan <i>Faktor Pendorong</i> : <ul style="list-style-type: none"><li>- Kebutuhan perumusan kebijakan baru (inovasi) sesuai dengan konteks situasi yang dinamis</li><li>- Hubungan sebab akibat antara kebijakan dengan hasil jarang bersifat langsung. Seringkali terjadi satu kebijakan akan menimbulkan dampak dalam waktu yang lama</li></ul>
		2. Pengkoordinasian pelaksanaan tugas satuan kerja perangkat daerah	2. Koordinasi pencapaian IKU seluruh Perangkat Daerah belum	2. <i>Faktor Penghambat</i> : Kualitas indikator dan kapasitas Perangkat Daerah



			optimal	dalam mendorong pencapaian target tujuan/sasaran kinerja yang ditetapkan <i>Faktor Pendorong:</i> Adanya tugas dan Fungsi Sekretariat Daerah ( diampu oleh Bagian-Bagian ) dalam pengoordinasian pelaksanaan fungsi
		3. Pemantauan dan evaluasi pelaksanaan kebijakan daerah	3. Pengendalian atas pencapaian seluruh target pembangunan belum dilaksanakan secara optimal	3. <i>Faktor Penghambat :</i> Kesesuaian antara perencanaan dengan pelaksanaan kebijakan dan kualitas tolok ukur keberhasilan kebijakan yang ditetapkan <i>Faktor Pendorong:</i> Akuntabilitas pelaksanaan kebijakan perlu dibangun sampai pada aspek pencapaian, efisiensi, dan efektifitas program/kegiatan /sub kegiatan pembangunan
		4. Pelayanan administrasi dan pembinaan aparatur sipil negara pada instansi daerah	4. Koordinasi antar lingkup pemerintahan daerah belum optimal memfasilitasi kebutuhan bersama berbagai pihak	4. <i>Faktor Penghambat :</i> Sulitnya menyamakan konsepsi dan komitmen antar berbagai lingkup pemerintahan daerah <i>Faktor Pendorong:</i> Kebutuhan untuk melakukan sinergi dan integrasi berbagai pelaksanaan program/kegiatan untuk menghasilkan efek pembangunan yang luas dan merata



### **3.4 TELAAH RENCANA TATA RUANG WILAYAH DAN KAJIAN LINGKUNGAN HIDUP STRATEGIS**

Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Pasuruan Tahun 2009-2029 ditetapkan dengan Peraturan Daerah Kabupaten Pasuruan Nomor 12 Tahun 2010 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) Kabupaten Pasuruan Tahun 2009-2029. Kajian Lingkungan Hidup Strategis (KLHS) bertujuan untuk memastikan bahwa prinsip pembangunan berkelanjutan telah menjadi dasar yang terintegrasi dalam pembangunan suatu wilayah dan/atau kebijakan, rencana, dan/atau program. KLHS ini selanjutnya wajib dilaksanakan oleh pemerintah daerah dalam penyusunan perencanaan program pembangunan daerah, salah satunya dokumen RPJMD

Penyusunan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) di daerah memerlukan hasil analisis yang sistematis, menyeluruh, dan selaras dengan visi serta misi suatu daerah. Dalam penyusunannya diperlukan juga masukan hasil dari analisis yang sistematis, menyeluruh, dan partisipatif dalam rangka mendukung perumusan isu-isu strategis daerah dan arah kebijakan atau rencana program pembangunan. Tentunya diperlukan suatu rekomendasi yang dapat menjadi dasar bagi penyusunan kebijakan, rencana, dan/atau program pembangunan dalam suatu wilayah. Kajian Lingkungan Hidup Strategis (KLHS) merupakan salah satu instrumen yang mampu memberikan rekomendasi dengan fokus utama: mengintegrasikan pertimbangan lingkungan pada tingkatan pengambilan keputusan yang bersifat strategis, yakni pada arah kebijakan, rencana dan program pembangunan.

Sekretariat Daerah berdasarkan Peraturan Bupati Pasuruan Nomor 137 tahun 2021 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan fungsi serta Tata Kerja Sekretariat Daerah Kabupaten Pasuruan memiliki empat peran utama yaitu : sebagai koordinator penyusunan kebijakan daerah, koordinator pelaksanaan tugas SKPD, pemantauan serta evaluasi kebijakan daerah serta pelayanan administrative dan pembinaan aparatur sipil Negara pada instansi daerah, meskipun tidak berkaitan langsung dengan RTRW dan KLHS pada RPJMD tetapi Sekretariat Daerah berkewajiban untuk ikut mendukung pelaksanaan KLDH dan RTRW.



### **3.5 PENENTUAN ISU-ISU STRATEGIS**

#### **1. Dalam penyelenggaraan Pemerintah Daerah agar dapat berjalan baik diperlukan kemampuan untuk mengkoordinir dalam penyusunan kebijakan pemerintah daerah.**

Diharapkan penyelenggaraan pemerintahan dapat berjalan lancar khususnya dalam pelayanan administrasi dan penyusunan kebijakan di lingkungan Pemerintah Kabupaten Pasuruan.

Disamping itu perubahan struktur kelembagaan berdasarkan PP 18 Tahun 2016 tidak hanya sekedar ganti baju atau bentuk kelembagaannya saja tapi yang lebih penting adalah optimalisasi tugas – tugas dan fungsi organisasi perangkat daerah yang bermuara pada peningkatan pelayanan publik guna meningkatkan kesejahteraan masyarakat pada umumnya.

#### **2. Terwujudnya sistem dan prosedur pelayanan yang handal.**

Sistem dan prosedur pelayanan Sekretariat Daerah Kabupaten Pasuruan pada tahun 2016 telah memperoleh Sertifikat ISO 9001 : 2015, dengan memiliki ISO berarti sistem dan prosedur pelayanan yang diberikan Sekretariat Daerah sudah berstandart internasional. Oleh karena itu diperlukan komitmen dan konsistensi yang kuat dari semua aparat di lingkungan Pemerintah Daerah khususnya Sekretariat Daerah untuk memberikan pelayanan yang sebaik-baiknya kepada masyarakat sesuai dengan bidangnya.

#### **3. Tertib administrasi kepegawaian.**

Dengan meningkatnya tugas-tugas dan fungsi Sekretariat Daerah maka diperlukan SDM dengan jumlah dan kualitas yang memadai. Untuk itu perlu dilakukan penataan kepegawaian yang dimulai dengan penetapan sistem administrasi kepegawaian yang efektif, meliputi penataan peta kepegawaian, sistem pembinaan karir, pemberian reward dan punishment serta pelayanan administrasi kepegawaian yang berkualitas.



#### **4. Pemberdayaan pembangunan ekonomi kerakyatan.**

Dalam rangka memberdayakan ekonomi lemah dan pemberdayaan pembangunan ekonomi kerakyatan maka Pemerintah Kabupaten Pasuruan melalui Bagian Perekonomian melakukan usaha-usaha antara lain :

- Koordinasi pembinaan dan pelayanan administrasi di bidang Potensi Daerah dan Sumber Daya Alam;
- Koordinasi Pengembangan perekonomian rakyat dan ekonomi kreatif;
- Koordinasi pengembangan BUMD;
- Fasilitasi pemasaran potensi daerah dan produk-produk unggulan melalui event-event pameran.

#### **5. Layanan Pengadaan yang Profesional dalam mendukung pelaksanaan pembangunan yang berkesinambungan.**

Bagian Layanan Pengadaan Kabupaten Pasuruan tidak hanya sebagai unit yang hanya bekerja untuk memilih penyedia barang/jasa, tetapi juga sebagai pusat keunggulan dan rujukan dalam bidang pengadaan barang dan jasa pemerintah Kabupaten Pasuruan (*center of excellence*). Bagian Layanan Pengadaan Kabupaten Pasuruan sebagai *Center of Excellence* mengimplementasikan kegiatan dengan pendekatan pada proses perbaikan yang berkelanjutan, peningkatan kapasitas SDM pelaksana pengadaan, berorientasi pada pelayanan pengadaan dan nilai pelanggan, pelayanan yang proaktif, dan *leading practice* dalam pengadaan barang/jasa pemerintah.

Bagian Layanan Pengadaan Kabupaten Pasuruan sebagai *Center of Excellence* mendorong peningkatan kinerja pengadaan barang dan jasa dan keterbukaan informasi publik.



## **BAB IV**

### **TUJUAN DAN SASARAN**

#### **4.1 TUJUAN DAN SASARAN JANGKA MENENGAH SEKRETARIAT DAERAH**

Berdasarkan visi dan misi Bupati Pasuruan, Sekretariat Daerah Kabupaten Pasuruan merumuskan tujuan dan sasaran jangka menengah yang akan dicapai dalam periode Renstra Tahun 2018-2023.

Tujuan adalah sesuatu kondisi yang akan dicapai atau dihasilkan dalam jangka waktu 5 (lima) tahunan. Rumusan tujuan merupakan dasar dalam menyusun strategi pembangunan yang akan dilaksanakan.

Tujuan Sekretariat Daerah dalam periode lima tahun kedepan yaitu **“Meningkatnya Kualitas Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah”**.

Sasaran adalah rumusan kondisi yang menggambarkan tercapainya tujuan, berupa hasil pembangunan daerah/perangkat daerah yang diperoleh dari pencapaian hasil (*outcome*) program Perangkat Daerah.

Sasaran Strategis Sekretariat Daerah dalam periode lima tahun kedepan yaitu :

1. Meningkatkan Kualitas kebijakan bidang pemerintahan, Hukum dan Kesejahteraan rakyat
2. Meningkatkan Kualitas Kebijakan Perekonomian dan Pembangunan
3. Meningkatkan Kualitas Tata Kelola Pemerintahan Daerah

Sedangkan Indikator Tujuan dan Sasaran serta Target Tahunan dalam periode Renstra Tahun 2018-2023 mengalami perubahan yang dituangkan dalam rencana strategis (renstra) perubahan sebagai berikut:



**Tabel IV.1**  
**( Tabel T-C.25)**  
**Tujuan dan Sasaran Jangka Menengah Pelayanan Perangkat Daerah**

No	TUJUAN	SASARAN	INDIKATOR TUJUAN/SASARAN	TARGET KINERJA TUJUAN/SASARAN PADA TAHUN KE-				
				2019	2020	2021	2022	2023
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	<b>Tujuan Sekretariat Daerah :</b> Meningkatnya Kualitas Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah		Nilai SAKIP	79,00 (BB)	80,00 (BB)	81,00 (A)		
		1. Meningkatnya Kualitas kebijakan bidang pemerintahan, Hukum dan Kesejahteraan rakyat	1.1. Hasil Evaluasi atas LPPD	≥ 3,1000 (sangat tinggi)	≥ 3,1500 (sangat tinggi)	≥ 3,2000 (sangat tinggi)		
			1.2. Persentase Kebijakan Bidang Kesejahteraan rakyat yang dilaksanakan	100%	100%	100%		
			1.3 Persentase kebijakan bidang hukum yang terlaksana sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku	100%	100%	100%		
		2. Meningkatnya Kualitas Kebijakan Perekonomian dan pembangunan daerah	2.1 Persentase terlaksananya Kebijakan perekonomian sesuai dengan ketentuan yang berlaku	100%	100%	100%		
			2.2 Persentase kebijakan terkait pembangunan yang sesuai dengan ketentuan yang berlaku	n/a	n/a	100%		
			2.3 Indeks Tata Kelola Pengadaan Barang dan Jasa	n/a	n/a	2,00%		
		3. Meningkatnya Kualitas Tata Kelola Pemerintahan Daerah	3.1 Nilai SAKIP Setda	80,54	83,70	84,00		
			3.2 Persentase Perangkat Daerah yang tepat Fungsi dan Tepat Ukuran	n/a	n/a	100%		
			3.3 Persentase Perangkat Daerah yang Berkinerja Sangat Baik/Nilai SAKIP Minimal BB	n/a	n/a	85%		



No	TUJUAN	SASARAN	INDIKATOR TUJUAN/SASARAN	TARGET KINERJA TUJUAN/SASARAN PADA TAHUN KE-				
				2019	2020	2021	2022	2023
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	<b>Tujuan Sekretariat Daerah :</b> Meningkatnya Kualitas Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah		Nilai SAKIP				87,00 (A)	89,00 (A)
		1. Meningkatnya Kualitas kebijakan bidang pemerintahan, Hukum dan Kesejahteraan rakyat	1.1. LPPD Tepat Waktu				1 laporan	1 laporan
			1.2. Persentase Kebijakan Bidang Kesejahteraan rakyat yang dilaksanakan				100%	100%
			1.3 Persentase kebijakan bidang hukum yang diundangkan				100%	100%
		2. Meningkatnya Kualitas Kebijakan Perekonomian dan pembangunan daerah	2.1 Persentase terlaksananya Kebijakan perekonomian				100%	100%
			2.2 Persentase kebijakan terkait pembangunan yang sesuai dengan ketentuan yang berlaku				100%	100%
			2.3 Indeks Tata Kelola Pengadaan Barang dan Jasa				Cukup (61)	Baik (81)
		3. Meningkatnya Kualitas Tata Kelola Pemerintahan Daerah	3.1 Nilai SAKIP Setda				87,00	89,00
			3.2 Persentase Perangkat Daerah yang tepat Fungsi dan Tepat Ukuran				100%	100%
			3.3 Persentase Perangkat Daerah yang Berkinerja Sangat Baik/Nilai SAKIP Minimal BB				95%	100%



## **BAB V**

### **STRATEGI DAN ARAH KEBIJAKAN**

Strategi dan arah kebijakan dalam mencapai tujuan dan sasaran dalam rangka pencapaian visi dan misi pemerintah daerah, diuraikan dalam tujuan dan sasaran.

Strategi adalah langkah berisikan program-program sebagai prioritas pembangunan daerah/perangkat daerah untuk mencapai sasaran. Sedangkan arah kebijakan adalah rumusan kerangka pikir atau kerangka kerja untuk menyelesaikan permasalahan pembangunan dan mengantisipasi isu strategis daerah/perangkat daerah yang dilaksanakan secara bertahap sebagai penjabaran strategi.

Dalam kerangka tersebut, Sekretariat Daerah Kabupaten Pasuruan merumuskan strategi dan arah kebijakan perencanaan pembangunan daerah secara komprehensif untuk mencapai tujuan dan sasaran Renstra dengan efektif (berdaya guna) dan efisien (berhasil guna).

Strategi yang akan dilaksanakan Sekretariat Daerah untuk mencapai Tujuan dan Sasaran yang telah ditetapkan dalam tahun 2018-2023 sebagai berikut:

1. Meningkatkan pelaksanaan kerjasama dan pengembangan potensi daerah;
2. Mendorong OPD untuk mendokumentasikan dan mengumpulkan data kinerja dan data pendukung dengan baik, akurat dan valid;
3. Monitoring dan evaluasi capaian kinerja OPD secara berkala;
4. Membentuk produk hukum daerah yang berkualitas sesuai kebutuhan;
5. Optimalisasi penyelenggaraan pengendalian program pembangunan secara berkala;
6. Meningkatkan ketertiban dan ketepatan pelaksanaan tender pengadaan barang dan jasa;
7. Meningkatkan tertib administrasi dan peningkatan kelayakan dan kuantitas sesuai kebutuhan.

Sedangkan arah dan kebijakan yang ditempuh di lingkungan Sekretariat Daerah Kabupaten Pasuruan adalah sebagai berikut :

1. Penyusunan kajian-kajian yang mendukung pelaksanaan kerjasama dan potensi daerah;



2. Melaksanakan evaluasi, analisis data kinerja dan data pendukung penyelenggaraan pemerintah daerah sesuai peraturan perundang-undangan;
3. Seluruh OPD wajib membuat dokumen pendukung SAKIP (Renstra, IKU, RKT, PK, Rencana Aksi dan Laporan Kinerja/LKjIP);
4. Peningkatan kapasitas penyusun rancangan produk hukum daerah;
5. Fasilitasi penyusunan progress report kegiatan (bulanan/triwulan/semester dan tahunan);
6. Seluruh OPD wajib tepat waktu dalam penyampaian berkas/data kegiatan pengadaan barang dan jasa;
7. Tertib administrasi pembukuan dan pemenuhan kuantitas dan kualitas sarana prasarana operasional.



**Tabel V.1  
Tujuan, Sasaran, Strategi dan Arah Kebijakan**

<b>VISI : MENUJU KABUPATEN PASURUAN YANG SEJAHTERA, MASLAHAT, DAN BERDAYA SAING</b>				
<b>MISI 4 : Memperkuat Dan Memperluas Reformasi Birokrasi Yang Mendukung Tata Kelola Pemerintahan Dan Pelayanan Publik Yang Inovatif, Bersih, Efektif, Akuntabel, Dan Demokratis Berbasis Pada Teknologi Informasi</b>				
<b>Tujuan</b>	<b>Sasaran</b>		<b>Strategi</b>	<b>Arah Kebijakan</b>
(1)	(2)		(3)	(4)
Meningkatnya Kualitas Sistem Akuntabilitas kinerja Instansi Pemerintah	1.	Meningkatnya kualitas kebijakan bidang pemerintahan, Hukum dan Kesejahteraan rakyat	- Mendorong OPD untuk mendokumentasikan dan mengumpulkan data kinerja dan data pendukung dengan baik, akurat dan valid	- Melaksanakan evaluasi, analisis data kinerja dan data pendukung penyelenggaraan pemerintah daerah sesuai peraturan perundang- undangan
			- Membentuk produk hukum daerah yang berkualitas sesuai kebutuhan	- Peningkatan kapasitas penyusun rancangan produk hukum daerah
	2.	Meningkatnya Kualitas Kebijakan Perekonomian dan pembangunan daerah	- Meningkatkan pelaksanaan pengembangan potensi daerah	- Penyusunan kajian-kajian yang mendukung pelaksanaan kerjasama dan potensi daerah
			- Optimalisasi penyelenggaraan pengendalian program pembangunan secara berkala	- Fasilitasi penyusunan progress report kegiatan (bulanan/triwulan/semester dan tahunan)
			- Meningkatkan ketertiban dan ketepatan pelaksanaan tender pengadaan barang dan jasa	- Seluruh OPD wajib tepat waktu dalam penyampaian berkas/data kegiatan pengadaan barang dan jasa
	3.	Meningkatnya Kualitas Tata Kelola pemerintahan daerah	- Monitoring dan evaluasi capaian kinerja OPD secara berkala	- Seluruh OPD wajib membuat dokumen pendukung SAKIP (Renstra, IKU, RKT, PK, Rencana Aksi dan Laporan Kinerja)
			- Meningkatkan tertib administrasi dan ketersediaan kebutuhan pimpinan dan kesekretariatan daerah	- Tertib administrasi pembukuan dan pemenuhan kebutuhan pimpinan dan kesekretariatan daerah

## **BAB VI**

### **RENCANA PROGRAM DAN KEGIATAN SERTA PENDANAAN**

Dalam upaya mencapai tujuan Rencana Strategis Sekretariat Daerah Kabupaten Pasuruan perlu disusun rencana program dan kegiatan.

Program adalah penjabaran kebijakan Perangkat Daerah dalam bentuk upaya yang berisi satu atau lebih kegiatan dengan menggunakan sumber daya yang disediakan untuk mencapai hasil yang terukur sesuai dengan tugas dan fungsi.

Program-program yang akan dilaksanakan Sekretariat Daerah untuk mencapai Tujuan dan Sasaran yang telah ditetapkan dalam tahun 2018-2023 sebagai berikut:

Program Tahun 2019 yaitu :

- a. Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur
- b. Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan
- c. Penetapan dan Penegasan Batas Daerah;
- d. Inventarisasi dan Pembakuan Nama Rupa Bumi;
- e. Pengembangan Kelembagaan dan Aparatur;
- f. Pengembangan Kinerja Pelayanan Publik;
- g. Pelayanan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah;
- h. Peningkatan Pembinaan Mental Spiritual;
- i. Pelayanan Sosial Budaya dan Kesejahteraan Rakyat;
- j. Penataan Peraturan Perundangan-undangan;
- k. Peningkatan Kerjasama;
- l. Peningkatan dan Pengembangan Pengelolaan Keuangan Daerah;
- m. Fasilitasi Pemberdayaan Ekonomi Masyarakat Berbasis Potensi Daerah;
- n. Sosialisasi Ketentuan di Bidang Cukai;
- o. Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur;
- p. Pelayanan Administrasi Perkantoran;
- q. Peningkatan Disiplin Aparatur;
- r. Peningkatan Pelayanan Kedinasan Kepala Daerah/Wakil Kepala Daerah;



Program Tahun 2020 yaitu :

- a. Otonomi Daerah dan Kewilayahan;
- b. Optimalisasi Fasilitasi Reformasi Birokrasi;
- c. Pelayanan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah;
- d. Penyelenggaraan Kesejahteraan Sosial;
- e. Penataan Peraturan Perundangan-undangan;
- f. Peningkatan Kerjasama;
- g. Pengelolaan Administrasi Pembangunan;
- h. Perumusan Kebijakan dan Fasilitasi Bidang Perekonomian;
- i. Sosialisasi Ketentuan di Bidang Cukai;
- j. Pelayanan Administrasi Keuangan dan Perlengkapan
- k. Pelayanan Administrasi Perkantoran;
- l. Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur;
- m. Peningkatan Pelayanan Kedinasan Kepala Daerah/Wakil Kepala Daerah;

Program Tahun 2021 sampai dengan 2023 yaitu :

- a. Pemerintahan dan Kesejahteraan Rakyat
- b. Perekonomian dan Pembangunan
- c. Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota

Sedangkan Daftar Program, Kegiatan, Indikator Program/Kegiatan dan target Kinerja serta Pendanaan indikatif dapat dilihat dalam Tabel 6.1.

Tabel 6.1  
Rencana Program, Kegiatan, dan Pendanaan Sekretariat Daerah  
Kabupaten Pasuruan

Tujuan	Sasaran	Kode	Program dan Kegiatan, Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Tujuan, Sasaran, Program (outcome) dan Kegiatan (output)	Data Capaian pada Tahun Awal Perencanaan (2018)	Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan												Unit Kerja Perangkat Daerah Penanggungjawab	Lokasi
						Tahun 2019		Tahun 2020		Tahun 2021		Tahun 2022		Tahun 2023		Kondisi Kinerja pada akhir periode Renstra Perangkat Daerah			
						Target Kinerja	Rp	Target Kinerja	Rp	Target Kinerja	Rp	Target Kinerja	Rp	Target Kinerja	Rp	Target Kinerja	Rp		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)	(18)	(19)	
Meningkatnya Kualitas Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah				Nilai SAKIP		79,00 (BB)		80,00 (BB)		81,00 (A)		85,00 (A)		89,00 (A)					
BAGIAN OTDDA																			
1. Meningkatnya Tertib Administrasi penyelenggaraan pemerintahan daerah				Indikator 1.1. Hasil Evaluasi atas LPPD		≥ 3,1000 (sangat tinggi)		≥ 3,1500 (sangat tinggi)		≥ 3,2000 (sangat tinggi)		≥ 3,2500 (sangat tinggi)		≥ 3,2750 (sangat tinggi)					
			Program peningkatan kapasitas sumber daya aparatur	Persentase fasilitas penyelenggaraan pemerintahan daerah		100%	337.600.000	-	-	-	-	-	-	-	-	100%	337.600.000	Bagian Otoda	-
			Kegiatan: Fasilitas pemerintahan daerah	Jumlah laporan koordinasi fasilitas pemerintahan daerah		12 laporan koordinasi	272.600.000	-	-	-	-	-	-	-	-	12 laporan koordinasi	272.600.000	-	-
			Kegiatan: Fasilitas Administrasi, perangkat kecamatan dan kelurahan	Jumlah laporan koordinasi kecamatan dan kelurahan yang di fasilitas		12 laporan koordinasi	25.000.000	-	-	-	-	-	-	-	-	12 laporan koordinasi	25.000.000	-	-
			Kegiatan: Fasilitas penyelenggaraan otonomi daerah	Jumlah kegiatan dengan OPD, FORKOMPIMDA		4 keg	40.000.000	-	-	-	-	-	-	-	-	4 keg	40.000.000	-	-
			Program peningkatan pengembangan capaian kinerja dan keuangan	Jumlah penyusunan LPPD		1 Laporan	155.891.500	-	-	-	-	-	-	-	-	1 Laporan	155.891.500	-	-
			Kegiatan: penyusunan laporan penyelenggaraan pemerintahan daerah	Jumlah dokumen LPPD OPD yang tersedia		65 dokumen	155.891.500	-	-	-	-	-	-	-	-	65 dokumen	155.891.500	-	-

Tujuan	Sasaran	Kode	Program dan Kegiatan, Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Tujuan, Sasaran, Program (outcome) dan Kegiatan (output)	Data Capaian pada Tahun Awal Perencanaan (2018)	Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan												Unit Kerja Perangkat Daerah Penanggungjawab	Lotasi
						Tahun 2019		Tahun 2020		Tahun 2021		Tahun 2022		Tahun 2023		Kondisi Kinerja pada akhir periode Renstra Perangkat Daerah			
						Target Kinerja	Rp	Target Kinerja	Rp	Target Kinerja	Rp	Target Kinerja	Rp	Target Kinerja	Rp	Target Kinerja	Rp		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)	(18)	(19)	
			Program penetapan dan penegasan batas daerah	Persentase penetapan dan penegasan batas daerah		29,2%	508.400.000	-	-	-	-	-	-	-	-	29,2%	508.400.000	-	-
			Kegiatan fasilitasi penetapan dan penegasan batas daerah	Jumlah laporan koordinasi penetapan dan penegasan batas daerah		12 laporan koordinasi	508.400.000	-	-	-	-	-	-	-	-	12 laporan koordinasi	508.400.000	-	-
			Program inventarisasi pembakuan nama rupabumi	Persentase rupabumi yang dibakukan		29,2%	125.000.000	-	-	-	-	-	-	-	-	29,2%	125.000.000	-	-
			Kegiatan fasilitasi pembentukan, penghapusan, perubahan nama daerah dan pembakuan nama rupabumi	Jumlah kecamatan yang sudah dibakukan rupabuminya		2 Kec	125.000.000	-	-	-	-	-	-	-	-	2 Kec	125.000.000	-	-
			<b>PROGRAM OTONOMI DAERAH DAN KEWILAYAHAN</b>	<b>Persentase Hasil evaluasi IKK yang ditindaklanjuti</b>				100%	1.106.891.500	100%	1.174.321.500	100%	1.162.578.200	100%	1.093.084.750	100%	4.536.875.950	Bagian Otda	
			Kegiatan Fasilitasi Penyusunan Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah	Jumlah dokumen LPPD		-	-	70 buku	200.891.500	70 buku	208.891.500	70 buku	206.891.500	70 buku	195.891.500	280 buku	812.566.000		Kab. Pas
			Kegiatan Fasilitasi Pemerintahan Daerah	Jumlah laporan koordinasi fasilitasi pemerintahan daerah		-	-	12 laporan koordinasi	290.600.000	12 laporan	299.030.000	12 laporan koordinasi	297.030.000	12 laporan	286.030.000	48 laporan koordinasi	1.172.690.000		Kab. Pas
			Kegiatan Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan Administrasi Kecamatan dan Kelurahan	Jumlah laporan administrasi Kecamatan dan Kelurahan yang ditindaklanjuti		-	-	12 laporan	100.000.000	12 laporan	108.000.000	12 laporan	106.256.700	12 laporan	92.763.250	48 laporan koordinasi	407.019.950		Kab. Pas
			Kegiatan Fasilitasi Penyelenggaraan Otonomi Daerah	Jumlah koordinasi dengan OPD dan Forkompimda		-	-	4 laporan koordinasi	40.000.000	4 laporan koordinasi	47.000.000	4 laporan koordinasi	45.000.000	4 laporan koordinasi	34.000.000	16 laporan koordinasi	166.000.000		Kab. Pas
				Jumlah Penetapan dan penegasan batas wilayah (Akumulasi s.d Th. N)				9 wilayah		11 Wilayah		13 wilayah		15 wilayah		15 wilayah			

Tujuan	Sasaran	Kode	Program dan Kegiatan, Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Tujuan, Sasaran, Program (outcome) dan Kegiatan (output)	Data Capaian pada Tahun Awal Perencanaan (2018)	Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan											Unit Kerja Perangkat Daerah Penanggung-Jawab	Lokasi	
						Tahun 2019		Tahun 2020		Tahun 2021		Tahun 2022		Tahun 2023		Kondisi Kinerja pada akhir periode Renstra Perangkat Daerah			
						Target Kinerja	Rp	Target Kinerja	Rp	Target Kinerja	Rp	Target Kinerja	Rp	Target Kinerja	Rp	Target Kinerja			Rp
						(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)			(18)
			Kegiatan Fasilitas Penetapan dan Penegasan Batas Wilayah serta Pembakuan Nama Rupabumi	Jumlah koordinasi kegiatan batas wilayah dan pembakuan nama rupa bumi		-	-	12 laporan koordinasi	350.000.000	12 laporan koordinasi	378.000.000	12 laporan koordinasi	376.000.000	12 laporan	364.000.000	48 laporan koordinasi	1.468.000.000		Kab. Pas
			Kegiatan Fasilitas Permasalahan Kewilayahan dan Pertanahan	Jumlah koordinasi permasalahan Kewilayahan dan Pertanahan		-	-	6 laporan koordinasi	125.400.000	6 laporan koordinasi	133.400.000	6 laporan koordinasi	131.400.000	6 laporan	120.400.000	24 laporan koordinasi	510.600.000		Kab. Pas
<b>BAGIAN KESEJAHTERAAN SOSIAL</b>																			
			Program Peningkatan Pembinaan Mental Spiritual	Persentase kegiatan pembinaan mental spiritual dan kegiatan keagamaan lainnya yang dilaksanakan	100%	100%	5.445.000.000	-	-	-	-	-	-	-	-	100%	5.445.000.000	Bagian Kesejahteraan Sosial	Kab. Pasuruan
			Pelaksanaan Kegiatan Keagamaan	Jumlah laporan kegiatan pembinaan mental spiritual dan kegiatan keagamaan lainnya	13 laporan	13 Laporan	3.259.155.000	-	-	-	-	-	-	-	-	13 Laporan	3.259.155.000		
			Penyelenggaraan dan pembinaan MTQ	Jumlah laporan kegiatan penyelenggaraan dan pembinaan MTQ	3 Laporan	3 Laporan	1.606.195.000	-	-	-	-	-	-	-	-	3 Laporan	1.606.195.000		
			Pelayanan Kegiatan ibadah Haji	Jumlah laporan pelayanan kegiatan ibadah Haji	2 Laporan	2 Laporan	579.650.000	-	-	-	-	-	-	-	-	2 Laporan	579.650.000		
			Program Pelayanan Sosial Budaya dan Kesejahteraan Rakyat	Persentase penerima dana hibah / bantuan sosial sesuai dengan peruntukannya	100%	100%	174.542.700	-	-	-	-	-	-	-	-	100%	174.542.700		
			Koordinasi administratif sosial budaya	Jumlah Laporan hasil koordinasi administrasi sosial budaya	N/A	15 Laporan	155.000.000	-	-	-	-	-	-	-	-	15 Laporan	155.000.000		
			Monitoring dan Evaluasi hibah / bantuan sosial	Jumlah laporan hasil monitoring dan evaluasi kepada lembaga penerima hibah / bantuan sosial	12 Bulan	170 Laporan	5.000.000	-	-	-	-	-	-	-	-	170 Laporan	5.000.000		
			Koordinasi Administratif Kesejahteraan Rakyat	Jumlah Laporan hasil koordinasi administrasi kesejahteraan rakyat	N/A	15 Laporan	14.542.700	-	-	-	-	-	-	-	-	15 Laporan	14.542.700		

Tujuan	Sasaran	Kode	Program dan Kegiatan, Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Tujuan, Sasaran, Program (outcome) dan Kegiatan (output)	Data Capaian pada Tahun Awal Perencanaan (2018)	Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan											Unit Kerja Perangkat Daerah Penanggung-jawab	Lokal	
						Tahun 2019		Tahun 2020		Tahun 2021		Tahun 2022		Tahun 2023		Kondisi Kinerja pada akhir periode Renstra Perangkat Daerah			
						Target Kinerja	Rp	Target Kinerja	Rp	Target Kinerja	Rp	Target Kinerja	Rp	Target Kinerja	Rp	Target Kinerja			Rp
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)	(18)	(19)	
			Program Penyelenggaraan Kesejahteraan Sosial	Persentase Kebijakan Lingkup Bidang Kesejahteraan Sosial yang difasilitasi	N/A	-	-	100%	5.469.542.700	100%	5.666.972.700	100%	5.610.302.900	100%	5.450.956.400	100%	22.197.774.700	Bagian Kesejahteraan Sosial	Kab. Pasuruan
			Pelaksanaan Kegiatan Rutin Keagamaan	Jumlah laporan kegiatan rutin keagamaan	N/A	-	-	4 Laporan	317.900.700	4 Laporan	319.000.000	4 Laporan	325.000.000	4 Laporan	309.600.000	16 Laporan	1.265.500.700		
			Pelaksanaan Kegiatan Amaliah Ramadhan	Jumlah laporan kegiatan Amaliah Ramadhan	N/A	-	-	5 Laporan	720.000.000	5 Laporan	725.400.000	5 Laporan	717.002.600	5 Laporan	693.680.000	20 Laporan	2.856.082.600		
			Pelaksanaan Peringatan Hari Besar Islam	Jumlah laporan kegiatan Peringatan Hari Besar Islam	N/A	-	-	6 Laporan	450.000.000	6 Laporan	453.975.000	6 Laporan	447.500.000	6 Laporan	434.240.000	24 Laporan	1.785.115.000		
			Pelaksanaan Kegiatan Pasuruan Bersholawat	Jumlah laporan kegiatan Pasuruan Bersholawat	N/A	-	-	1 Laporan	742.642.000	1 Laporan	753.300.000	1 Laporan	745.000.000	1 Laporan	725.000.000	4 Laporan	2.965.942.000		
			Pelaksanaan Kegiatan Dzikir Akbar	Jumlah laporan kegiatan Dzikir Akbar	N/A	-	-	1 Laporan	315.000.000	1 Laporan	317.337.200	1 Laporan	313.667.000	1 Laporan	303.449.000	4 Laporan	1.249.453.200		
			Pelaksanaan Kegiatan Hari Santri	Jumlah laporan kegiatan Hari Santri	N/A	-	-	1 Laporan	436.500.000	1 Laporan	439.773.000	1 Laporan	434.770.000	1 Laporan	423.000.000	4 Laporan	1.734.043.000		
			Pelaksanaan Kegiatan Khotmil Qur'an oleh Khufad	Jumlah laporan kegiatan Khotmil Qur'an oleh Khufad	N/A	-	-	12 Laporan	1.000.000.000	12 Laporan	795.150.000	12 Laporan	785.972.000	12 Laporan	760.113.474	48 Laporan	3.341.235.474		
			Penyelenggaraan dan pembinaan MTQ	Jumlah laporan kegiatan penyelenggaraan dan pembinaan MTQ	N/A	-	-	3 Laporan	447.500.000	3 Laporan	816.075.000	3 Laporan	805.891.300	3 Laporan	780.780.500	12 Laporan	2.850.246.800		
			Pelayanan Kegiatan Ibadah Haji	Jumlah laporan pelayanan kegiatan Ibadah Haji	N/A	-	-	2 Laporan	859.500.000	2 Laporan	866.062.500	2 Laporan	856.000.000	2 Laporan	828.093.426	8 Laporan	3.409.655.926		

Tujuan	Sasaran	Kode	Program dan Kegiatan, Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Tujuan, Sasaran, Program (outcome) dan Kegiatan (output)	Data Capaian pada Tahun Awal Perencanaan (2018)	Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan												Unit Kerja Perangkat Daerah Penanggung-jawab	Lokasi
						Tahun 2019		Tahun 2020		Tahun 2021		Tahun 2022		Tahun 2023		Kondisi Kinerja pada akhir periode Renstra Perangkat Daerah			
						TARGET KINERJA	Rp	TARGET KINERJA	Rp	TARGET KINERJA	Rp	TARGET KINERJA	Rp	TARGET KINERJA	Rp	TARGET KINERJA	Rp		
						(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)	(18)		
			Koordinasi administratif sosial budaya	Jumlah Laporan hasil koordinasi administrasi sosial budaya	N/A	-	-	15 Laporan	162.000.000	15 Laporan	163.000.000	15 Laporan	160.000.000	15 Laporan	170.000.000	30 Laporan	655.000.000		
			Monitoring dan Evaluasi hibah / bantuan sosial	Jumlah laporan hasil monitoring dan evaluasi kepada lembaga penerima hibah / bantuan sosial	N/A	-	-	180 Laporan	6.000.000	190 Laporan	6.000.000	200 Laporan	7.000.000	210 Laporan	13.000.000	780 Laporan	32.000.000		
			Koordinasi Administratif Kesejahteraan Rakyat	Jumlah Laporan hasil koordinasi administrasi kesejahteraan rakyat	N/A	-	-	15 Laporan	12.500.000	15 Laporan	12.500.000	15 Laporan	12.500.000	15 Laporan	16.000.000	60 Laporan	53.800.000		
<b>BAGIAN HUKUM</b>																			
			Program Penataan Peraturan Perundang-undangan	Outcome : Persentase fasilitasi pembentukan produk hukum dan penyebarluasan informasi hukum	100%	100%	1.907.560.900	100%	1.857.560.900	100%	1.954.990.900	100%	1.935.440.900	100%	1.850.334.100	100%	9.505.887.700	Bagian Hukum	Kab. Pasuruan
			Kegiatan Koordinasi Kerjasama Permasalahan Peraturan Perundang-undangan	Output : Jumlah laporan pendampingan kasus hukum	40 laporan	40 laporan	550.000.000	40 laporan	538.900.000	40 laporan	561.858.000	40 laporan	556.970.000	40 laporan	535.693.800	200 laporan	2.743.421.800		Kab. Pasuruan
			Kegiatan Penyusunan Rencana Kerja Rancangan Peraturan Perundang-undangan	Output : Jumlah draft produk hukum yang diteliti	1000 Produk Hukum	1000 Produk Hukum	36.000.000	-	-	-	-	-	-	-	1000 Produk Hukum	36.000.000		Kab. Pasuruan	
			Kegiatan Legislasi Rancangan Peraturan Perundang-undangan	Output : Jumlah produk hukum yang diterbitkan sesuai kewenangan daerah	1000 Produk Hukum	1000 Produk Hukum	552.524.500	1000 Produk Hukum	577.424.500	1000 Produk Hukum	600.382.000	1000 Produk Hukum	595.495.000	1000 Produk Hukum	574.217.800	5000 Produk Hukum	3.495.538.800		Kab. Pasuruan
			Kegiatan Fasilitasi Sosialisasi Peraturan Perundang-undangan	Output : Jumlah pelaksanaan Sosialisasi, Penyuluhan Hukum, dan Temu Sader Hukum	27 kali	27 kali	491.623.900	27 kali	477.673.900	27 kali	503.481.400	27 kali	498.593.900	27 kali	477.317.200	135 kali	2.448.690.300		Kab. Pasuruan
			Kegiatan Publikasi Peraturan Perundang-undangan	Output : Jumlah Produk Hukum Daerah dan Kegiatan pada Bagian Hukum yang dipublikasikan melalui website JDIH Kabupaten Pasuruan	70 produk	70 produk	277.412.500	70 produk	263.562.500	70 produk	289.269.500	70 produk	284.382.000	70 produk	263.105.300	350 produk	1.377.731.800		Kab. Pasuruan
<b>BAGIAN KERJASAMA &amp; KEPENDUDUKAN</b>																			

Tujuan	Sasaran	Kode	Program dan Kegiatan, Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Tujuan, Sasaran, Program (outcome) dan Kegiatan (output)	Data Capaian pada Tahun Awal Perencanaan (2018)	Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan											Unit Kerja Perangkat Daerah Penanggungjawab	Lokasi	
						Tahun 2019		Tahun 2020		Tahun 2021		Tahun 2022		Tahun 2023		Kondisi Kinerja pada akhir periode Renstra Perangkat Daerah			
						Target Kinerja	Rp	Target Kinerja	Rp	Target Kinerja	Rp	Target Kinerja	Rp	Target Kinerja	Rp	Target Kinerja			Rp
						(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)			(18)
			Program Peningkatan Kerjasama	Prosentase Peningkatan Kerjasama	12	100%	750.306.100	100%	750.306.100	100%	797.736.100	100%	789.758.700	100%	727.796.900	100%	727.796.900	Bagian Kerjasama dan Kependudukan	Kab. Pasuruan
			1. Penyusunan dan Pembahasan Draft Kesepakatan dan Perjanjian Kerjasama	Jumlah Laporan Koordinasi dan Fasilitasi Keerjasama Antar Daerah	24 kali/keg	24	80.000.000	26	80.000.000	28	84.000.000	30	84.250.000	32	70.000.000	32	70.000.000		
			2. Koordinasi dan Penjajakan Kerjasama antar daerah	Jumlah Laporan Koordinasi dan Fasilitasi Kerjasama Antar Daerah	14 kali/keg	14	165.000.000	17	175.000.000	20	183.750.000	23	173.500.000	27	156.000.000	27	156.000.000		
			3. Koordinasi dan Penjajakan Kerjasama Perbatasan Wilayah	Jumlah Laporan Koordinasi dan Fasilitasi Kerjasama Perbatasan Wilayah	40 kali/keg	40	135.000.000	40	143.000.000	42	150.150.000	42	142.000.000	44	156.000.000	44	156.000.000		
			4. Koordinasi, Fasilitasi dan Penjajakan kerjasama dengan Pihak Ketiga	Jumlah Laporan Koordinasi dan Fasilitasi Kerjasama dengan Instansi lainnya	18 kali/keg	18	135.000.000	20	142.000.000	20	149.100.000	22	142.000.000	22	126.000.000	22	126.000.000		
			5. Monitoring dan Evaluasi Kerjasama antar Daerah, Kerjasama Perbatasan Wilayah dan Kerjasama Pihak Ketiga	Jumlah Monev Kerjasama Daerah yang ditandatangani	6 daerah dan 2 pihak ketiga	6 daerah dan 2 pihak ketiga	185.306.100	6 daerah dan 2 pihak ketiga	185.306.100	6 daerah dan 3 pihak ketiga	204.486.100	6 daerah dan 3 pihak ketiga	195.508.700	6 daerah dan 3 pihak ketiga	177.796.900	6 daerah dan 3 pihak ketiga	177.796.900		
			6. Work shop, Sosialisasi, Seminar dan Sarasehan Kerjasama Daerah	Terlaksananya kegiatan work shop, Sosialisasi, Seminar dan Sarasehan	2 kali/keg	2	50.000.000	1	25.000.000	2	26.250.000	2	52.500.000	2	42.000.000	2	42.000.000		
<b>BAGIAN PEREKONOMIAN</b>																			
			<b>PROGRAM FASILITASI PEMBERDAYAAN EKONOMI MASYARAKAT BERBASIS POTENSI DAERAH</b>	% fasilitasi pengelolaan potensi daerah, perekonomian rakyat, dan BUMD	100	100	1.015.000.700											Bagian Perekonomian	
			Kegiatan : Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan Ketersediaan dan Penyaluran Saprodil	Jumlah laporan hasil koordinasi dan monev saprodil	16 laporan	16 laporan	30.500.000												Kab. Pasuruan
			Kegiatan : Koordinasi Pengembangan BUMD	Jumlah laporan hasil fasilitasi dan koordinasi pengembangan BUMD	10 laporan	10 laporan	530.000.000												Kab. Pasuruan

Tujuan	Sasaran	Kode	Program dan Kegiatan, Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Tujuan, Sasaran, Program (outcome) dan Kegiatan (output)	Data Capaian pada Tahun Awal Perencanaan (2018)	Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan												Unit Kerja Perangkat Daerah Penanggung-jawab	Lokasi
						Tahun 2019		Tahun 2020		Tahun 2021		Tahun 2022		Tahun 2023		Kondisi Kinerja pada akhir periode Renstra Perangkat Daerah			
						Target Kinerja	Rp	Target Kinerja	Rp	Target Kinerja	Rp	Target Kinerja	Rp	Target Kinerja	Rp	Target Kinerja	Rp		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)	(18)	(19)	
			Kegiatan Pemberdayaan Lembaga dan Asosiasi KUMKM	Jumlah laporan hasil koordinasi pemberdayaan KUMKM	10 laporan	10 laporan	160.400.000												Kab. Pasuruan
			Kegiatan : Fasilitas Pemasaran melalui Promosi Potensi Daerah	Jumlah laporan hasil koordinasi dan fasilitasi promosi potensi daerah	20 laporan	20 laporan	156.873.200												Kab. Pasuruan
			Kegiatan : Penyusunan Pedoman Pelaksanaan dibidang Sarana Perekonomian	Jumlah Buku Petunjuk Pelaksanaan di Bidang Sarana Perekonomian	20 buku	20 buku	25.102.500												Kab. Pasuruan
			Kegiatan : Koordinasi dan Monev Penggunaan Energi dan SDA	Jumlah laporan hasil koordinasi dan monev penggunaan energi dan SDA	16 laporan	16 laporan	25.125.000												Kab. Pasuruan
			Kegiatan : Koordinasi dan Pengendalian Inflasi Daerah	Jumlah laporan hasil koordinasi pengendalian inflasi daerah	12 laporan	12 laporan	87.000.000												Kab. Pasuruan
			<b>PROGRAM SOSIALISASI KETENTUAN DI BIDANG CUKAI</b>	% fasilitas pemanfaatan DBHCHT	100%	100%	305.600.000												Kab. Pasuruan
			Kegiatan : Pemantauan dan Evaluasi atas Pelaksanaan Ketentuan Peraturan Perundang Undangan di Bidang Cukai	Jumlah Laporan Koordinasi Pemanfaatan DBHCHT	16 laporan	16 laporan	305.000.000												Kab. Pasuruan
			<b>PROGRAM PERUMUSAN KEBUAKAN DAN FASILITASI BIDANG PEREKONOMIAN</b>	1.prosentase kebijakan perekonomian yang ditindaklanjuti		75%		80%	1.064.995.700	85%	1.062.430.700	90%	1.048.756.400	95%	830.400.600	95%	4.006.583.400		
			Kegiatan : Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan Ketersediaan dan Penyaluran Saprodil	Jumlah laporan hasil koordinasi dan monev saprodil				16 laporan	Rp 32.025.000	16 laporan	38.430.000	16 laporan	51.240.000	16 laporan	Rp 39.442.500	80 laporan	161.137.500		Kab. Pasuruan
			Kegiatan : Fasilitas Pengembangan BUMD	Jumlah laporan hasil fasilitasi dan koordinasi pengembangan BUMD				10 laporan	Rp 330.605.000	10 laporan	415.928.150	10 laporan	265.102.600	10 laporan	Rp 223.661.000	50 laporan	1.235.296.750		Kab. Pasuruan

Tujuan	Sasaran	Kode	Program dan Kegiatan, Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Tujuan, Sasaran, Program (outcome) dan Kegiatan (output)	Data Capaian pada Tahun Awal Perencanaan (2018)	Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan												Unit Kerja Perangkat Daerah Penanggungjawab	Lokasi			
						Tahun 2019		Tahun 2020		Tahun 2021		Tahun 2022		Tahun 2023		Kondisi Kinerja pada akhir periode Renstra Perangkat Daerah						
						Target Kinerja	Rp	Target Kinerja	Rp	Target Kinerja	Rp	Target Kinerja	Rp	Target Kinerja	Rp	Target Kinerja	Rp					
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)	(18)	(19)				
			Kegiatan : Fasilitas KUR dan Pengembangan KUMKM/IKM	Jumlah laporan hasil koordinasi fasilitasi KUR dan pengembangan KUMKM				10 laporan	Rp 143.915.700	10 laporan		82.700.000	10 laporan		103.373.550	10 laporan	Rp 81.482.000	10 laporan		411.471.250		Kab. Pasuruan
			Kegiatan : Fasilitas Pemasaran melalui Promosi Potensi Daerah	Jumlah laporan hasil koordinasi dan fasilitasi promosi potensi daerah				20 laporan	Rp 304.360.000	20 laporan		283.773.750	20 laporan		333.449.250	20 laporan	Rp 278.954.500	100 laporan		1.200.537.500		Kab. Pasuruan
			Kegiatan : Fasilitas Penyusunan Pedoman Pelaksanaan dibidang Sarana Perekonomian	Jumlah Laporan Hasil Fasilitasi Penyusunan Pedoman Pelaksanaan di Bidang Sarana Perekonomian				4 laporan	Rp 26.360.000	4 laporan		30.050.400	4 laporan		28.996.000	4 laporan	Rp 23.259.600	16 laporan		108.668.000		Kab. Pasuruan
			Kegiatan : Koordinasi dan Movev Penggunaan Energi dan SDA	Jumlah laporan hasil koordinasi dan movev penggunaan energi dan SDA				16 laporan	Rp 121.380.000	16 laporan		101.928.400	16 laporan		129.570.000	16 laporan	Rp 79.570.000	80 laporan		432.448.400		Kab. Pasuruan
			Kegiatan : Koordinasi dan Pengendalian Inflasi Daerah	Jumlah laporan hasil koordinasi pengendalian inflasi daerah				12 laporan	Rp 106.350.000	12 laporan		109.620.000	12 laporan		137.025.000	12 laporan	Rp 104.031.000	60 laporan		457.026.000		Kab. Pasuruan
			PROGRAM SOSIALISASI KETENTUAN DI BIDANG CUKAI	% peningkatan capaian kinerja pelaksanaan DBHCHT oleh perangkat daerah			75%		80%	255.005.000	85%	305.000.000	90%	305.000.000	95%	450.000.000	95%	1.315.005.000				Kab. Pasuruan
			Kegiatan : Pemantauan dan Evaluasi atas Pelaksanaan Ketentuan Peraturan Perundang Undangan di Bidang Cukai	Jumlah Laporan Koordinasi Pemanfaatan DBHCHT				16 laporan	Rp 255.005.000	16 laporan	Rp	305.000.000	16 laporan		305.000.000	16 laporan	Rp 450.000.000	80 laporan		1.315.005.000		Kab. Pasuruan
<b>BAGIAN PEMBANGUNAN</b>																						
			PROGRAM PENINGKATAN PENGEMBANGAN SISTEM PELAPORAN CAPAIAN KINERJA DAN KEUANGAN	Prosentase Jumlah proyek yang dimonitoring	80%	80%			597.973.800	-	-	-	-	-	-	-	-	80%		597.973.800		Bagian Pembangunan
			Monitoring dan Evaluasi Pelaporan Pelaksanaan Kegiatan Pembangunan	Jumlah Paket Proyek Fisik Yang Dimonitoring	900 Paket	750 Paket			218.211.800	-	-	-	-	-	-	-	-	750 Paket		218.211.800		

Tujuan	Sasaran	Kode	Program dan Kegiatan, Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Tujuan, Sasaran, Program (outcome) dan Kegiatan (output)	Data Capaian pada Tahun Awal Perencanaan (2018)	Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan												Unit Kerja Perangkat Daerah Penanggung-jawab	Lokasi
						Tahun 2019		Tahun 2020		Tahun 2021		Tahun 2022		Tahun 2023		Kondisi Kinerja pada akhir periode Renstra Perangkat Daerah			
						Target Kinerja	Rp	Target Kinerja	Rp	Target Kinerja	Rp	Target Kinerja	Rp	Target Kinerja	Rp	Target Kinerja	Rp		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)	(18)	(19)	
			Penyusunan Pelaporan Pelaksanaan Kegiatan Pembangunan	Jumlah buku pelaporan yang disusun	285 Buku	285 Buku	162.688.000	-	-	-	-	-	-	-	-	285 Buku	162.688.000		
			Sosialisasi Pembangunan Fisik	Jumlah sosialisasi proyek fisik di kecamatan	24 Kecamatan	24 Kecamatan	217.074.000	-	-	-	-	-	-	-	-	24 Kecamatan	217.074.000		
			PROGRAM PENINGKATAN DAN PENGEMBANGAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAERAH	Prosentase DPD yang Realisasi Keuangan dan Kemajuan Fisik Pertribusi Sesuai Rencana	100%	100%	216.394.500	-	-	-	-	-	-	-	-	100%	216.394.500		
			Penyusunan dan Penerapan Buku Pedoman Pelaksanaan APBD dan Buku Panduan Teknis Pelaksanaan Kegiatan	Jumlah Buku Pedoman dan Buku Panduan Teknis Yang Disusun	600 Buku	750 Buku	216.394.500	-	-	-	-	-	-	-	-	750 Buku	216.394.500		
			PROGRAM PENGELOLAAN ADMINISTRASI PEMBANGUNAN					80%	1.064.368.300	80%	1.111.798.300	80%	1.103.180.300	80%	1.039.937.200	80%	4.319.284.100		
				1. Prosentase kebijakan bidang perencanaan pembangunan dan penelitian pengembangan yang ditindaklanjuti				80%		80%		80%		80%		80%			
			Fasilitasi koordinasi perencanaan pembangunan dan litbang	Jumlah laporan koordinasi fasilitasi perencanaan pembangunan dan litbang	-	-	-	10 laporan	50.000.000	10 laporan	52.430.000	10 laporan	52.812.000	10 laporan	50.000.000	10 laporan	205.242.000		
				2. Prosentase kegiatan yang tertib administrasi				80%		80%		80%		80%		80%			
			Penyusunan Standar Satuan Harga	Jumlah Buku Standar Satuan Harga	-	-	-	250 Buku	75.000.000	250 Buku	85.000.000	250 Buku	84.000.000	250 Buku	75.000.000	250 Buku	319.000.000		
			Penyusunan Analisa Standar Belanja	Jumlah Buku Analisa Standar Belanja	-	-	-	250 Buku	125.000.000	250 Buku	135.000.000	250 Buku	134.000.000	250 Buku	115.000.000	250 Buku	509.000.000		

Tujuan	Sasaran	Kode	Program dan Kegiatan, Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Tujuan, Sasaran, Program (outcome) dan Kegiatan (output)	Data Capaian pada Tahun Awal Perencanaan (2018)	Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan												Unit Kerja Perangkat Daerah Penanggung-jawab	Lokasi	
						Tahun 2019		Tahun 2020		Tahun 2021		Tahun 2022		Tahun 2023		Kondisi Kinerja pada akhir periode Renstra Perangkat Daerah				
						Target Kinerja	Rp	Target Kinerja	Rp	Target Kinerja	Rp	Target Kinerja	Rp	Target Kinerja	Rp	Target Kinerja	Rp			
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)	(18)	(19)		
			Monitoring dan Evaluasi Pelaporan Pelaksanaan Kegiatan Pembangunan	Jumlah paket proyek fisik yang dimonitoring	-	-	750 Paket	218.211.800	750 Paket	228.211.800	750 Paket	227.211.800	750 Paket	208.211.800	750 Paket	881.847.200				
			Penyusunan Pelaporan Pelaksanaan Kegiatan Pembangunan	Jumlah buku pelaporan yang disusun	-	-	285 Buku	162.688.000	285 Buku	172.688.000	285 Buku	167.688.000	285 Buku	158.256.900	285 Buku	661.320.900				
			Sosialisasi Pembangunan Fisik	Jumlah sosialisasi proyek fisik di kecamatan	-	-	24 Kecamatan	217.074.000	24 Kecamatan	888.296.000										
			Penyusunan dan Penerapan Buku Pedoman Pelaksanaan APBD dan Buku Panduan Teknis Pelaksanaan Kegiatan	Jumlah Buku Pedoman dan Buku Panduan Teknis Yang Disusun	-	-	750 Buku	216.394.500	750 Buku	221.394.500	750 Buku	220.394.500	750 Buku	216.394.500	750 Buku	874.578.000				
<b>BAGIAN PENGADAAN BARANG/JASA</b>																				
			<b>PROGRAM PELAYANAN PENGADAAN BARANG/ JASA PEMERINTAH</b>	Persentase paket pengadaan barang/ jasa pemerintah yang berhasil ditenderkan	97%	98%	1.265.852.100	99%	1.365.852.100	100%	1.413.282.100	100%	1.400.149.200	100%	1.327.876.500	100%	6.773.012.000	Bagian Pengadaan Barang/ jasa	Kab. Pasuruan	
			1. Kegiatan : Pelelangan Barang/Jasa Pemerintah	Jumlah paket PBJ yang berhasil ditenderkan	200 paket	300 paket	939.029.100										939.029.100			
			1. Kegiatan : Pengelolaan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah	Jumlah paket PBJ yang berhasil ditenderkan	300 paket		300 paket	940.852.100	300 paket	995.000.000	300 paket	965.500.000	300 paket	957.876.500	1700 paket	3.859.228.600				
			2. Kegiatan : Evaluasi Pengadaan Barang/Jasa Desa	Jumlah desa yang dimonitor dan dievaluasi	35 desa	54 desa	66.323.000	68 desa	68.000.000	85 desa	75.000.000	64 desa	80.649.200	35 desa	80.000.000	341 desa	369.872.200			
			3. Kegiatan: Pendampingan Permasalahan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah	Jumlah Pembinaan dan Konsultasi Permasalahan Hukum Bagi Pelaku Pengadaan Barang Dan Jasa Pemerintah	1 kali	1 kali	35.500.000	1 kali	40.000.000	1 kali	45.000.000	1 kali	45.000.000	1 kali	45.000.000	5 kali	210.500.000			
			4. Kegiatan: Pembinaan Pelaku Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah	Jumlah Personil pelaku pengadaan barang/ jasa pemerintah yang berhasil dibina	-	400 orang	85.000.000	200 orang	175.000.000	200 orang	113.282.100	200 orang	124.000.000	200 orang	80.000.000	1200 orang	577.282.100			

Tujuan	Sasaran	Kode	Program dan Kegiatan, Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Tujuan, Sasaran, Program (outcome) dan Kegiatan (output)	Data Capaian pada Tahun Awal Perencanaan (2018)	Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan											Unit Kerja Perangkat Daerah Penanggungjawab	Lokasi	
						Tahun 2019		Tahun 2020		Tahun 2021		Tahun 2022		Tahun 2023		Kondisi Kinerja pada akhir periode Renstra Perangkat Daerah			
						Target Kinerja	Rp	Target Kinerja	Rp	Target Kinerja	Rp	Target Kinerja	Rp	Target Kinerja	Rp	Target Kinerja			Rp
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)	(18)	(19)	
			5. Kegiatan: Penyusunan Buku Petunjuk Teknis Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah	Jumlah Buku Petunjuk Teknis Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah yang berhasil dicetak	100 buku	100 buku	140.000.000	100 buku	42.000.000	100 buku	85.000.000	100 buku	85.000.000	100 buku	65.000.000	500 buku	417.000.000		
			6. Kegiatan: Pengembangan dan Pengelolaan Sistem Layanan Pengadaan Secara Elektronik	Jumlah Kegiatan pengembangan sistem informasi yang dilakukan	2 kali	-	-	2 kali	100.000.000	8 kali	400.000.000								
<b>BAGIAN UMUM</b>																			
			<b>PROGRAM PELAYANAN ADMINISTRASI PERKANTORAN</b>	<b>Persentase pemenuhan pelayanan kantor</b>	<b>100%</b>	<b>100%</b>	<b>7.953.296.400</b>	<b>100%</b>	<b>7.886.296.400</b>	<b>100%</b>	<b>7.976.796.400</b>	<b>100%</b>	<b>7.915.996.100</b>	<b>100%</b>	<b>8.019.828.500</b>	<b>100%</b>	<b>39.751.613.800</b>	Bagian Umum	
			Kegiatan: Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air & Listrik	Jumlah rekening tlp, air minum & listrik yg terbayar		83 rek	1.134.800.000	83 rek	1.134.800.000	83 rek	1.134.800.000	83 rek	1.134.800.000	83 rek	1.134.800.000	415 rek	5.674.000.000		Setda, RT Bupati dan Wabup
			Kegiatan: Penyediaan Jasa Peralatan & Perlengkapan Kantor	Jumlah jasa sewa peralatan dan perlengkapan kantor		20 keg	143.000.000	20 keg	143.000.000	20 keg	143.000.000	20 keg	143.000.000	20 keg	143.000.000	100 keg	715.000.000		Setda, RT Bupati dan Wabup
			Kegiatan: Penyediaan Jasa Kebersihan Kantor	Jumlah pembayaran honor petugas kebersihan yang terbayarkan dan pembelian alat kebersihan		4 jns	875.600.000	4 jns	875.600.000	4 jns	875.600.000	4 jns	875.600.000	4 jns	875.600.000	20 jns	4.378.000.000		Setda, RT Bupati dan Wabup
			Kegiatan: Penyediaan Alat Tulis Kantor	Jumlah pembelian alat tulis kantor		30 jns	25.000.000	30 jns	25.000.000	30 jns	25.000.000	30 jns	25.000.000	30 jns	25.000.000	150 jns	125.000.000		RT Bupati dan Wabup
			Kegiatan: Penyediaan Big Cetak & Penggandaan	Jumlah barang cetakan & penggandaan		6 jns	180.501.000	6 jns	180.501.000	6 jns	180.501.000	6 jns	180.501.000	6 jns	180.501.000	6 jns	902.505.000		Bagian umum, RT Bupati dan Wabup
			Kegiatan: Penyediaan Peralatan & Perlengkapan Kantor	Jumlah pembelian peralatan dan perlengkapan kantor		35 jns	105.000.000	35 jns	105.000.000	35 jns	105.000.000	35 jns	105.000.000	35 jns	105.000.000	35 jns	525.000.000		Bagian umum
			Kegiatan: Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	Jumlah pembelian peralatan rumah tangga		35 jns	184.000.000	35 jns	184.000.000	35 jns	184.000.000	35 jns	184.000.000	35 jns	184.000.000	35 jns	920.000.000		RT Bupati dan Wabup

Tujuan	Sasaran	Kode	Program dan Kegiatan, Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Tujuan, Sasaran, Program (outcome) dan Kegiatan (output)	Data Capaian pada Tahun Awal Perencanaan (2018)	Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan												Unit Kerja Perangkat Daerah Penanggung-jawab	Lotus
						Tahun 2019		Tahun 2020		Tahun 2021		Tahun 2022		Tahun 2023		Kondisi Kinerja pada akhir periode Renstra Perangkat Daerah			
						TARGET KINERJA	Rp	TARGET KINERJA	Rp	TARGET KINERJA	Rp	TARGET KINERJA	Rp	TARGET KINERJA	Rp	TARGET KINERJA	Rp		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)	(18)	(19)	
			Kegiatan : Penyediaan Makanan & Minuman	Jumlah kegiatan rapat dan tamu		150 keg	2.881.795.400	150 keg	2.914.795.400	150 keg	3.005.295.400	150 keg	2.943.895.100	150 keg	3.048.327.500	150 keg	14.794.108.800		Setda, RT Bupati dan Wabup
			Kegiatan : Rapat-Rapat Koordinasi dan Konsultasi Keluar Daerah	Jumlah laporan perjalanan dinas luar Setda		250 laporan	1.000.000.000	250 laporan	1.000.000.000	250 laporan	1.000.000.000	250 laporan	1.000.000.000	250 laporan	1.000.000.000	250 laporan	5.000.000.000		Setda
			Kegiatan : Rapat-Rapat Koordinasi dan Konsultasi Dalam Daerah	Jumlah laporan perjalanan dinas dalam daerah Setda		120 laporan	100.000.000									120 laporan	100.000.000		Bagian Umum
			Kegiatan : Penyediaan Jasa Perkantoran	Jumlah jenis jasa perkantoran yang terbayarkan		12 jenis	1.323.600.000	12 bi	1.323.600.000	60 bi	6.618.000.000		Setda, RT Bupati dan Wabup						
			<b>PROGRAM PENINGKATAN SARANA DAN PRASARANA APARATUR</b>	<b>Persentase pemenuhan sarana dan prasarana kondisi baik</b>		<b>100%</b>	<b>3.790.300.000</b>	<b>100%</b>	<b>3.554.800.000</b>	<b>100%</b>	<b>3.692.253.000</b>	<b>100%</b>	<b>3.745.300.000</b>	<b>100%</b>	<b>3.576.700.000</b>	<b>100%</b>	<b>18.549.355.000</b>		
			Kegiatan : Pengadaan Peralatan Rumah Jabatan/Dinas	Jumlah pengadaan peralatan dan perlengkapan rumah dinas / jabatan		4 jns	555.700.000	4 jns	565.200.000	4 jns	565.200.000	4 jns	555.700.000	4 jns	555.700.000	20 jns	2.797.500.000		Pendopo dan Rumdin Bupati / Wabup
			Kegiatan : Pemeliharaan Rutin / Berkala Rumah Dinas	Jumlah rumdin yang dipelihara		2 unit rumdin	400.600.000	2 unit rumdin	300.600.000	2 unit rumdin	300.600.000	2 unit rumdin	400.600.000	2 unit rumdin	200.000.000	2 unit rumdin	1.602.400.000		Pendopo dan Rumdin Bupati / Wabup
			Pemeliharaan Rutin / Berkala Mobil Jabatan	Jumlah mobil jabatan yang dipelihara		3 kend	270.000.000	3 kend	270.000.000	3 kend	270.000.000	3 kend	270.000.000	3 kend	270.000.000	15 kend	1.350.000.000		Kepala Daerah dan WKD
			Kegiatan : Pemeliharaan Rutin / Berkala Kendaraan Dinas Operasional	Jumlah kendaraan dinas operasional Setda yang dipelihara		51 kend	2.351.000.000	51 kend	2.251.000.000	51 kend	2.380.055.000	51 kend	2.351.000.000	51 kend	2.351.000.000	255 kend	11.684.055.000		Setda, RT Bupati dan Wabup
			Kegiatan : Pemeliharaan Rutin / Berkala Peralatan kantor	Jumlah jenis peralatan kantor yang dipelihara		3 jenis	45.000.000	-	-	-	-	-	-	-	-	3 jenis	45.000.000		

Tujuan	Sasaran	Kode	Program dan Kegiatan, Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Tujuan, Sasaran, Program (outcome) dan Kegiatan (output)	Data Capaian pada Tahun Awal Perencanaan (2018)	Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan												Unit Kerja Perangkat Daerah Penanggung-jawab	Lokasi
						Tahun 2019		Tahun 2020		Tahun 2021		Tahun 2022		Tahun 2023		Kondisi Kinerja pada akhir periode Renstra Perangkat Daerah			
						Target Kinerja	Rp	Target Kinerja	Rp	Target Kinerja	Rp	Target Kinerja	Rp	Target Kinerja	Rp	Target Kinerja	Rp		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)	(18)	(19)	
			Kegiatan : Pemeliharaan Rutin / Berkala Peralatan Rumah Tangga	Jumlah jenis peralatan rumah tangga yang dipelihara		7 jns	168.000.000	10 jns	168.000.000	10 jns	176.400.000	10 jns	168.000.000	10 jns	200.000.000	50 jns	880.400.000		RT Bupati dan Wabup
			PROGRAM PENINGKATAN DISIPLIN APARATUR	Persentase peningkatan kedisiplinan pegawai		100%	190.000.000												
			Kegiatan : Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Perlengkapannya	Jumlah pengadaan pakaian dinas Bupati dan Wakil Bupati		4 stel	60.000.000	-	-	-	-	-	-	-	-	4 stel	60.000.000		KDH dan WKDH
			Kegiatan : Pengadaan Pakaian Kerja Lapangan	Jumlah pengadaan pakaian kerja lapangan		120 orang	70.000.000	-	-	-	-	-	-	-	-	120 orang	70.000.000		KDH dan WKDH
			Kegiatan : Pengadaan Pakaian Khusus Hari-Hari Tertentu	Jumlah pengadaan pakaian olah raga		6 stel	60.000.000	-	-	-	-	-	-	-	-	6 stel	60.000.000		KDH dan WKDH
			PROGAM PENINGKATAN PELAYANAN KEDHNASAN KEPALA DAERAH/ WAKIL KEPALA DAERAH	Persentase tercapainya target kinerja output		100%	1.052.000.000	100%	1.244.500.000	100%	1.263.975.000	100%	1.242.000.000	100%	999.500.000	100%	5.801.975.000		
			Kegiatan : Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Perlengkapannya	Jumlah pengadaan pakaian dinas Bupati dan Wakil Bupati		-	-	4 stel	60.000.000	4 stel	66.150.000	4 stel	60.000.000	4 stel	50.000.000	16 stel	236.150.000		KDH dan WKDH
			Kegiatan : Pengadaan Pakaian Kerja Lapangan	Jumlah pengadaan pakaian kerja lapangan		-	-	120 orang	70.000.000	120 orang	77.175.000	120 orang	70.000.000	120 orang	70.000.000	480 orang	287.175.000		Setda, RT Bupati dan Wabup
			Kegiatan : Pengadaan Pakaian Khusus Hari-Hari Tertentu	Jumlah pengadaan pakaian olah raga		-	-	6 stel	60.000.000	6 stel	66.150.000	6 stel	60.000.000	6 stel	60.000.000	24 stel	246.150.000		KDH dan WKDH
			Kegiatan : Dialog/Audensi dengan Tokoh - tokoh Masyarakat, Pimpinan/Anggota Orsos & Masyarakat	Jumlah kegiatan dialog/audensi		24 acr	50.000.000	24 acr	52.500.000	24 acr	52.500.000	24 acr	50.000.000	24 acr	50.000.000	120 acr	255.000.000		Rt Bupati dan Wabup

Tujuan	Sasaran	Kode	Program dan Kegiatan, Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Tujuan, Sasaran, Program (outcome) dan Kegiatan (output)	Data Capaian pada Tahun Awal Perencanaan (2018)	Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan												Unit Kerja Perangkat Daerah Penanggung-jawab	Lokasi
						Tahun 2019		Tahun 2020		Tahun 2021		Tahun 2022		Tahun 2023		Kondisi Kinerja pada akhir periode Renstra Perangkat Daerah			
						Target Kinerja	Rp	Target Kinerja	Rp	Target Kinerja	Rp	Target Kinerja	Rp	Target Kinerja	Rp	Target Kinerja	Rp		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)	(18)	(19)	
			Kegiatan : Penerimaan Kunjungan Kerja Pejabat Negara / Departemen / Lembaga Pemerintah Non Departemen / Luar	Jumlah kunjungan tamu ke Kabupaten Pasuruan		12 keg	22.000.000	12 keg	22.000.000	12 keg	22.000.000	12 keg	22.000.000	12 keg	20.000.000	60 keg	108.000.000		KDH dan WKDH
			Kegiatan : Kunjungan Kerja / Inspeksi Kepala Daerah Wakil Kepala Daerah	Jumlah laporan perjalanan dinas dalam daerah KDH dan WKDH serta patwal		120 laporan	240.000.000	120 laporan	340.000.000	120 laporan	340.000.000	120 laporan	340.000.000	120 laporan	300.000.000	600 laporan	1.560.000.000		KDH dan WKDH
			Kegiatan : Koordinasi dengan Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah Lainnya	Jumlah laporan perjalanan dinas luar daerah KDH dan WKDH		60 laporan	650.000.000	60 laporan	550.000.000	60 laporan	550.000.000	60 laporan	550.000.000	60 laporan	359.500.000	300 laporan	2.659.500.000		KDH dan WKDH
			Kegiatan : Penyediaan Pelayanan Kesehatan	Jumlah jenis pelayanan kesehatan KDH dan WKDH		2 jenis	90.000.000	2 jenis	90.000.000	2 jenis	90.000.000	2 jenis	90.000.000	2 jenis	90.000.000	10 jenis	450.000.000		KDH dan WKDH
<b>BAGIAN ORGANISASI</b>																			
				Indikator 1.2. Persentase Perangkat Daerah yang berkinerja sangat baik/ nilai SAKIP minimal 88		28 %		33 %		38 %		43 %		48 %					
			<b>PROGRAM PENINGKATAN PENGEMBANGAN SISTEM PELAPORAN CAPAIAN KINERJA DAN KEUANGAN</b>	Persentase LKJIP OPD yang berkualitas	100%	100%	<b>789.547.500</b>		-		-		-		-	100%	<b>789.547.500</b>	Bagian Organisasi	Kab. Pasuruan
			Kegiatan : Koordinasi Penyusunan Laporan Kinerja Sekretariat Daerah	Jumlah Dokumen LKJIP Setda	1 dokumen	1 dokumen	37.650.000		-		-		-		-	1 dokumen	37.650.000		
			Kegiatan : Peningkatan SAKIP Pemerintah Daerah Kabupaten Pasuruan	Jumlah laporan hasil pembinaan SAKIP	4 laporan	4 laporan	687.835.000		-		-		-		-	4 laporan	687.835.000		
			Kegiatan : Pelaksanaan Pembinaan dan Evaluasi Kelompok Budaya Kerja (KBK)	Jumlah Unit Kerja yang mengikuti bimtek KBK	98 unit kerja	98 unit kerja	58.962.500		-		-		-		-	98 unit kerja	58.962.500		

Tujuan	Sasaran	Kode	Program dan Kegiatan, Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Tujuan, Sasaran, Program (outcome) dan Kegiatan (output)	Data Capaian pada Tahun Awal Perencanaan (2018)	Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan												Unit Kerja Perangkat Daerah Penanggungjawab	Lotus
						Tahun 2019		Tahun 2020		Tahun 2021		Tahun 2022		Tahun 2023		Kondisi Kinerja pada akhir periode Renstra Perangkat Daerah			
						Target Kinerja	Rp	Target Kinerja	Rp	Target Kinerja	Rp	Target Kinerja	Rp	Target Kinerja	Rp	Target Kinerja	Rp		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)	(18)	(19)	
			Kegiatan : Pengelolaan Administrasi Kepegawalan di Lingkungan Sekretariat Daerah	Jumlah dokumen kepegawalan setda.	10 dokumen	10 dokumen	5.100.000	-	-	-	-	-	-	-	-	10 dokumen	5.100.000		
			<b>PROGRAM PENGEMBANGAN KELEMBAGAAN DAN APARATUR</b>	<b>Persentase kelembagaan DPD yang tepat fungsi dan tepat ukuran sesuai dengan Perundang-undangan</b>	100%	100%	1.359.293.000	-	-	-	-	-	-	-	-	100%	1.359.293.000		
			Kegiatan : Evaluasi, Penataan dan Penetapan SOTK Kelembagaan OPD	Jumlah perangkat daerah yg dievaluasi Kelembagaannya	100%	56 perangkat daerah	381.810.000	-	-	-	-	-	-	-	-	56 perangkat daerah	381.810.000		
			Kegiatan : Menyusun Analisa Jabatan / Analisa Beban Kerja / Evaluasi Jabatan	Jumlah dokumen klasifikasi jabatan perangkat daerah	100%	56 dokumen (anjab ABK)	977.483.000	-	-	-	-	-	-	-	-	56 dokumen (anjab ABK)	977.483.000		
			<b>PROGRAM PENGEMBANGAN KINERJA PELAYANAN PUBLIK</b>	<b>Persentase OPD yang mempunyai standard pelayanan</b>	90%	90%	782.545.000	-	-	-	-	-	-	-	-	90%	782.545.000	Bagian Organisasi	Kab. Pasuruan
			Kegiatan : Optimalisasi Kinerja Lembaga Pelayanan Publik	Jumlah unit kerja yang dibina pelayanan publik	124 unit kerja	124 unit kerja	553.670.000	-	-	-	-	-	-	-	-	124 unit kerja	553.670.000		
			Kegiatan : Optimalisasi Pelaksanaan Reformasi Birokrasi	Jumlah laporan / dokumen hasil koordinasi	6 laporan	6 laporan	134.150.000	-	-	-	-	-	-	-	-	6 laporan	134.150.000		
			Kegiatan : Optimalisasi Pelaksanaan Ketatalaksanaan Pemerintah Daerah	Jumlah unit kerja yang dibina ketatalaksanaan pemerintahan	65 unit kerja	65 unit kerja	94.725.000	-	-	-	-	-	-	-	-	65 unit kerja	94.725.000		
				Indikator 1.2. Persentase Perangkat Daerah yang berkinerja sangat baik/ nilai SAKIP minimal BB		28 %		33 %		38 %		43 %		48 %					

Tujuan	Seseran	Kode	Program dan Kegiatan, Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Tujuan, Sasaran, Program (outcome) dan Kegiatan (output)	Data Capaian pada Tahun Awal Perencanaan (2018)	Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan												Unit Kerja Perangkat Daerah Penanggung Jawab	Lokasi
						Tahun 2019		Tahun 2020		Tahun 2021		Tahun 2022		Tahun 2023		Kondisi Kinerja pada akhir periode Renstra Perangkat Daerah			
						Target Kinerja	Rp	Target Kinerja	Rp	Target Kinerja	Rp	Target Kinerja	Rp	Target Kinerja	Rp	Target Kinerja	Rp		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)	(18)	(19)	(20)
				Indikator 1.3. Persentase OPD yang ber IKM minimal Baik		100%		100%		100%		100%		100%		100%			
			Program Optimalisasi Fasilitas Reformasi Birokrasi	1. Persentase pelaporan kinerja perangkat daerah tepat waktu	100%		95%	2.931.385.500	97%	2.978.815.500	98%	2.949.027.300	100%	2.843.443.900	100%	11.702.672.200	Bagian Organisasi	Kab. Pasuruan	
			Koordinasi Pelaksanaan SAKIP Pemerintah Daerah dan Perangkat Daerah	Jumlah laporan hasil pembinaan SAKIP	4 laporan	-	5 laporan	719.687.500	5 laporan	735.497.500	5 laporan	725.568.100	5 laporan	690.373.500	20 laporan	2.871.126.600			
			Pembinaan dan Evaluasi Kelompok Budaya Kinerja (KBK)	Jumlah Unit Kerja yang mengikuti bimtek KBK	98 unit kerja	-	98 unit kerja	62.220.000	392 unit kerja	248.880.000									
			Pengelolaan Administrasi Kepegawaian di lingkungan Setda.	Jumlah dokumen kepegawaian setda.	10 dokumen	-	10 dokumen	7.640.000	40 dokumen	30.560.000									
				2. Presentase Perangkat Daerah yang tepat fungsi dan tepat ukuran	95%	95%	100%		100%		100%		100%		100%				
			Evaluasi Penataan dan Penetapan SOTK Kelembagaan OPD	Jumlah perangkat daerah yg dievaluasi Kelembagaannya	100%	-	56 perangkat daerah	340.115.000	56 perangkat daerah	360.300.000	33 perangkat daerah	358.373.600	33 perangkat daerah	346.779.200	187 perangkat daerah	1.405.567.800			
			Penyusunan Analisa Jabatan/ Analisa Beban Kerja/SK/ Evjab	Jumlah dokumen klasifikasi jabatan perangkat daerah	100%	-	56 dokumen	1.019.178.000	33 dokumen	1.014.803.000	33 dokumen	1.006.800.000	33 dokumen	983.200.000	155 dokumen	4.023.981.000			
				3. presentase Perangkat Daerah yang mempunyai standart pelayanan			92%		94%		96%		98%		98%				
			Pembinaan Kinerja Lembaga Pelayanan Publik	Jumlah unit kerja yang dibina pelayanan publik	124 unit kerja	-	124 unit kerja	609.520.000	124 unit kerja	615.555.000	124 unit kerja	538.550.600	124 unit kerja	577.731.200	496 unit kerja	2.341.356.800			

Tujuan	Sasaran	Kode	Program dan Kegiatan, Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Tujuan, Sasaran, Program (outcome) dan Kegiatan (output)	Data Capaian pada Tahun Awal Perencanaan (2018)	Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan												Unit Kerja Perangkat Daerah Penanggungjawab	Lokasi
						Tahun 2019		Tahun 2020		Tahun 2021		Tahun 2022		Tahun 2023		Kondisi Kinerja pada akhir periode Renstra Perangkat Daerah			
						Target Kinerja	Rp	Target Kinerja	Rp	Target Kinerja	Rp	Target Kinerja	Rp	Target Kinerja	Rp	Target Kinerja	Rp		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)	(18)	(19)	
			Koordinasi Pelaksanaan Reformasi Birokrasi	Jumlah laporan / dokumen hasil koordinasi	6 laporan	-	-	6 laporan	115.700.000	6 laporan	133.000.000	6 laporan	177.200.000	6 laporan	132.200.000	24 laporan	558.100.000		
			Pembinaan Ketatalaksanaan Unit Kerja	Jumlah unit kerja yang dibina ketatalaksanaan pemerintahan	65 unit kerja	-	-	65 unit kerja	57.325.000	65 unit kerja	49.800.000	65 unit kerja	72.675.000	65 unit kerja	43.300.000	260 unit kerja	223.100.000		
BAGIAN ADMINISTRASI KEUANGAN DAN PERLENGKAPAN																			
	2. Meningkatkan kualitas pelayanan kepada pimpinan & sekretariat daerah			2.1. Persentase ketersediaan kebutuhan pimpinan dan sekretariat daerah															
				Outcome: Presentase penurunan jumlah temuan BPK	100%	100%	-	-	-	-	-	-	-	-	-	100%	-	Bag. Adm. Keuleng	Kab. Pasuruan
				Output : Jumlah Surat Pertanggungjawaban (SPJ) yang terverifikasi dan akuntabel		100%	-	-	-	-	-	-	-	-	-	100%	-		Kab. Pasuruan
				Output : Presentase Jumlah realisasi anggaran		90%	-	-	-	-	-	-	-	-	-	90%	-		Kab. Pasuruan
				Output : Jumlah laporan keuangan masing-masing Bagian yang tersusun tepat waktu		laporan	-	-	-	-	-	-	-	-	-	laporan	-		Kab. Pasuruan
			Program: peningkatan sarana dan prasarana aparatur	outcome: prosentase pemenuhan kebutuhan sarana & prasarana	90%	91%	1.547.355.000	-	-	-	-	-	-	-	-	91%	1.547.355.000		Kab. Pasuruan
			Kegiatan: Pengadaan Kendaraan Dinas/Operasional	Output: Jumlah pengadaan kendaraan		32 Unit	637.115.000	-	-	-	-	-	-	-	-	32 Unit	637.115.000		Kab. Pasuruan
			Kegiatan: Pengadaan mebelair	Output: Jumlah pengadaan mebelair		232 unit	83.240.000	-	-	-	-	-	-	-	-	232 unit	83.240.000		Kab. Pasuruan

Tujuan	Sasaran	Kode	Program dan Kegiatan, Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Tujuan, Sasaran, Program (outcome) dan Kegiatan (output)	Data Capaian pada Tahun Awal Perencanaan (2018)	Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan											Unit Kerja Perangkat Daerah Penanggung-jawab	Lotasi	
						Tahun 2019		Tahun 2020		Tahun 2021		Tahun 2022		Tahun 2023		Kondisi Kinerja pada akhir periode Renstra Perangkat Daerah			
						Target Kinerja	Rp	Target Kinerja	Rp	Target Kinerja	Rp	Target Kinerja	Rp	Target Kinerja	Rp	Target Kinerja			Rp
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)	(18)	(19)	
			Kegiatan: Pengadaan peralatan kantor	Output: Jumlah pengadaan peralatan kantor		90 Unit	402.600.000	-	-	-	-	-	-	-	-	90 Unit	402.600.000		Kab. Pasuruan
			Kegiatan: Pengadaan perlengkapan gedung kantor	Output: Jumlah perlengkapan gedung kantor yang disediakan		120 Unit	424.400.000	-	-	-	-	-	-	-	-	120 Unit	424.400.000		Kab. Pasuruan
			Program: peningkatan sarana dan prasarana aparatur	Outcome : Persentase jumlah peralatan dan perlengkapan yang berfungsi dengan baik terhadap kebutuhan	80%	80%	890.800.000	-	-	-	-	-	-	-	-	80%	890.800.000		Kab. Pasuruan
			Kegiatan: Pemeliharaan rutin/ berkala gedung kantor	Output: Jumlah pemeliharaan gedung kantor		4 unit kali	335.500.000	-	-	-	-	-	-	-	-	4 unit kali	335.500.000		Kab. Pasuruan
			Kegiatan: Pemeliharaan rutin/ berkala Kendaraan Dinas/Operasional	Output: Jumlah pemeliharaan kendaraan		219 unit kali	185.300.000	-	-	-	-	-	-	-	-	219 unit kali	185.300.000		Kab. Pasuruan
			Kegiatan: Pemeliharaan rutin/berkala perlengkapan gedung kantor	Output: Jumlah pemeliharaan perlengkapan gedung kantor		100 unit kali	190.000.000	-	-	-	-	-	-	-	-	100 unit kali	190.000.000		Kab. Pasuruan
			Kegiatan: Pemeliharaan rutin/ berkala mebelair	Output: Jumlah pemeliharaan mebelair		50 unit kali	80.000.000	-	-	-	-	-	-	-	-	50 unit kali	80.000.000		Kab. Pasuruan
			Kegiatan: Pemeliharaan rutin/ berkala peralatan kantor	Output: Jumlah pemeliharaan peralatan kantor		200 unit kali	100.000.000	-	-	-	-	-	-	-	-	200 unit kali	100.000.000		Kab. Pasuruan
			Program: Pelayanan Administrasi Perkantoran	Outcome: Persentase jumlah laporan/dokumen yang disusun tepat waktu	100%	100%	2.304.845.000	-	-	-	-	-	-	-	-	100%	2.304.845.000		Kab. Pasuruan
			Kegiatan : penyediaan Jasa Administrasi Keuangan	Output : Jumlah pembayaran honor tenaga pengelola keuangan		1092 Or	440.244.000	-	-	-	-	-	-	-	-	1092 Or	440.244.000		Kab. Pasuruan
			Kegiatan: penyediaan alat tulis kantor	Output: Jumlah pembelian ATK		37 Jenis	137.334.500	-	-	-	-	-	-	-	-	37 Jenis	137.334.500		Kab. Pasuruan
			Kegiatan: Penyediaan barang cetakan dan penggandaan	Output: Jumlah barang cetakan dan foto copy		28 Jenis	1.059.085.000	-	-	-	-	-	-	-	-	28 Jenis	1.059.085.000		Kab. Pasuruan

Tujuan	Sasaran	Kode	Program dan Kegiatan, Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Tujuan, Sasaran, Program (outcome) dan Kegiatan (output)	Data Capaian pada Tahun Awal Perencanaan (2018)	Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan												Unit Kerja Perangkat Daerah Penanggung-jawab	Lokasi
						Tahun 2019		Tahun 2020		Tahun 2021		Tahun 2022		Tahun 2023		Kondisi Kinerja pada akhir periode Renstra Perangkat Daerah			
						Target Kinerja	Rp	Target Kinerja	Rp	Target Kinerja	Rp	Target Kinerja	Rp	Target Kinerja	Rp	Target Kinerja	Rp		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)	(18)	(19)	
			Kegiatan: Penyediaan makanan dan minuman	Output: Jumlah kegiatan rapat dan tamu		24 kali	23.971.500	-	-	-	-	-	-	-	-	-	24 kali	23.971.500	Kab. Pasuruan
			Kegiatan: Rapat-rapat Koordinasi dan Konsultasi Ke Luar Daerah	Output: Jumlah laporan koordinasi dan konsultasi		25 Kali	75.550.000	-	-	-	-	-	-	-	-	-	25 Kali	75.550.000	Kab. Pasuruan
			Kegiatan: Penyediaan Jasa Perkantoran	Output: Jumlah pembayaran honor THL		20 OB	568.660.000	-	-	-	-	-	-	-	-	-	20 OB	568.660.000	Kab. Pasuruan
			Program: Pelayanan Administrasi Keuangan dan Perlengkapan	Outcome: Presentase jumlah realisasi anggaran		-	-	86%	-	87%	-	88%	-	89%	-	89%	-	-	Kab. Pasuruan
				outcome: Presentase fasilitas perlengkapan yang terpenuhi terhadap Rencana Kebutuhan Barang/Jasa		-	-	91%	6.599.252.000	92%	4.790.430.000	93%	4.743.000.000	94%	4.800.710.000	94%	20.733.392.000	Bag. Adm. Keuangan & Perlengkapan	Kab. Pasuruan
			Kegiatan: Koordinasi dan Fasilitas Perencanaan Kerja Setda	Output: Jumlah Dokumen		-	-	2 Dokumen	140.000.000	2 Dokumen	86.516.000	2 Dokumen	75.000.000	2 Dokumen	55.000.000	8 Dokumen	356.516.000	Kab. Pasuruan	
			Kegiatan: Koordinasi dan Fasilitas Keuangan	Output: Jumlah pembayaran honor Pengelola Keuangan dan PTT		-	-	1112 OB	1.010.194.000	4448 OB	4.040.776.000	Kab. Pasuruan							
				Output: Jumlah kegiatan koordinasi dan konsultasi keuangan		-	-	49 kali	-	49 kali	-	49 kali	-	49 kali	-	-	-	Kab. Pasuruan	
			Kegiatan: Pengadaan Perlengkapan Kantor	Output: Jumlah pembelian ATK, barang cetakan dan fotocopy		-	-	65 Jenis	1.439.133.000	65 Jenis	890.000.000	65 Jenis	883.100.000	65 Jenis	783.100.000	260 Jenis	3.995.333.000	Kab. Pasuruan	
			Kegiatan: Pengadaan Kendaraan Dinas/Operasional	Output: Jumlah kendaraan		-	-	7 unit	1.552.835.000	2 Unit	750.000.000	2 Unit	750.000.000	2 Unit	750.000.000	8 Unit	3.802.835.000	Kab. Pasuruan	
			Kegiatan: Pengadaan mebelair	Output: Jumlah mebelair		-	-	232 unit	185.750.000	232 unit	121.000.000	232 unit	117.356.000	232 unit	95.066.000	928 Unit	519.172.000	Kab. Pasuruan	
			Kegiatan: Pengadaan peralatan kantor	Output: Jumlah peralatan kantor		-	-	90 Unit	864.720.000	90 Unit	655.000.000	90 Unit	633.000.000	90 Unit	633.000.000	360 Unit	2.785.720.000	Kab. Pasuruan	

Tujuan	Sasaran	Kode	Program dan Kegiatan, Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Tujuan, Sasaran, Program (outcome) dan Kegiatan (output)	Data Capaian pada Tahun Awal Perencanaan (2018)	Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan												Unit Kerja Perangkat Daerah Penanggungjawab	Lokasi
						Tahun 2019		Tahun 2020		Tahun 2021		Tahun 2022		Tahun 2023		Kondisi Kinerja pada akhir periode Renstra Perangkat Daerah			
						Target Kinerja	Rp	Target Kinerja	Rp	Target Kinerja	Rp	Target Kinerja	Rp	Target Kinerja	Rp	Target Kinerja	Rp		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)	(18)	(19)	
			Kegiatan: Pengadaan perlengkapan gedung kantor	Output: Jumlah perlengkapan gedung kantor yang disediakan		-	-	120 Unit	465.900.000	120 Unit	337.000.000	120 Unit	333.630.000	120 Unit	333.630.000	480 Unit	1.470.160.000		Kab. Pasuruan
			Kegiatan: Pemeliharaan rutin/ berkala sarana dan prasarana	Output: Jumlah pemeliharaan gedung kantor		-	-	4 unit kali	940.720.000	4 unit kali	940.720.000	4 unit kali	940.720.000	4 unit kali	940.720.000	16 Unit Kali	3.762.880.000		Kab. Pasuruan
				Output: Jumlah pemeliharaan perlengkapan gedung kantor		-	-	100 unit		100 unit kali		100 unit kali		100 unit kali		400 Unit			Kab. Pasuruan
				Output: Jumlah pemeliharaan mebelair		-	-	50 unit kali		50 unit kali		50 unit kali		50 unit kali		200 Unit Kali			Kab. Pasuruan
				Output: Jumlah pemeliharaan peralatan kantor dan kendaraan kantor		-	-	219 unit kali		219 unit kali		219 unit kali		219 unit kali		876 unit kali			Kab. Pasuruan
<b>SESUAI KEMENDAGRI NOMOR 050-3708 TAHUN 2020</b>																			
Meningkatnya Kualitas Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah				Indikator Tujuan : Nilai SAKIP						81,00 (A)		87,00 (A)		89,00 (A)		89 (A)			
	Sasaran Setda: 1. Meningkatnya Kualitas kebijakan bidang pemerintahan, Hukum dan Kesejahteraan rakyat			1. Indikator sasaran : Hasil Evaluasi atas LPPD						≥ 3,2000 (sangat tinggi)		≥ 3,2500 (sangat tinggi)		≥ 3,2750 (sangat tinggi)					
			PROGRAM PEMERINTAHAN DAN KESEJAHTERAAN RAKYAT							100%	Rp 25.758.853.845	100%	Rp 17.752.207.798	100%	Rp 18.817.351.815	100%	Rp 62.328.413.458		

Tujuan	Sasaran	Kode	Program dan Kegiatan, Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Tujuan, Sasaran, Program (outcome) dan Kegiatan (output)	Data Capaian pada Tahun Awal Perencanaan (2018)	Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan												Unit Kerja Perangkat Daerah Penanggungjawab	Lokasi
						Tahun 2019		Tahun 2020		Tahun 2021		Tahun 2022		Tahun 2023		Kondisi Kinerja pada akhir periode Renstra Perangkat Daerah			
						Target Kinerja	Rp	Target Kinerja	Rp	Target Kinerja	Rp	Target Kinerja	Rp	Target Kinerja	Rp	Target Kinerja	Rp		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)	(18)	(19)	
				Indikator Program : Persentase kesesuaian indikator kinerja kunci yang dilaksanakan terhadap penyelenggaraan pemerintahan daerah															
			Kegiatan Administrasi Tata Pemerintahan	Indikator Kegiatan : Persentase penyusunan LPPD dan LKPI tepat waktu						100%	Rp 756.720.535	100%	Rp 1.051.407.000	100%	Rp 1.114.491.632	100%	Rp 2.922.619.167		
			Sub Kegiatan Penataan Administrasi Pemerintahan	Jumlah Dokumen Hasil Penataan Administrasi Pemerintahan						1 laporan	Rp 334.373.355	1 laporan	Rp 681.716.800	1 laporan	Rp 722.620.020	3 laporan	Rp 1.738.710.175		
				Indikator Kegiatan : Persentase hasil evaluasi penyelenggaraan pemerintahan daerah yang ditindaklanjuti						100%		100%		100%		100%			
			Sub Kegiatan Fasilitasi Pelaksanaan Otonomi Daerah	Jumlah laporan penyelenggaraan Otonomi Daerah yang sesuai dengan kebijakan daerah yang ditetapkan						12 laporan	Rp 112.343.670	12 laporan	Rp 104.290.000	12 laporan	Rp 110.547.400	36 laporan	Rp 327.181.070		
				Jumlah koordinasi dengan OPD dan Forkoplmda						12 laporan		12 laporan		12 laporan		36 laporan			
				Indikator Kegiatan : Persentase administrasi kewilayahan yang terlaksana						100%		100%		100%		100%			
			Sub Kegiatan Pengelolaan Administrasi Kewilayahan	Jumlah jenis laporan koordinasi kewilayahan yang difasilitasi						3 jenis	Rp 310.003.510	3 jenis	Rp 265.400.200	3 jenis	Rp 281.324.212	9 jenis	Rp 856.727.922		
				Jumlah fasilitasi pemasangan patok batas w/ayah						0		1 kecamatan		1 kecamatan		2 kecamatan			
				Jumlah pembakuan nama rupa bumi						0		1 kecamatan		1 kecamatan		2 kecamatan			
				Jumlah laporan PATEN yang difasilitasi						12 laporan		12 laporan		12 laporan		36 laporan			
				Indikator Program : Persentase kebijakan terkait fasilitasi kerjasama yang ditindaklanjuti															

Tujuan	Sasaran	Kode	Program dan Kegiatan, Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Tujuan, Sasaran, Program (outcome) dan Kegiatan (output)	Data Capaian pada Tahun Awal Perencanaan (2018)	Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan												Unit Kerja Perangkat Daerah Penanggungjawab	Lokasi
						Tahun 2019		Tahun 2020		Tahun 2021		Tahun 2022		Tahun 2023		Kondisi Kinerja pada akhir periode Renstra Perangkat Daerah			
						Target Kinerja	Rp	Target Kinerja	Rp	Target Kinerja	Rp	Target Kinerja	Rp	Target Kinerja	Rp	Target Kinerja	Rp		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)	(18)	(19)	
			Kegiatan Fasilitas Kerjasama Daerah	Indikator Kegiatan : Persentase fasilitas kerjasama yang ditindaklanjuti						100%	Rp 218.271.600	100%	Rp 185.991.400	100%	Rp 197.160.037	100%	Rp 601.423.037		
			Sub Kegiatan Fasilitas Kerja Sama Dalam Negeri	Jumlah dokumen kerjasama dalam negeri yang difasilitasi						3 dokumen	Rp 136.849.600	3 dokumen	Rp 155.523.400	3 dokumen	Rp 136.886.280	9 dokumen	Rp 429.259.280		
			Sub Kegiatan Fasilitas Kerja Sama Luar Negeri	Jumlah dokumen kerjasama kerjasama luar negeri						1 dokumen	Rp 12.950.000	1 dokumen	Rp 9.260.000	1 dokumen	Rp 13.063.511	3 dokumen	Rp 35.293.511		
			Sub Kegiatan Evaluasi Pelaksanaan Kerja Sama	Jumlah laporan evaluasi kerjasama						4 Laporan	Rp 68.472.000	4 Laporan	Rp 21.208.000	4 Laporan	Rp 47.190.246	12 Laporan	Rp 136.870.246		
				1.2 Indikator Sasaran Persentase Kebijakan Bidang Kesejahteraan rakyat yang dilaksanakan															
			PROGRAM PEMERINTAHAN DAN KESEJAHTERAAN RAKYAT																
				Indikator Program : Persentase Layanan Kesejahteraan Rakyat yang difasilitasi						100%		100%		100%		100%			
			Kegiatan Evaluasi Pelaksanaan Kebijakan Kesejahteraan Rakyat	Indikator Kegiatan : Persentase pelaksanaan Pembinaan Mental Spiritual						100%	Rp 29.468.862.650	100%	Rp 15.317.095.568	100%	Rp 16.236.122.926	100%	Rp 55.017.081.144		
			Sub Kegiatan Fasilitas Pengelolaan Bina Mental Spiritual	Jumlah fasilitasi kegiatan Keagamaan yang dilaksanakan						5 fasilitasi	Rp 3.299.868.010	5 fasilitasi	Rp 2.987.395.568	5 fasilitasi	Rp 3.166.640.926	15 fasilitasi	Rp 9.453.904.504		
				Jumlah Laporan pelaksanaan kegiatan yang disusun						5 laporan		5 laporan		5 laporan		15 laporan			
				Indikator Kegiatan : Persentase Evaluasi Kebijakan Kesejahteraan Sosial yang dilaksanakan						100%		100%		100%		100%			

Tujuan	Sasaran	Kode	Program dan Kegiatan, Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Tujuan, Sasaran, Program (outcome) dan Kegiatan (output)	Data Capaian pada Tahun Awal Perencanaan (2018)	Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan												Unit Kerja Perangkat Daerah Penanggung-Jawab	Lotus	
						Tahun 2019		Tahun 2020		Tahun 2021		Tahun 2022		Tahun 2023		Kondisi Kinerja pada akhir periode Renstra Perangkat Daerah				
						Target Kinerja	Rp	Target Kinerja	Rp	Target Kinerja	Rp	Target Kinerja	Rp	Target Kinerja	Rp	Target Kinerja	Rp			
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)	(18)	(19)		
			Sub Kegiatan Pelaksanaan Kebijakan, Evaluasi, dan Capaian Kinerja terkait Kesejahteraan Sosial	Jumlah Penerima Bantuan Lembaga Badan dan Lembaga Nirlaba, Sukarela Bersifat Sosial Kemasyarakatan						400 penerima	Rp 20.132.182.640	400 penerima	Rp 12.240.000.000	400 penerima	Rp 12.974.400.000	1200 penerima	Rp 45.346.582.640			
				Jumlah pelaksanaan sosialisasi terkait hibah						20 kali		10 kali		10 kali		40 kali				
				Jumlah pelaksanaan monitoring dan evaluasi terkait hibah						10 kali		10 kali		10 kali		30 kali				
				Jumlah laporan pelaksanaan hibah yang disusun						1 Laporan		1 Laporan		1 Laporan		3 Laporan				
				Indikator Kegiatan : Persentase Evaluasi Kebijakan Kesejahteraan masyarakat yang dilaksanakan						100%		100%		100%		100%				
			Sub Kegiatan Pelaksanaan Kebijakan, Evaluasi, dan Capaian Kinerja terkait Kesejahteraan Masyarakat	Jumlah fasilitasi dan Koordinasi terkait Kesejahteraan Masyarakat						15 kali	Rp 31.812.000	15 kali	Rp 89.700.000	15 kali	Rp 95.082.000	45 kali	Rp 216.594.000			
				1.3 Indikator Sasaran. Persentase kebijakan bidang hukum yang terlaksana sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku						100%		100%		100%		100%				
			PROGRAM PEMERINTAHAN DAN KESEJAHTERAAN RAKYAT	Indikator program : Persentase produk kebijakan daerah yang diterbitkan sesuai dengan kebutuhan						96%		98%		99%		99%				
			Kegiatan Fasilitasi dan Koordinasi Hukum	Indikator Kegiatan : Persentase Ketersediaan Produk Hukum Daerah sesuai kewenangan daerah						100%	Rp 1.319.999.060	100%	Rp 1.197.713.830	100%	Rp 1.269.577.220	100%	Rp 3.787.290.110			
			Sub Kegiatan Fasilitasi Penyusunan Produk Hukum Daerah	Jumlah bahan/produk hukum yang dianalisa dan dikaji						375 produk hukum	Rp 425.011.200	375 produk hukum	Rp 399.368.250	375 produk hukum	Rp 423.330.482	1125 produk hukum	Rp 1.247.709.932			

Tujuan	Sasaran	Kode	Program dan Kegiatan, Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Tujuan, Sasaran, Program (outcome) dan Kegiatan (output)	Data Capaian pada Tahun Awal Perencanaan (2018)	Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan												Unit Kerja Perangkat Daerah Penanggung-jawab	Lokasi
						Tahun 2019		Tahun 2020		Tahun 2021		Tahun 2022		Tahun 2023		Kondisi Kinerja pada akhir periode Renstra Perangkat Daerah			
						Target Kinerja	Rp	Target Kinerja	Rp	Target Kinerja	Rp	Target Kinerja	Rp	Target Kinerja	Rp	Target Kinerja	Rp		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)	(18)	(19)	
				Jumlah produk hukum yang diterbitkan dan diundangkan						375 produk hukum		375 produk hukum		375 produk hukum		1125 produk hukum			
				Jumlah laporan evaluasi pelaksanaan produk hukum						1 Laporan		1 Laporan		1 Laporan		3 Laporan			
				Jumlah Data dan Informasi yang tersedia sebagai bahan kebijakan daerah						70 bahan		70 bahan		70 bahan		210 bahan			
				<b>Indikator Kegiatan : Persentase Terlaksananya Bantuan Hukum dan Pendampingan Kasus Hukum di Kabupaten Pasuruan</b>						100%		100%		100%		100%			
			Sub Kegiatan Fasilitas Bantuan Hukum	Jumlah fasilitas bantuan hukum dan konsultasi hukum bagi masyarakat miskin						8 kasus	Rp 421.837.660	8 kasus	Rp 377.194.530	8 kasus	Rp 399.826.530	24 kasus	Rp 1.198.858.720		
				Jumlah fasilitas pendampingan perkara hukum						2 kasus		2 kasus		2 kasus		6 kasus			
				Jumlah laporan evaluasi pendampingan kasus hukum						4 Laporan		4 Laporan		4 Laporan		12 laporan			
				<b>Indikator Kegiatan : Persentase pelaksanaan penyuluhan di bidang hukum dan publikasi produk hukum daerah</b>						100%		100%		100%		100%			
			Sub Kegiatan Pendokumentasian Produk Hukum dan Pengelolaan Informasi Hukum	Jumlah produk hukum yang dihimpun						375 produk hukum	Rp 473.150.200	375 produk hukum	Rp 421.151.050	375 produk hukum	Rp 446.420.208	1125 produk hukum	Rp 1.340.721.458		
				Jumlah dokumentasi dan informasi hukum yang di upload di website jdih.kabupatenpasuruan						20 produk hukum		20 produk hukum		20 produk hukum		60 produk hukum			
				Jumlah jenis pelayanan informasi produk hukum yang disediakan						4 jenis		4 jenis		4 jenis		4 jenis			
				Jumlah pelaksanaan sosialisasi, penyuluhan hukum dan diseminasi hukum						7 kali		7 kali		7 kali		21 kali			

Tujuan	Sasaran	Kode	Program dan Kegiatan, Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Tujuan, Sasaran, Program (outcome) dan Kegiatan [output]	Data Capaian pada Tahun Awal Perencanaan (2018)	Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan												Unit Kerja Perangkat Daerah Penanggung-jawab	Lokasi
						Tahun 2019		Tahun 2020		Tahun 2021		Tahun 2022		Tahun 2023		Kondisi Kinerja pada akhir periode Renstra Perangkat Daerah			
						Target Kinerja	Rp	Target Kinerja	Rp	Target Kinerja	Rp	Target Kinerja	Rp	Target Kinerja	Rp	Target Kinerja	Rp		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)	(18)	(18)	(19)
				Jumlah laporan/evaluasi terkait dokumentasi dan informasi produk hukum daerah yang disusun						2 laporan		2 laporan		2 laporan		6 laporan			
	2. Meningkatnya Kualitas Kebijakan Perekonomian dan pembangunan daerah			2.1 Indikator Sasaran : Persentase terlaksananya Kebijakan perekonomian sesuai dengan ketentuan yang berlaku						100%		100%		100%		100%			
			PROGRAM PEREKONOMIAN DAN PEMBANGUNAN	Indikator Program, Persentase terlaksananya Kebijakan, koordinasi dan pengawasan Perekonomian dan Sumber Daya Alam						80%	Rp 3.796.803.892	85%	Rp 9.518.288.000	95%	Rp 10.920.284.169	95%	Rp 24.235.376.061		
			Kegiatan Pelaksanaan Kebijakan Perekonomian	Indikator Kegiatan : Persentase Kebijakan Daerah terkait Bidang Perekonomian yang ditindaklanjuti						80%	Rp 1.064.825.000	85%	Rp 2.692.017.110	95%	Rp 3.670.234.747	95%	Rp 7.427.076.857		
			Sub Kegiatan Koordinasi, Sinkronisasi, Monitoring dan Evaluasi Kebijakan Pengelolaan BUMD dan BLUD	Jumlah laporan koordinasi, sinkronisasi kebijakan pengelolaan BUMD dan BLUD						10 laporan	Rp 320.000.000	10 laporan	Rp 280.996.000	10 laporan	Rp 297.855.760	30 laporan	Rp 898.851.760		
				Jumlah laporan koordinasi, sinkronisasi dan monev kebijakan terkait pengendalian inflasi daerah						6 laporan		6 laporan		6 laporan		18 laporan			
				Jumlah laporan monitoring dan evaluasi pengelolaan BUMD dan BLUD						4 laporan		4 laporan		4 laporan		12 laporan			
			Sub Kegiatan Pengendalian dan Distribusi Perekonomian	Jumlah laporan sinkronisasi bersama lembaga/OPD di bidang pengendalian, distribusi perekonomian dan pemanfaatan DBHCHT						14 laporan	Rp 480.825.000	14 laporan	Rp 2.174.301.110	14 laporan	Rp 3.121.455.787	42 laporan	Rp 5.776.581.897		
				Jumlah laporan monitoring dan evaluasi bidang pengendalian, distribusi perekonomian dan pemanfaatan DBHCHT						14 laporan		14 laporan		14 laporan		42 laporan			

Tujuan	Sasaran	Kode	Program dan Kegiatan, Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Tujuan, Sasaran, Program (outcome) dan Kegiatan (output)	Data Capaian pada Tahun Awal Perencanaan (2018)	Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan												Unit Kerja Perangkat Daerah Penanggungjawab	Lokasi
						Tahun 2019		Tahun 2020		Tahun 2021		Tahun 2022		Tahun 2023		Kondisi Kinerja pada akhir periode Renstra Perangkat Daerah			
						Target Kinerja	Rp	Target Kinerja	Rp	Target Kinerja	Rp	Target Kinerja	Rp	Target Kinerja	Rp	Target Kinerja	Rp		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)	(18)	(19)	
				Jumlah Laporan Pelaksanaan Sosialisasi Terkait Cukai						6 laporan		6 laporan		6 laporan		18 laporan			
				<b>Indikator Kegiatan</b> : Persentase perumusan kebijakan terkait Perencanaan dan Pengawasan Ekonomi Mikro Kecil serta fasilitasi promosi potensi daerah sesuai ketentuan yang berlaku						80%		85%		95%		95%	Rp		
			Sub Kegiatan Perencanaan dan Pengawasan Ekonomi Mikro kecil	Jumlah laporan koordinasi, sinkronisasi dan fasilitasi pengelolaan ekonomi mikro kecil						10 Laporan	Rp 264.000.000	10 Laporan	Rp 236.720.000	10 Laporan	Rp 250.923.200	30 Laporan	Rp 751.643.200		
				Jumlah laporan koordinasi, sinkronisasi dan fasilitasi promosi potensi daerah						10 Laporan		10 Laporan		10 Laporan		30 Laporan			
				Jumlah laporan Monitoring dan Evaluasi pengelolaan ekonomi mikro kecil						8 Laporan		8 Laporan		8 Laporan		24 Laporan			
				Jumlah laporan Monitoring dan Evaluasi promosi potensi daerah						6 Laporan		6 Laporan		6 Laporan		18 Laporan			
			Kegiatan Pemantauan Kebijakan Terkait Sumber Daya Alam	<b>Indikator Kegiatan</b> : Persentase kebijakan daerah terkait sumber daya alam yang ditindaklanjuti						80%	Rp 32.000.000	85%	Rp 4.826.270.890	95%	Rp 5.216.002.197	95%	Rp 10.074.273.087		
			Sub Kegiatan Koordinasi, Sinkronisasi dan Evaluasi Kebijakan Pertanian, Kehutanan, Kelautan dan Perikanan	Jumlah laporan hasil Koordinasi, Sinkronisasi dan Evaluasi Kebijakan Pertanian, Kehutanan, Kelautan dan Perikanan						12 laporan	Rp 32.000.000	12 laporan	Rp 4.826.270.890	12 laporan	Rp 5.216.002.197	36 laporan	Rp 10.074.273.087		
				Jumlah laporan hasil koordinasi dan monitoring evaluasi DBHCHT						12 laporan		12 laporan		12 laporan		36 laporan			
			Sub Kegiatan Koordinasi, Sinkronisasi dan Evaluasi Kebijakan Energi dan Air	Jumlah laporan hasil Koordinasi, Sinkronisasi Kebijakan SDA Energi dan Air						6 laporan	Rp 84.000.000	6 laporan	Rp 68.138.000	6 laporan	Rp 72.226.280	18 laporan	Rp 224.364.280		

Tujuan	Sasaran	Kode	Program dan Kegiatan, Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Tujuan, Sasaran, Program (outcome) dan Kegiatan (output)	Data Capaian pada Tahun Awal Perencanaan (2018)	Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan												Unit Kerja Perangkat Daerah Penanggungjawab	Lokal
						Tahun 2019		Tahun 2020		Tahun 2021		Tahun 2022		Tahun 2023		Kondisi Kinerja pada akhir periode Renstra Perangkat Daerah			
						Target Kinerja	Rp	Target Kinerja	Rp	Target Kinerja	Rp	Target Kinerja	Rp	Target Kinerja	Rp	Target Kinerja	Rp		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)	(18)	(19)	
				Jumlah laporan hasil monitoring dan Evaluasi Kebijakan SDA Energi dan Air						6 laporan		6 laporan		6 laporan		18 laporan			
				Indikator Sasaran: Persentase kebijakan terkait pembangunan yang sesuai dengan ketentuan yang berlaku						100%		100%		100%		100%			
			PROGRAM PEREKONOMIAN DAN PEMBANGUNAN	Indikator Program : Persentase perumusan, pemantauan dan evaluasi kebijakan pembangunan yang dilaksanakan						100%		100%		100%		100%			
			Kegiatan Pelaksanaan Administrasi Pembangunan	Indikator Kegiatan : Persentase kebijakan dan data pembangunan yang disediakan						100%	Rp 949.998.542	100%	Rp 850.000.000	100%	Rp 901.000.000	100%	Rp 2.700.998.542		
			Sub Kegiatan Fasilitas Penyusunan Program Pembangunan	Jumlah jenis kebijakan bidang pembangunan yang disusun (Juknis APBD, SSH, ASB, HSPK, SBU)						5 jenis	Rp 534.826.320	5 jenis	Rp 475.736.320	5 jenis	Rp 504.280.499	5 jenis	Rp 1.514.843.139		
			Sub Kegiatan Pengendalian dan Evaluasi Program Pembangunan	Jumlah paket proyek fisik yang dimonitoring						500 paket	Rp 227.114.212	500 paket	Rp 196.122.970	500 paket	Rp 207.890.348	1500 paket	Rp 631.127.530		
				Jumlah laporan monitoring dan evaluasi kemajuan fisik yang disusun						16 laporan		16 laporan		16 laporan		48 laporan			
			Sub Kegiatan Pengelolaan Evaluasi dan Pelaporan Pelaksanaan Pembangunan	Jumlah pelaksanaan TEPPA						12 kali	Rp 188.058.010	12 kali	Rp 178.140.710	12 kali	Rp 188.829.153	36 kali	Rp 555.027.873		
				Jumlah Laporan Evaluasi Penyerapan Anggaran OPD						12 laporan		12 laporan		12 laporan		36 laporan			

Tujuan	Sasaran	Kode	Program dan Kegiatan, Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Tujuan, Sasaran, Program (outcome) dan Kegiatan (output)	Data Capaian pada Tahun Awal Perencanaan (2018)	Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan												Unit Kerja Perangkat Daerah Penanggung-jawab	Lokasi
						Tahun 2019		Tahun 2020		Tahun 2021		Tahun 2022		Tahun 2023		Kondisi Kinerja pada akhir periode Renstra Perangkat Daerah			
						Target Kinerja	Rp	Target Kinerja	Rp	Target Kinerja	Rp	Target Kinerja	Rp	Target Kinerja	Rp	Target Kinerja	Rp		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)	(18)	(18)	(19)
				2.3 Indikator Sasaran Indeks Tata Kelola Pengadaan Barang dan Jasa															
			PROGRAM PEREKONOMIAN DAN PEMBANGUNAN	Indikator Program Persentase Peningkatan Nilai Indeks Tata Kelola PBJ						2,00%		2,00%		5,00%					
			Kegiatan Pengelolaan Pengadaan Barang dan Jasa	Indikator Kegiatan Persentase pemilihan penyedia barang dan jasa yang dilaksanakan secara elektronik						93%	Rp 1.749.980.350	95%	Rp 1.150.000.000	97%	Rp 1.138.047.225	97%	Rp 4.093.027.575		
			Sub Kegiatan Pengelolaan Pengadaan Barang dan Jasa	Jumlah dokumen hasil analisa inventarisasi paket PBJ						6 dokumen	Rp 1.035.062.250	6 dokumen	Rp 1.027.140.000	6 dokumen	Rp 1.002.815.625	18 dokumen			
				Jumlah dokumen hasil riset dan analisis pasar barang/jasa yang disusun						4 dokumen		4 dokumen		4 dokumen		12 dokumen			
				Jumlah dokumen rekomendasi strategi PBJ						16 dokumen		16 dokumen		16 dokumen		48 dokumen			
				Jumlah dokumen pemilihan beserta dokumen pendukung lainnya yang disusun						8 dokumen		8 dokumen		8 dokumen		24 dokumen			
				Jumlah dokumen hasil pemilihan penyedia e-tendering						100 dokumen		100 dokumen		100 dokumen		300 dokumen			
				Jumlah dokumen katalog elektronik lokal yang disusun						1 dokumen		1 dokumen		1 dokumen		3 dokumen			
				Jumlah laporan monev PBJ yang disusun						4 laporan		4 laporan		4 laporan		12 laporan			
				Jumlah dokumen perencanaan dan pengelolaan kontrak PBJ yang disusun						2 dokumen		2 dokumen		2 dokumen		6 dokumen			
				Indikator Kegiatan Standarisasi LPSE yang memenuhi kriteria LKPP						12 sertifikat Standarisasi LPSE		15 sertifikat Standarisasi LPSE		17 sertifikat Standarisasi LPSE		17 sertifikat Standarisasi LPSE			

Tujuan	Sasaran	Kode	Program dan Kegiatan, Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Tujuan, Sasaran, Program (outcome) dan Kegiatan (output)	Data Capaian pada Tahun Awal Perencanaan (2018)	Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan												Unit Kerja Perangkat Daerah Penanggungjawab	Lokasi
						Tahun 2019		Tahun 2020		Tahun 2021		Tahun 2022		Tahun 2023		Kondisi Kinerja pada akhir periode Renstra Perangkat Daerah			
						Target Kinerja	Rp	Target Kinerja	Rp	Target Kinerja	Rp	Target Kinerja	Rp	Target Kinerja	Rp	Target Kinerja	Rp		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)	(18)	(19)	
			Sub Kegiatan Pengelolaan Layanan Pengadaan Secara Elektronik	Jumlah dokumen pengelolaan sistem Informasi PBJ dan Infrastrukturnya						4 dokumen	Rp 139.500.000	4 dokumen	Rp 56.498.000	4 dokumen	Rp 59.887.880	12 dokumen	Rp 255.885.880		
				Jumlah dokumen registrasi dan verifikasi pengguna sistem Informasi pengadaan barang dan jasa yang disediakan						12 dokumen		12 dokumen		12 dokumen		36 dokumen			
				Jumlah dokumen pengembangan sistem informasi pengadaan yang dibutuhkan oleh pemangku kepentingan yang aplikatif						4 Dokumen		4 Dokumen		4 Dokumen		12 Dokumen			
				Indikator Kelengkapan Tingkat kematangan UKPBJ yang memenuhi kriteria Level Pro Aktif LKPP						5 variabel		7 variabel		9 variabel		9 variabel			
			Sub Kegiatan Pembinaan dan Advokasi Pengadaan Barang dan Jasa	Jumlah pembinaan SDM di Bagian PBJ di BPPJ						15 orang	Rp 575.418.100	15 orang	Rp 66.362.000	15 orang	Rp 70.943.720	15 orang	Rp 712.123.820		
				Jumlah pelaksanaan Pembinaan pelaku pengadaan barang/jasa pemerintah						1 kali		1 kali		1 kali		3 kali			
				Jumlah Jenis Pengelolaan kelembagaan UKPBJ yang dilaksanakan						3 jenis		3 jenis		3 jenis		3 jenis			
				Jumlah laporan pengelolaan dan pengukuran kinerja PBJ pemerintah yang disusun						4 laporan		4 laporan		4 laporan		12 laporan			
				Jumlah penyusunan laporan pengelolaan manajemen pengetahuan PBJ pemerintah						4 laporan		4 laporan		4 laporan		12 laporan			
				Jumlah penyusunan laporan pembinaan hubungan dengan para pemangku kepentingan						4 laporan		4 laporan		4 laporan		12 laporan			

Tujuan	Sasaran	Kode	Program dan Kegiatan, Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Tujuan, Sasaran, Program (outcome) dan Kegiatan (output)	Data Capaian pada Tahun Awal Perencanaan (2018)	Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan												Unit Kerja Perangkat Daerah Penanggungjawab	Lokasi
						Tahun 2019		Tahun 2020		Tahun 2021		Tahun 2022		Tahun 2023		Kondisi Kinerja pada akhir periode Renstra Perangkat Daerah			
						Target Kinerja	Rp	Target Kinerja	Rp	Target Kinerja	Rp	Target Kinerja	Rp	Target Kinerja	Rp	Target Kinerja	Rp		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)	(18)	(19)	
	3. Meningkatnya Kualitas Tata Kelola Pemerintahan Daerah			Indikator Sasaran Nilai SAKIP Setda						84,00									
			PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Indikator Program Persentase rata-rata ketersediaan kebutuhan pimpinan dan administrasi kesekretariatan daerah						100%	Rp 35.170.673.239	100%	Rp 33.748.607.183	100%	Rp 35.824.506.099	100%	Rp 104.743.786.461		
			Kegiatan Administrasi Kepegawalan Perangkat Daerah	Indikator Kegiatan : Persentase fasilitas Administrasi Tata Usaha dan kepegawalan						100%	Rp 54.093.900,00	100%	Rp 54.093.960	100%	Rp 57.339.534	100%	Rp 165.327.334		
			Sub Kegiatan Monitoring, Evaluasi, dan Penilaian Kinerja Pegawai	Jumlah ASN yang dimonitoring, dievaluasi dan penilaian kinerja pegawai						146 orang	Rp 6.093.900,00	146 orang	Rp 6.093.900	146 orang	Rp 6.459.534	146 orang	Rp 18.647.334		
			Sub Kegiatan Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan	Jumlah bimtek yang terlaksana						1 kali	Rp 48.000.000,00	1 kali	Rp 48.000.000	1 kali	Rp 50.880.000	3 kali	Rp 146.880.000		
				Jumlah laporan pengelolaan Administrasi kepegawalan yang dilaksanakan						12 laporan		12 laporan		12 laporan		36 laporan			
			Kegiatan Administrasi Keuangan dan Operasional Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah	Indikator Kegiatan Persentase pemenuhan administrasi keuangan dan operasional kepala daerah dan wakil kepala daerah						100%	Rp 1.478.026.181	100%	Rp 1.429.845.349	100%	Rp 1.566.707.752	100%	Rp 4.474.579.282		
			Sub Kegiatan Penyediaan Gaji dan Tunjangan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah	Jumlah Gaji KDH dan WKDH yang terbayar						12 bulan	Rp 191.439.000,00	12 bulan	Rp 191.439.000	12 bulan	Rp 202.925.340	12 bulan			

Tujuan	Sasaran	Kode	Program dan Kegiatan, Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Tujuan, Sasaran, Program (outcome) dan Kegiatan (output)	Data Capaian pada Tahun Awal Perencanaan (2018)	Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan												Unit Kerja Perangkat Daerah Penanggungjawab	Lokasi
						Tahun 2019		Tahun 2020		Tahun 2021		Tahun 2022		Tahun 2023		Kondisi Kinerja pada akhir periode Renstra Perangkat Daerah			
						TARGET KINERJA	Rp	TARGET KINERJA	Rp	TARGET KINERJA	Rp	TARGET KINERJA	Rp	TARGET KINERJA	Rp	TARGET KINERJA	Rp		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)	(18)	(19)	(20)
			Sub Kegiatan Penyediaan Pakal Dinas dan Atribut Kelengkapan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah	Jumlah pengadaan pakal dinas Bupati & Wabup						1 paket	Rp 106.902.400,00	1 paket	Rp 104.581.400	1 paket	Rp 113.316.544	3 paket	Rp 324.800.344		
			Sub Kegiatan Pelaksanaan Medical Check Up Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah	Jumlah Pelayanan kesehatan KDH dan WKDH yang terbayar						12 bulan	Rp 93.676.573,00	12 bulan	Rp 93.676.573	12 bulan	Rp 99.297.167	12 bulan	Rp 286.650.313		
			Sub Kegiatan Penyediaan Dana Penunjang Operasional Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah	Jumlah Dana Penunjang Operasional KDH dan WKDH yang terbayar						12 bulan	Rp 1.086.008.208,00	12 bulan	Rp 1.040.148.376	12 bulan	Rp 1.151.168.700	12 bulan	Rp 3.277.325.284		
			Kegiatan Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Indikator Kegiatan Persentase pemenuhan penyediaan jasa penunjang urusan pemerintahan daerah						100%	Rp 3.482.185.519	100%	Rp 3.726.918.689	100%	Rp 3.908.216.310	100%	Rp 11.117.320.518		
			Sub Kegiatan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jml rek tlp, air, listrik dan internet yang terbayar						90 rek-bln	Rp 1.052.564.259,00	90 rek-bln	Rp 1.052.557.889	90 rek-bln	Rp 1.115.718.115	90 rek-bln	Rp 3.220.840.263		
			Sub Kegiatan Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah jasa sewa peralatan dan perlengkapan kantor						6 kali	Rp 137.095.000,00	6 kali	Rp 137.040.000	6 kali	Rp 145.320.700	18 kali	Rp 419.455.700		
			Sub Kegiatan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah jenis jasa pelayanan umum kantor yang terbayarkan						6 jenis	Rp 2.292.526.260,00	6 jenis	Rp 2.537.320.800	6 jenis	Rp 2.647.177.496	6 jenis	Rp 7.477.024.556		
			Kegiatan Administrasi Umum Perangkat Daerah	Indikator Kegiatan Persentase pemenuhan administrasi umum perangkat daerah						100%	Rp 2.576.270.661	100%	Rp 2.635.576.240	100%	Rp 2.730.846.901	100%	Rp 7.942.693.602		
			Sub Kegiatan Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Jumlah barang cetakan dan penggandaan yang tersedia						20 jenis	Rp 306.948.040,00	20 jenis	Rp 342.807.800	20 jenis	Rp 325.364.922	20 jenis	Rp 975.120.762		

Tujuan	Sasaran	Kode	Program dan Kegiatan, Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Tujuan, Sasaran, Program (outcome) dan Kegiatan (output)	Data Capaian pada Tahun Awal Perencanaan (2018)	Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan												Unit Kerja Perangkat Daerah Penanggungjawab	Lokasi
						Tahun 2019		Tahun 2020		Tahun 2021		Tahun 2022		Tahun 2023		Kondisi Kinerja pada akhir periode Renstra Perangkat Daerah			
						Target Kinerja	Rp	Target Kinerja	Rp	Target Kinerja	Rp	Target Kinerja	Rp	Target Kinerja	Rp	Target Kinerja	Rp		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)	(18)	(19)	
			Sub Kegiatan Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah pembelian peralatan dan perlengkapan kantor						35 jenis	Rp 131.955.300,00	35 jenis	Rp 131.928.500	35 jenis	Rp 139.872.618	35 jenis	Rp 403.756.418		
			Sub Kegiatan Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	Jumlah pembelian peralatan rumah tangga						35 jenis	Rp 299.954.588,00	35 jenis	Rp 272.497.190	35 jenis	Rp 317.951.863	35 jenis	Rp 890.403.641		
			Sub Kegiatan Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jumlah bahan logistik kantor yang tersedia						130 jenis	Rp 253.822.793,00	130 jenis	Rp 255.439.150	130 jenis	Rp 269.052.161	130 jenis	Rp 778.314.104		
			Sub Kegiatan Fasilitas Kunjungan Tamu	Jumlah kegiatan rapat dan tamu						3000 orang	Rp 1.080.585.940,00	3000 orang	Rp 1.129.899.600	3000 orang	Rp 1.145.421.096	3000 orang	Rp 3.355.906.636		
			Sub Kegiatan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah laporan rapat koordinasi dan konsultasi SKPD						360 laporan	Rp 503.004.000,00	360 laporan	Rp 503.004.000	360 laporan	Rp 533.184.240	360 laporan	Rp 1.539.192.240		
			Kegiatan Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Indikator Kegiatan Persentase pemenuhan pengadaan BMD penunjang urusan pemerintah daerah						100%	Rp 1.769.632.000	100%	Rp 28.930.000	100%	Rp -	100%	Rp 1.798.562.000		
			Sub Kegiatan Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah pengadaan belanja modal kendaraan						5 unit	Rp 1.588.399.400,00	5 unit	Rp -	5 unit	Rp -	15 unit	Rp 1.588.399.400		
			Sub Kegiatan Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah sarana dan prasarana Gedung Kantor Setda						20 unit	Rp 126.287.600,00	20 unit	Rp -	20 unit	Rp -	60 unit	Rp 126.287.600		
			Sub Kegiatan Pengadaan Mebel	Jumlah pengadaan belanja modal mebelair setda						5 unit	Rp 8.195.000,00	5 unit	Rp -	5 unit	Rp -	15 unit	Rp 8.195.000		
			Sub Kegiatan Pengadaan Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah pengadaan sarana dan prasarana Kepala Daerah yang tersedia						10 unit	Rp 46.750.000,00	10 unit	Rp 28.930.000	10 unit	Rp -	30 unit	Rp 75.680.000		

Tujuan	Sasaran	Kode	Program dan Kegiatan, Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Tujuan, Sasaran, Program (outcome) dan Kegiatan (output)	Data Capaian pada Tahun Awal Perencanaan (2018)	Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan												Unit Kerja Perangkat Daerah Penanggung-Jawab	Lokasi
						Tahun 2019		Tahun 2020		Tahun 2021		Tahun 2022		Tahun 2023		Kondisi Kinerja pada akhir periode Renstra Perangkat Daerah			
						Target Kinerja	Rp	Target Kinerja	Rp	Target Kinerja	Rp	Target Kinerja	Rp	Target Kinerja	Rp	Target Kinerja	Rp		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)	(18)	(19)	
			Kegiatan Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Indikator Kegiatan Persentase pemenuhan pemeliharaan BMD penunjang urusan pemerintahan daerah						100%	Rp 2.854.615.334	100%	Rp 3.058.479.675	100%	Rp 3.377.814.948	100%	Rp 9.290.909.957		
			Sub Kegiatan Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah gedung kantor setda dan KDH/WKDH yang terpelihara						6 gedung	Rp 536.497.734,00	6 gedung	Rp 590.370.675	6 gedung	Rp 728.499.708	6 gedung	Rp 1.855.368.117		
			Sub Kegiatan Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Jumlah Mobil jabatan yang terpelihara						4 kendaraan	Rp 233.506.600,00	4 kendaraan	Rp 233.600.000	4 kendaraan	Rp 280.627.580	4 kendaraan	Rp 747.734.180		
			Sub Kegiatan Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak, dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah kendaraan dinas operasional Setda yang dipelihara						55 kend	Rp 1.849.391.200,00	55 kend	Rp 1.999.490.100	55 kend	Rp 2.119.354.672	55 kend	Rp 5.968.235.972		
			Sub Kegiatan Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah jenis perlengkapan dan peralatan gedung kantor yang dipelihara						1200 unit	Rp 134.037.800,00	1200 unit	Rp 134.022.900	1200 unit	Rp 142.080.068	1200 unit	Rp 410.140.768		
			Sub Kegiatan Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor KDH dan WKDH yang dipelihara						50 unit	Rp 78.742.000,00	50 unit	Rp 78.556.000	50 unit	Rp 83.466.520	50 unit	Rp 240.764.520		
			Pemeliharaan Mebel	Jumlah jenis mebelair yang dipelihara						120 unit	Rp 22.440.000,00	120 unit	Rp 22.440.000	120 unit	Rp 23.786.400	120 unit	Rp 68.666.400		
			Kegiatan Fasilitas Kerumahtangga Sekretariat Daerah	Indikator Kegiatan Persentase pemenuhan fasilitas kerumahtangga sekretariat daerah						100%	Rp 506.767.824	100%	Rp 506.832.480	100%	Rp 537.173.893	100%	Rp 1.550.774.197		

Tujuan	Sasaran	Kode	Program dan Kegiatan, Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Tujuan, Sasaran, Program (outcome) dan Kegiatan (output)	Data Capaian pada Tahun Awal Perencanaan (2018)	Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan												Unit Kerja Perangkat Daerah Penanggung-jawab	Lokasi
						Tahun 2019		Tahun 2020		Tahun 2021		Tahun 2022		Tahun 2023		Kondisi Kinerja pada akhir periode Renstra Perangkat Daerah			
						Target Kinerja	Rp	Target Kinerja	Rp	Target Kinerja	Rp	Target Kinerja	Rp	Target Kinerja	Rp	Target Kinerja	Rp		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)	(18)	(18)	(19)
			Sub Kegiatan Penyediaan Kebutuhan Rumah Tangga Kepala Daerah	Jumlah jenis kebutuhan rumah tangga Kepala Daerah yang tersedia						8 jenis	Rp 259.863.624,00	8 jenis	Rp 259.902.720	8 jenis	Rp 275.455.441	8 jenis	Rp 795.221.785		
			Sub Kegiatan Penyediaan Kebutuhan Rumah Tangga Wakil Kepala Daerah	Jumlah jenis kebutuhan rumah tangga Wakil Kepala Daerah yang tersedia						8 jenis	Rp 194.215.872,00	8 jenis	Rp 194.099.400	8 jenis	Rp 205.868.824	8 jenis	Rp 594.184.095		
			Sub Kegiatan Penyediaan Kebutuhan Rumah Tangga Sekretariat Daerah	Jumlah jenis kebutuhan rumah tangga Sekretariat Daerah yang tersedia						3 jenis	Rp 52.688.328,00	3 jenis	Rp 52.830.360	3 jenis	Rp 55.849.628	3 jenis	Rp 161.368.316		
				<b>Indikator Program</b> Persentase Terlaksananya Kegiatan Keprotokolan dan Komunikasi Pimpinan						100%		100%		100%		100%			
			Kegiatan Pelaksanaan Protokol dan Komunikasi Pimpinan	<b>Indikator Kegiatan</b> Persentase pelayanan kepada kepala daerah dan wakil kepala daerah yang terfasilitasi						100%	Rp 1.498.303.100	100%	Rp 1.359.727.350	100%	Rp 1.441.310.991	100%	Rp 4.299.341.641		
			Sub Kegiatan Fasilitas Keprotokolan	Jumlah Kali Kegiatan Pimpinan Daerah yang difasilitasi Keprotokolan						500 kali	Rp 950.434.300	500 kali	Rp 862.615.430	500 kali	Rp 799.721.640	1500 kali	Rp 2.606.771.370		
				Jumlah penerimaan kunjungan kerja pejabat negara						5 kali		6 kali		6 kali		17 kali			
				Jumlah inspeksi Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah						35 kali		198 kali		198 kali		431 kali			
				Jumlah laporan koordinasi dengan Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah lainnya						20 laporan		36 laporan		36 laporan		92 laporan			
				<b>Indikator Kegiatan</b> Persentase audiensi dengan Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah lainnya serta Masyarakat Publik						100%		100%		100%		100%			
			Sub Kegiatan Fasilitas Komunikasi Pimpinan	Jumlah pelaksanaan fasilitas komunikasi pimpinan						24 kali	Rp 377.332.800	24 kali	Rp 304.735.350	24 kali	Rp 443.534.051	24 kali	Rp 1.125.602.201		

Tujuan	Seseran	Kode	Program dan Kegiatan, Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Tujuan, Seseran, Program (outcome) dan Kegiatan (output)	Data Capaian pada Tahun Awa Perencanaan (2018)	Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan												Unit Kerja Perangkat Daerah Penanggung-Jawab	Lokal
						Tahun 2019		Tahun 2020		Tahun 2021		Tahun 2022		Tahun 2023		Kondisi Kinerja pada akhir periode Renstra Perangkat Daerah			
						Target Kinerja	Rp	Target Kinerja	Rp	Target Kinerja	Rp	Target Kinerja	Rp	Target Kinerja	Rp	Target Kinerja	Rp		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)	(18)	(19)	
				Jumlah audiensi dengan Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah lainnya serta Masyarakat Publik						24 kali		24 kali		24 kali		24 kali			
				Jumlah bahan materi/naskah/sambutan untuk Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah						12 bahan		12 bahan		12 bahan		12 bahan			
				<u>Indikator Kegiatan</u> Persentase kegiatan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah yang didokumentasikan						100%		100%		100%		100%			
			Sub Kegiatan Pendokumentasian Tugas Pimpinan	Jumlah jenis pendokumentasian tugas Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah yang disusun						6 jenis	Rp 170.536.000	6 jenis	Rp 192.376.570	6 jenis	Rp 204.055.300	6 jenis	Rp 566.967.870		
				Jumlah bahan publikasi hasil pendokumentasian kegiatan KDH/WKDH						55 bahan		55 bahan		55 bahan		55 bahan			
				<u>Indikator Program</u> Persentase tersusunnya dokumen perencanaan, evaluasi kinerja dan administrasi keuangan yang akuntabel						100%		100%		100%		100%			
			Kegiatan Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	<u>Indikator Kegiatan</u> Persentase Fasilitasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Setda yang tepat waktu						100%	Rp 507.761.740	100%	Rp 999.092.960	100%	Rp 418.799.568	100%	Rp 1.321.654.266		
			Sub Kegiatan Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan Sekretariat Daerah yang disusun						3 dokumen	Rp 238.590.720,00	3 dokumen	Rp 243.190.360	3 dokumen	Rp 257.782.396	9 dokumen	Rp 739.563.476		
				Jumlah Dokumen RKADPA dan DPPA Sekretariat Daerah yang disusun						4 Dokumen		4 Dokumen		4 Dokumen		12 Dokumen			
				Jumlah Dokumen Perjanjian Kinerja Sekretariat Daerah						2 Dokumen		2 Dokumen		2 Dokumen		6 Dokumen			
				Jumlah Fasilitasi Penyusunan Dokumen SAKIP, RB dan ZI Sekretariat Daerah						3 Dokumen		3 Dokumen		3 Dokumen		9 Dokumen			

Tujuan	Sasaran	Kode	Program dan Kegiatan, Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Tujuan, Sasaran, Program (outcome) dan Kegiatan (output)	Data Capaian pada Tahun Awal Perencanaan (2018)	Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan											Unit Kerja Perangkat Daerah Penanggungjawab	Lokasi	
						Tahun 2019		Tahun 2020		Tahun 2021		Tahun 2022		Tahun 2023		Kondisi Kinerja pada akhir periode Renstra Perangkat Daerah			
						Target Kinerja	Rp	Target Kinerja	Rp	Target Kinerja	Rp	Target Kinerja	Rp	Target Kinerja	Rp	Target Kinerja			Rp
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)	(18)	(19)	
				Indikator Kelelahan Persentase Fasilitas Pelaporan Setda yang tepat waktu						100%		100%		100%		100%			
			Sub Kegiatan Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Dokumen laporan SAKIP yang disusun						1 Dokumen	Rp 269.171.020,00	1 Dokumen	Rp 151.902.600	1 Dokumen	Rp 161.017.169	3 Dokumen	Rp 582.090.789		
				Laporan Kinerja Sekretariat Daerah yang disusun						2 Laporan		2 Laporan		2 Laporan		6 Laporan			
				laporan SIMONEVA Sekretariat Daerah yang disusun						1 Laporan		1 Laporan		1 Laporan		3 Laporan			
				Laporan Reformasi Birokrasi (RB) Sekretariat Daerah yang disusun						1 Laporan		1 Laporan		1 Laporan		3 Laporan			
				Laporan Zona Integritas (ZI) Sekretariat Daerah yang disusun						1 Laporan		1 Laporan		1 Laporan		3 Laporan			
				Dokumen Evaluasi Rencana Kerja Sekretariat Daerah yang disusun						1 Laporan		1 Laporan		1 Laporan		3 Laporan			
				Laporan SPIP Sekretariat Daerah yang disusun						1 Laporan		1 Laporan		1 Laporan		3 Laporan			
				Laporan Penatausahaan barang milik daerah pada Sekretariat Daerah yang disusun						1 Laporan		1 Laporan		1 Laporan		3 Laporan			
			Kegiatan Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Indikator Kelelahan Persentase Pemenuhan Administrasi Keuangan Sekretariat Daerah sesuai aturan yang berlaku dan tepat waktu						100%	Rp 18.219.267.190	100%	Rp 18.653.110.540	100%	Rp 19.772.296.144	100%	Rp 56.644.673.874		

Tujuan	Sasaran	Kode	Program dan Kegiatan, Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Tujuan, Sasaran, Program (outcome) dan Kegiatan (output)	Date Capaian pada Tahun Awal Perencanaan (2018)	Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan												Unit Kerja Perangkat Daerah Penanggung-jawab	Lokal
						Tahun 2019		Tahun 2020		Tahun 2021		Tahun 2022		Tahun 2023		Kondisi Kinerja pada akhir periode Renstra Perangkat Daerah			
						Target Kinerja	Rp	Target Kinerja	Rp	Target Kinerja	Rp	Target Kinerja	Rp	Target Kinerja	Rp	Target Kinerja	Rp		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)	(18)	(19)	
			Sub Kegiatan Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah SPP/SPM/SP2D Gaji dan TPP yang diterbitkan						19 Dokumen	Rp 16.751.029.000,00	19 Dokumen	Rp 17.169.562.820	19 Dokumen	Rp 18.199.735.921	57 Dokumen	Rp 52.120.327.741		
			Sub Kegiatan Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	Jumlah SPP/SPM/SP2D Setda yang diterbitkan						330 Berkas	Rp 1.468.238.190,00	400 Berkas	Rp 1.483.547.720	400 Berkas	Rp 1.572.560.223	1130 berkas	Rp 4.524.346.133		

Tujuan	Sasaran	Kode	Program dan Kegiatan, Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Tujuan, Sasaran, Program (outcome) dan Kegiatan (output)	Data Capaian pada Tahun Awal Perencanaan (2018)	Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan												Unit Kerja Perangkat Daerah Penanggungjawab	Lokasi
						Tahun 2019		Tahun 2020		Tahun 2021		Tahun 2022		Tahun 2023		Kondisi Kinerja pada akhir periode Renstra Perangkat Daerah			
						TARGET KINERJA	Rp	TARGET KINERJA	Rp	TARGET KINERJA	Rp	TARGET KINERJA	Rp	TARGET KINERJA	Rp	TARGET KINERJA	Rp		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)	(18)	(18)	(19)
				Jumlah SPI Setda yang telah diverifikasi						330 Berkas		400 Berkas		400 Berkas		1130 Berkas			
				Jumlah Laporan Keuangan Setda						5 laporan		5 laporan		5 laporan		5 laporan			
				<b>3.2 Indikator Sasaran</b> Persentase Perangkat daerah yang Tepat Fungsi dan Tepat Ukuran						100%		100%		100%		100%			
			PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Indikator Program Persentase penataan kelembagaan Perangkat Daerah yang dilaksanakan						100%		100%		100%		100%			
			Kegiatan Penataan Organisasi	Indikator Kegiatan Persentase pelaksanaan penyusunan dokumen Evaluasi Kelembagaan dan Anjab ABK/SKJ/Evjab						100%	2.223.749.790	100%	1.900.000.000	100%	2.014.000.000	100%	Rp 6.137.749.790		
			Sub Kegiatan Pengelolaan Kelembagaan dan Analisis Jabatan	Jumlah dokumen Evaluasi Kelembagaan Perangkat Daerah						15 dokumen	989.499.870,00	17 dokumen	Rp 695.000.000	32 dokumen	Rp 954.000.000	64 dokumen	Rp 2.638.499.870		
				Jumlah Dokumen Anjab ABK/SKJ/Evjab						55 dokumen		55 dokumen		55 dokumen		165 dokumen			
				<b>3.3 indikator Sasaran</b> Persentase Perangkat Daerah yang berkinerja sangat baik / Nilai SAKIP minimal BB						85%		95%		100%		100%			
			PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Indikator Program Persentase Perangkat Daerah yang dibina menuju Nilai SAKIP minimal BB						100%		100%		100%		100%			

Tujuan	Sasaran	Kode	Program dan Kegiatan, Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Tujuan, Sasaran, Program (outcome) dan Kegiatan (output)	Data Capaian pada Tahun Awaal Perencanaan (2018)	Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan												Unit Kerja Perangkat Daerah Penanggungjawab	Lokal
						Tahun 2019		Tahun 2020		Tahun 2021		Tahun 2022		Tahun 2023		Kondisi Kinerja pada akhir periode Renstra Perangkat Daerah			
						Target Kinerja	Rp	Target Kinerja	Rp	Target Kinerja	Rp	Target Kinerja	Rp	Target Kinerja	Rp	Target Kinerja	Rp		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)	(18)	(18)	(19)
			Kegiatan Penataan Organisasi	Indikator Kegiatan Persentase kepatuhan penyelenggaraan pelayanan publik perangkat daerah						100%		100%		100%		100%			
			Sub Kegiatan Fasilitas Pelayanan Publik dan Tata Laksana	Jumlah laporan pembinaan pelayanan publik						3 laporan	767.399.940,00	3 laporan	Rp 605.000.000	3 laporan	Rp 530.000.000	9 laporan	Rp 1.902.399.940		
				Jumlah fasilitasi proposal inovasi PD yang diikuti kompetisi pelayanan publik						8 proposal		8 proposal		8 proposal		24 proposal			
				Jml laporan pembinaan bidang ketatalaksanaan						2 laporan		2 laporan		2 laporan		6 laporan			
				Indikator Kegiatan Persentase kesesuaian laporan kinerja perangkat daerah dengan ketentuan															
			Sub Kegiatan Peningkatan Kinerja dan Reformasi Birokrasi	Jumlah laporan pembinaan/asistensi SAKIP PD						2 laporan	466.849.980,00	2 laporan	Rp 600.000.000	2 laporan	Rp 530.000.000	6 laporan	Rp 1.596.849.980		
				Jumlah laporan fasilitasi koordinasi tim SAKIP Kabupaten						4 laporan		4 laporan		4 laporan		12 laporan			
				Jumlah laporan kinerja pemda						1 laporan		1 laporan		1 laporan		3 laporan			
				Jumlah laporan Budaya Kerja Pemda						1 laporan		1 laporan		1 laporan		3 laporan			
				Jumlah laporan pembinaan/asistensi RB PD						2 laporan		2 laporan		2 laporan		6 laporan			
				Jumlah laporan fasilitasi koordinasi tim RB Kabupaten						4 laporan		4 laporan		4 laporan		12 laporan			

BERDASARKAN KEPMENDAGRI NOMOR 050-5889 TAHUN 2021

Tujuan	Sasaran	Kode	Program dan Kegiatan, Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Tujuan, Sasaran, Program (outcome) dan Kegiatan (output)	Data Capaian pada Tahun Awal Perencanaan (2018)	Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan												Unit Kerja Perangkat Daerah Penanggungjawab	Lokasi
						Tahun 2019		Tahun 2020		Tahun 2021		Tahun 2022		Tahun 2023		Kondisi Kinerja pada akhir periode Renstra Perangkat Daerah			
						Target Kinerja	Rp	Target Kinerja	Rp	Target Kinerja	Rp	Target Kinerja	Rp	Target Kinerja	Rp	Target Kinerja	Rp		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)	(18)	(18)	(19)
Meningkatnya Kualitas Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah				Indikator Tujuan : Nilai SAKIP								87,00 (A)		89,00 (A)		89,00 (A)			
	Sasaran Setda: 1. Meningkatkan Kualitas kebijakan bidang pemerintahan, Hukum dan Kesejahteraan rakyat			1. Indikator sasaran : LPPD tepat waktu								1 laporan		1 laporan		2 laporan			
			PROGRAM PEMERINTAHAN DAN KESEJAHTERAAN RAKYAT									100%	Rp 17.752.207.798	100%	Rp 18.817.351.815	100%	Rp 36.569.559.613		
				Indikator Program : Persentase kesesuaian indikator kinerja kunci yang dilaksanakan terhadap penyelenggaraan pemerintahan daerah								100%		100%		100%			
			Kegiatan Administrasi Tata Pemerintahan	Indikator kegiatan : Persentase penyusunan LPPD dan LKPJ tepat waktu								100%	Rp 1.051.407.000	100%	Rp 1.114.491.632	100%	Rp 2.165.998.632		
			Sub Kegiatan Penataan Administrasi Pemerintahan	Jumlah Dokumen hasil Penataan Administrasi Pemerintahan								2 dokumen	Rp 681.716.800	2 dokumen	Rp 722.620.020	4 dokumen	Rp 1.404.336.820		
				Indikator Kegiatan: Persentase hasil evaluasi penyelenggaraan pemerintahan daerah yang ditindaklanjuti								100%		100%		100%			
			Sub Kegiatan Fasilitasi Pelaksanaan Otonomi Daerah	Jumlah Dokumen Hasil Fasilitasi Pelaksanaan Otonomi Daerah								12 dokumen	Rp 104.290.000	12 dokumen	Rp 110.547.400	24 laporan	Rp 214.837.400		

Tujuan	Sasaran	Kode	Program dan Kegiatan, Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Tujuan, Sasaran, Program (outcome) dan Kegiatan (output)	Data Capaian pada Tahun Awal Perencanaan (2018)	Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan												Unit Kerja Perangkat Daerah Penanggungjawab	Lokasi
						Tahun 2019		Tahun 2020		Tahun 2021		Tahun 2022		Tahun 2023		Kondisi Kinerja pada akhir periode Renstra Perangkat Daerah			
						Target Kinerja	Rp	Target Kinerja	Rp	Target Kinerja	Rp	Target Kinerja	Rp	Target Kinerja	Rp	Target Kinerja	Rp		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)	(18)	(19)	
				Indikator Kegiatan : Persentase administrasi kewilayahan yang terlaksana								100%		100%		100%			
			Sub Kegiatan Pengelolaan Administrasi Kewilayahan	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Administrasi Kewilayahan								5 dokumen	Rp 265.400.200	5 dokumen	Rp 281.324.212	10 dokumen	Rp 546.724.412		
				Indikator Program : Persentase kebijakan terkait fasilitasi kerjasama								100%		100%		100%			
			Kegiatan Fasilitasi Kerjasama Daerah	Indikator Kegiatan : Persentase fasilitasi kerjasama yang ditindaklanjuti								100%	Rp 185.991.400	100%	Rp 197.160.037	100%	Rp 383.151.437		
			Sub Kegiatan Fasilitasi Kerja Sama Dalam Negeri	Jumlah Dokumen Hasil Fasilitasi Kerja Sama Dalam Negeri								3 dokumen	Rp 155.523.400	3 dokumen	Rp 136.886.280	6 dokumen	Rp 292.409.680		
			Sub Kegiatan Fasilitasi Kerja Sama Luar Negeri	Jumlah Dokumen Hasil Fasilitasi Kerja Sama Luar Negeri								1 dokumen	Rp 9.260.000	1 dokumen	Rp 13.083.511	2 dokumen	Rp 22.343.511		
			Sub Kegiatan Evaluasi Pelaksanaan Kerja Sama	Jumlah Laporan Hasil Evaluasi Pelaksanaan Kerja Sama								4 Laporan	Rp 21.208.000	4 Laporan	Rp 47.190.246	8 Laporan	Rp 68.398.246		
				1.2 Indikator Sasaran. Persentase Kebijakan Bidang Kesejahteraan rakyat yang dilaksanakan															
			PROGRAM PEMERINTAHAN DAN KESEJAHTERAAN RAKYAT																
				Indikator Program : Persentase Layanan Kesejahteraan Rakyat yang difasilitasi								100%		100%		100%			
			Kegiatan Evaluasi Pelaksanaan Kebijakan Kesejahteraan Rakyat	Indikator Kegiatan : Persentase pelaksanaan Pembinaan Mental Spiritual								100%	Rp 15.317.095.568	100%	Rp 16.236.122.926	100%	Rp 31.553.218.494		

Tujuan	Sasaran	Kode	Program dan Kegiatan, Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Tujuan, Sasaran, Program (outcome) dan Kegiatan (output)	Data Capaian pada Tahun Awal Perencanaan (2018)	Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan												Unit Kerja Perangkat Daerah Penanggungjawab	Lokasi
						Tahun 2019		Tahun 2020		Tahun 2021		Tahun 2022		Tahun 2023		Kondisi Kinerja pada akhir periode Renstra Perangkat Daerah			
						Target Kinerja	Rp	Target Kinerja	Rp	Target Kinerja	Rp	Target Kinerja	Rp	Target Kinerja	Rp	Target Kinerja	Rp		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)	(18)	(19)	
			Sub Kegiatan Fasilitasi Pengelolaan Bina Mental Spiritual	Jumlah Dokumen Hasil Fasilitas Pengelolaan Bina Mental Spiritual								10 dokumen	Rp 2.987.395.568	10 dokumen	Rp 3.166.640.926	20 dokumen	Rp 6.154.036.494		
				Indikator Kegiatan : Persentase Fasilitas dan Evaluasi Kebijakan Kesejahteraan Sosial yang dilaksanakan								100%		100%		100%			
			Sub Kegiatan Pelaksanaan Kebijakan, Evaluasi, dan Capaian Kinerja terkait Kesejahteraan Sosial	Jumlah Dokumen Hasil Kebijakan, Evaluasi, dan Capaian Kinerja Terkait Kesejahteraan Sosial yang Meliputi Urusan Sosial, Transmigrasi, Kesehatan, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak, Administrasi Kependudukan Dan Pencatatan Sipil, Pemberdayaan Masyarakat dan Desa, Pengendalian Penduduk dan KB								4 dokumen	Rp 12.240.000.000	4 dokumen	Rp 12.974.400.000	8 dokumen	Rp 25.214.400.000		
				Indikator Kegiatan : Persentase Fasilitas dan Evaluasi Kebijakan Kesejahteraan masyarakat yang dilaksanakan								100%		100%		100%			
			Sub Kegiatan Pelaksanaan Kebijakan, Evaluasi, dan Capaian Kinerja terkait Kesejahteraan Masyarakat	Jumlah Dokumen Hasil Kebijakan, Evaluasi, dan Capaian Kinerja Terkait Kesejahteraan Masyarakat yang Meliputi Urusan Kepemudaan dan Olahraga, Pariwisata, Pendidikan, Kebudayaan, Perpustakaan, Kearsipan, Trantibum Linmas								25 dokumen	Rp 89.700.000	30 dokumen	Rp 95.082.000	55 dokumen	Rp 184.782.000		
				1.3 Indikator Sasaran. Persentase kebijakan bidang hukum yang diundangkan								100%		100%		100%			
			PROGRAM PEMERINTAHAN DAN KESEJAHTERAAN RAKYAT	Indikator program : Persentase produk kebijakan daerah yang diterbitkan sesuai dengan kebutuhan								100%		100%		99%			

Tujuan	Sasaran	Kode	Program dan Kegiatan, Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Tujuan, Sasaran, Program (outcome) dan Kegiatan (output)	Data Capaian pada Tahun Awal Perencanaan (2018)	Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan										Unit Kerja Perangkat Daerah Penanggung-jawab	Lokasi		
						Tahun 2019		Tahun 2020		Tahun 2021		Tahun 2022		Tahun 2023				Kondisi Kinerja pada akhir periode Renstra Perangkat Daerah	
						Target Kinerja	Rp	Target Kinerja	Rp	Target Kinerja	Rp	Target Kinerja	Rp	Target Kinerja	Rp			Target Kinerja	Rp
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)	(18)	(19)	
			Kegiatan Fasilitasi dan Koordinasi Hukum	Indikator Kegiatan : Persentase Ketersediaan Produk Hukum Daerah sesuai kewenangan daerah								100%	Rp 1.197.713.830	100%	Rp 1.269.577.220	100%	Rp 2.467.291.050		
			Sub Kegiatan Fasilitasi Penyusunan Produk Hukum Daerah	Jumlah Produk Hukum Daerah yang Disusun								800 dokumen	Rp 399.368.250	800 dokumen	Rp 423.330.482	1600 dokumen	Rp 822.698.732		
				Indikator Kegiatan : Persentase Terlaksananya Bantuan Hukum dan Pendampingan Kasus Hukum di Kabupaten Pasuruan								100%		100%		100%			
			Sub Kegiatan Fasilitasi Bantuan Hukum	Jumlah Kasus yang Mendapatkan Fasilitasi Bantuan Hukum								10 kasus	Rp 377.194.530	10 kasus	Rp 399.826.530	20 kasus	Rp 777.021.060		
				Indikator Kegiatan : Persentase pelaksanaan penyuluhan di bidang hukum dan publikasi produk hukum daerah								100%		100%		100%			
			Sub Kegiatan Pendokumentasian Produk Hukum dan Pengelolaan Informasi Hukum	Jumlah Produk Hukum dan Pengelolaan Informasi Hukum yang Didokumentasi								800 dokumen	Rp 421.151.050	800 dokumen	Rp 446.420.208	1600 dokumen	Rp 867.571.258		
	2. Meningkatkan Kualitas Kebijakan Perekonomian dan pembangunan daerah			2.1 indikator Sasaran : Persentase terlaksananya Kebijakan perekonomian								100%		100%		100%			
			PROGRAM PEREKONOMIAN DAN PEMBANGUNAN	Indikator Program. Persentase terlaksananya Kebijakan, koordinasi dan pengawasan Perekonomian dan Sumber Daya Alam								100%	Rp 9.586.424.890	100%	Rp 10.992.510.449	95%	Rp 20.578.935.339		

Tujuan	Sasaran	Kode	Program dan Kegiatan, Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Tujuan, Sasaran, Program (outcome) dan Kegiatan (output)	Data Capaian pada Tahun Awal Perencanaan (2018)	Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan												Unit Kerja Perangkat Daerah Penanggung-Jawab	Lokal
						Tahun 2019		Tahun 2020		Tahun 2021		Tahun 2022		Tahun 2023		Kondisi Kinerja pada akhir periode Renstra Perangkat Daerah			
						Target Kinerja	Rp	Target Kinerja	Rp	Target Kinerja	Rp	Target Kinerja	Rp	Target Kinerja	Rp	Target Kinerja	Rp		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)	(18)	(19)	
			Kegiatan Pelaksanaan Kebijakan Perekonomian	Indikator Kegiatan : Persentase perumusan Kebijakan Daerah terkait bidang Perekonomian, perencanaan dan pengawasan ekonomi mikro kecil yang ditindaklanjuti sesuai ketentuan yang berlaku								100%	Rp 3.462.485.610	100%	Rp 3.670.234.747	95%	Rp 7.132.720.357		
			Sub Kegiatan Koordinasi, Sinkronisasi, Monitoring dan Evaluasi Kebijakan Pengelolaan BUMD dan BLUD	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi, Sinkronisasi, Monitoring dan Evaluasi Kebijakan Pengelolaan BUMD dan BLUD								20 dokumen	Rp 280.996.000	20 dokumen	Rp 297.855.760	40 dokumen	Rp 578.851.760		
			Sub Kegiatan Pengendalian dan Distribusi Perekonomian	Jumlah Laporan Hasil Pengendalian dan Distribusi Perekonomian								40 laporan	Rp 2.944.769.610	40 laporan	Rp 3.121.455.787	80 laporan	Rp 6.066.225.397		
			Sub Kegiatan Perencanaan dan Pengawasan Ekonomi Mikro kecil	Jumlah Dokumen Hasil Perencanaan dan Pengawasan Ekonomi Mikro kecil								30 dokumen	Rp 736.720.000	30 dokumen	Rp 250.923.200	60 dokumen	Rp 487.643.200		
			Kegiatan Pementasan Kebijakan Terkait Sumber Daya Alam	Indikator Kegiatan : Persentase kebijakan daerah terkait sumber daya alam yang ditindaklanjuti								100%	Rp 4.123.940.390	100%	Rp 5.288.228.477	95%	Rp 9.412.168.867		
			Sub Kegiatan Koordinasi, Sinkronisasi dan Evaluasi Kebijakan Urusan Pertanian, Kehutanan, Kelautan dan Perikanan	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi, Sinkronisasi, dan Evaluasi Kebijakan Urusan Pertanian, Perikanan, Kelautan dan Perikanan, <del>Pendagangan, Perindustrian, KURMA, Penanaman Modal, Tenaga Kerja</del>								40 dokumen	Rp 4.055.802.390	40 dokumen	Rp 5.216.002.197	80 dokumen	Rp 9.271.804.587		
			Sub Kegiatan Koordinasi, Sinkronisasi dan Evaluasi Kebijakan Energi dan Air	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi, Sinkronisasi, dan Evaluasi Kebijakan Urusan Energi dan Air, <del>Penerangan Umum dan Penataan Ruang, Perumahan-Roliet dan Kawasan-Perumahan, Pertanahan</del>								10 dokumen	Rp 68.138.000	10 dokumen	Rp 72.226.280	20 dokumen	Rp 140.364.280		

Tujuan	Sasaran	Kode	Program dan Kegiatan, Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Tujuan, Sasaran, Program (outcome) dan Kegiatan (output)	Data Capaian pada Tahun Awal Perencanaan (2018)	Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan												Unit Kerja Perangkat Daerah Penanggungjawab	Lokasi
						Tahun 2019		Tahun 2020		Tahun 2021		Tahun 2022		Tahun 2023		Kondisi Kinerja pada akhir periode Renstra Perangkat Daerah			
						Target Kinerja	Rp	Target Kinerja	Rp	Target Kinerja	Rp	Target Kinerja	Rp	Target Kinerja	Rp	Target Kinerja	Rp		
						(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)	(18)		
				2.2 Indikator Sasaran : Persentase kebijakan terkait pembangunan yang sesuai dengan ketentuan yang berlaku								100%		100%					
			PROGRAM PEREKONOMIAN DAN PEMBANGUNAN	Indikator Program : Persentase perumusan, pemantauan dan evaluasi kebijakan pembangunan yang dilaksanakan								100%		100%		100%			
			Kegiatan Pelaksanaan Administrasi Pembangunan	Indikator Kegiatan : Persentase kebijakan dan data pembangunan yang disediakan								100%	Rp 849.999.790	100%	Rp 901.000.000	100%	Rp 1.750.999.790		
			Sub Kegiatan Fasilitasi Penyusunan Program Pembangunan	Jumlah Dokumen Hasil Fasilitasi Penyusunan Program Pembangunan Daerah								5 dokumen	Rp 475.736.230	5 dokumen	Rp 504.280.499	10 dokumen	Rp 980.016.729		
			Sub Kegiatan Pengendalian dan Evaluasi Program Pembangunan	Jumlah Laporan Hasil Pengendalian dan Evaluasi Program Pembangunan								17 laporan	Rp 196.122.860	17 laporan	Rp 207.890.348	28 laporan	Rp 404.013.208		
			Sub Kegiatan Pengelolaan Evaluasi dan Pelaporan Pelaksanaan Pembangunan	Jumlah Laporan Hasil Pengelolaan Evaluasi dan Pelaporan Pelaksanaan Pembangunan								19 laporan	Rp 178.140.700	19 laporan	Rp 188.829.153	38 laporan	Rp 366.969.853		
				2.3 Indikator Sasaran Indeks Tata Kelola Pengadaan Barang dan Jasa								Cukup (61)		Baik (81)					
			PROGRAM PEREKONOMIAN DAN PEMBANGUNAN	Indikator Program Persentase Peningkatan Nilai Indeks Tata Kelola (PI)								2,00%		5,00%		5,00%			
			Kegiatan Pengelolaan Pengadaan Barang dan Jasa	Indikator Keahlian Persentase pemilihan penyedia barang dan jasa yang dilaksanakan secara elektronik								95%	Rp 1.149.999.100	97%	Rp 1.133.047.225	97%	Rp 2.283.046.325		
			Sub Kegiatan Pengelolaan Pengadaan Barang dan Jasa	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pengadaan Barang dan Jasa								6 dokumen	Rp 1.027.140.000	6 dokumen	Rp 1.002.815.625	12 dokumen	Rp 2.029.955.625		

Tujuan	Sasaran	Kode	Program dan Kegiatan, Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Tujuan, Sasaran, Program (outcome) dan Kegiatan (output)	Data Capaian pada Tahun Awal Perencanaan (2018)	Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan												Unit Kerja Perangkat Daerah Penanggung-jawab	Lokasi
						Tahun 2019		Tahun 2020		Tahun 2021		Tahun 2022		Tahun 2023		Kondisi Kinerja pada akhir periode Renstra Perangkat Daerah			
						Target Kinerja	Rp	Target Kinerja	Rp	Target Kinerja	Rp	Target Kinerja	Rp	Target Kinerja	Rp	Target Kinerja	Rp		
						(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)	(18)		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)	(18)	(19)	
				Indikator Kelembagaan Standarisasi LPSE yang memenuhi kriteria LKPP								15 sertifikat Standarisasi LPSE		17 sertifikat Standarisasi LPSE		17 sertifikat Standarisasi LPSE			
			Sub Kegiatan Pengelolaan Layanan Pengadaan Secara Elektronik	Jumlah Dokumen Hasil Layanan Pengadaan Secara Elektronik								4 dokumen	Rp 56.497.100	4 dokumen	Rp 59.887.880	8 dokumen	Rp 116.384.980		
				Indikator Kelembagaan Tingkat kematangan UKPBJ yang memenuhi kriteria Level Pro Aktif LKPP								7 variabel		9 variabel		9 variabel			
			Sub Kegiatan Pembinaan dan Advokasi Pengadaan Barang dan Jasa	Jumlah Orang yang Mengikuti Pembinaan dan Advokasi Pengadaan Barang dan Jasa								15 orang	Rp 66.362.000	20 orang	Rp 70.343.720	35 orang	Rp 136.705.720		
	3. Meningkatkan Kualitas Tata Kelola Pemerintahan Daerah			Indikator Sasaran Nilai SAKIP Setda								87,00		89,00		89,00			
			PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Indikator Program Persentase rata-rata ketersediaan kebutuhan pimpinan dan administrasi esekretariat daerah								100%	Rp 33.796.423.808	100%	Rp 35.824.506.039	100%	Rp 69.620.929.847		
			Kegiatan Administratif Kepagawalan Perangkat Daerah	Indikator Kelembagaan : Persentase fasilitas Administrasi Tata Usaha dan kepegawalan								100%	Rp 54.093.900	100%	Rp 57.339.534	100%	Rp 111.493.434		
			Sub Kegiatan Monitoring, Evaluasi, dan Penilaian Kinerja Pegawai	Jumlah Dokumen Monitoring, Evaluasi, dan Penilaian Kinerja Pegawai								10 dokumen	Rp 6.093.900	10 dokumen	Rp 6.459.534	20 dokumen	Rp 12.553.434		
			Sub Kegiatan Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan	Jumlah Orang yang Mengikuti Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan								12 orang	Rp 48.000.000	12 orang	Rp 50.880.000	24 orang	Rp 98.880.000		

Tujuan	Sasaran	Kode	Program dan Kegiatan, Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Tujuan, Sasaran, Program (outcome) dan Kegiatan (output)	Data Capaian pada Tahun Awal Perencanaan (2018)	Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan												Unit Kerja Perangkat Daerah Penanggungjawab	Lokasi
						Tahun 2019		Tahun 2020		Tahun 2021		Tahun 2022		Tahun 2023		Kondisi Kinerja pada akhir periode Renstra Perangkat Daerah			
						Target Kinerja	Rp	Target Kinerja	Rp	Target Kinerja	Rp	Target Kinerja	Rp	Target Kinerja	Rp	Target Kinerja	Rp		
						(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)	(18)		
			Kegiatan Administrasi Kasangan dan Operasional Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah	Indikator Kegiatan Persentase pemenuhan administrasi keuangan dan operasional kepala daerah dan wakil kepala daerah								100%	Rp 1.477.661.974	100%	Rp 1.566.707.752	100%	Rp 3.044.369.726		
			Sub Kegiatan Penyediaan Gaji dan Tunjangan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah								2 orang/bulan	Rp 240.253.762	2 orang/bulan	Rp 202.925.340	4 orang/bulan	Rp 443.179.102		
			Sub Kegiatan Penyediaan Pakalan Dinas dan Atribut Kelengkapan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah	Jumlah Paket Pakalan Dinas dan Atribut Kelengkapan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah yang Disediakan								1 paket	Rp 104.581.400	1 paket	Rp 113.316.544	2 paket	Rp 217.897.944		
			Sub Kegiatan Pelaksanaan Medical Check Up Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah	Jumlah Orang yang Mengikuti Medical Check Up Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah								2 orang	Rp 92.678.436	2 orang	Rp 99.297.167	4 orang	Rp 191.975.603		
			Sub Kegiatan Penyediaan Dana Penunjang Operasional Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah	Jumlah Orang yang Menerima Dana Penunjang Operasional Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah								2 orang/bulan	Rp 1.040.148.376	2 orang/bulan	Rp 1.151.168.700	4 orang/bulan	Rp 2.191.317.076		
			Kegiatan Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Indikator Kegiatan Persentase pemenuhan penyediaan jasa penunjang urusan pemerintahan daerah								100%	Rp 3.726.918.689	100%	Rp 3.908.216.310	100%	Rp 7.635.134.999		
			Sub Kegiatan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan								90 laporan	Rp 1.052.557.889	90 laporan	Rp 1.115.718.115	180 laporan	Rp 2.168.276.004		
			Sub Kegiatan Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan								6 laporan	Rp 137.040.000	6 laporan	Rp 145.320.700	12 laporan	Rp 282.360.700		

Tujuan	Sasaran	Kode	Program dan Kegiatan, Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Tujuan, Sasaran, Program (outcome) dan Kegiatan (output)	Data Capaian pada Tahun Awal Perencanaan (2018)	Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan												Unit Kerja Perangkat Daerah Penanggungjawab	Lokasi
						Tahun 2019		Tahun 2020		Tahun 2021		Tahun 2022		Tahun 2023		Kondisi Kinerja pada akhir periode Renstra Perangkat Daerah			
						Target Kinerja	Rp	Target Kinerja	Rp	Target Kinerja	Rp	Target Kinerja	Rp	Target Kinerja	Rp	Target Kinerja	Rp		
						(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)	(18)		
			Sub Kegiatan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan								6 laporan	Rp 2.537.320.800	6 laporan	Rp 2.647.177.496	12 laporan	Rp 5.184.498.296		
			Kegiatan Administrasi Umum Perangkat Daerah	Indikator Kegiatan Persentase pemenuhan administrasi umum perangkat daerah								100%	Rp 2.635.576.240	100%	Rp 2.730.846.901	100%	Rp 5.366.423.141		
			Sub Kegiatan Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetak dan Penggandaan yang Disediakan								20 paket	Rp 342.807.800	20 paket	Rp 325.364.922	40 paket	Rp 668.172.722		
			Sub Kegiatan Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan								35 paket	Rp 131.928.500	35 paket	Rp 139.872.618	70 paket	Rp 271.801.118		
			Sub Kegiatan Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan								35 paket	Rp 272.497.190	35 paket	Rp 317.951.863	70 paket	Rp 590.449.053		
			Sub Kegiatan Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan								130 paket	Rp 255.439.150	130 paket	Rp 269.052.161	260 paket	Rp 524.491.311		
			Sub Kegiatan Fasilitas Kunjungan Tamu	Jumlah Laporan Fasilitas Kunjungan Tamu								360 laporan	Rp 1.129.899.600	360 laporan	Rp 1.145.421.096	720 laporan	Rp 2.275.320.696		
			Sub Kegiatan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD								360 laporan	Rp 503.004.000	360 laporan	Rp 533.184.240	720 laporan	Rp 1.036.188.240		
			Kegiatan Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Indikator Kegiatan Persentase pemenuhan pengadaan BMD penunjang urusan pemerintah daerah								100%	Rp 28.930.000	100%	Rp -	100%	Rp 28.930.000		
			Sub Kegiatan Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Unit Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Disediakan								5 unit	Rp -	5 unit	Rp -	10 unit	Rp -		
			Sub Kegiatan Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Unit Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan								20 unit	Rp -	20 unit	Rp -	40 unit	Rp -		

Tujuan	Sasaran	Kode	Program dan Kegiatan, Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Tujuan, Sasaran, Program (outcome) dan Kegiatan (output)	Data Capaian pada Tahun Awal Perencanaan (2018)	Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan												Unit Kerja Perangkat Daerah Penanggungjawab	Lokasi			
						Tahun 2019		Tahun 2020		Tahun 2021		Tahun 2022		Tahun 2023		Kondisi Kinerja pada akhir periode Renstra Perangkat Daerah						
						Target Kinerja	Rp	Target Kinerja	Rp	Target Kinerja	Rp	Target Kinerja	Rp	Target Kinerja	Rp	Target Kinerja	Rp					
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)	(18)	(19)				
			Sub Kegiatan Pengadaan Mebel	Jumlah Paket Mebel yang Disediakan								5 unit	Rp	-	5 unit	Rp	-	10 unit	Rp	-		
			Sub Kegiatan Pengadaan Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Unit Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan								10 unit	Rp	28.930.000	10 unit	Rp	-	20 unit	Rp	28.930.000		
			Kegiatan Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Indikator Kegiatan Persentase pemenuhan pemeliharaan BMD penunjang urusan pemerintahan daerah								100%	Rp	3.058.479.675	100%	Rp	3.377.814.948	100%	Rp	6.436.294.623		
			Sub Kegiatan Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi								6 unit	Rp	590.370.675	6 unit	Rp	728.499.708	12 unit	Rp	1.318.870.383		
			Sub Kegiatan Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya								4 unit	Rp	233.600.000	4 unit	Rp	280.627.580	8 unit	Rp	514.227.580		
			Sub Kegiatan Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak, dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya								55 unit	Rp	1.999.490.100	55 unit	Rp	2.119.354.672	110 unit	Rp	4.118.844.772		
			Sub Kegiatan Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi								1200 unit	Rp	134.022.900	1200 unit	Rp	142.080.068	2400 unit	Rp	276.102.968		
			Sub Kegiatan Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi								50 unit	Rp	78.556.000	50 unit	Rp	83.466.520	50 unit	Rp	162.022.520		

Tujuan	Sasaran	Kode	Program dan Kegiatan, Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Tujuan, Sasaran, Program (outcome) dan Kegiatan (output)	Data Capaian pada Tahun Awal Perencanaan (2018)	Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan												Unit Kerja Perangkat Daerah Penanggung-jawab	Lokasi
						Tahun 2019		Tahun 2020		Tahun 2021		Tahun 2022		Tahun 2023		Kondisi Kinerja pada akhir periode Renstra Perangkat Daerah			
						Target Kinerja	Rp	Target Kinerja	Rp	Target Kinerja	Rp	Target Kinerja	Rp	Target Kinerja	Rp	Target Kinerja	Rp		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)	(18)	(18)	(19)
			Pemeliharaan Mebel	Jumlah Mebel yang Dipelihara								120 unit	Rp 22.440.000	120 unit	Rp 23.786.400	120 unit	Rp 46.226.400		
			Kegiatan Fasilitas Kerumahtanggaan Sekretariat Daerah	Indikator Kegiatan Persentase pemenuhan fasilitas kerumahtanggaan sekretariat daerah								100%	Rp 506.832.480	100%	Rp 537.173.893	100%	Rp 1.044.006.373		
			Sub Kegiatan Penyediaan Kebutuhan Rumah Tangga Kepala Daerah	Jumlah Paket Kebutuhan Rumah Tangga Kepala Daerah yang Disediakan								8 paket	Rp 259.902.720	8 paket	Rp 275.455.441	16 paket	Rp 535.358.161		
			Sub Kegiatan Penyediaan Kebutuhan Rumah Tangga Wakil Kepala Daerah	Jumlah Paket Kebutuhan Rumah Tangga Wakil Kepala Daerah yang Disediakan								8 paket	Rp 194.099.400	8 paket	Rp 205.868.824	16 paket	Rp 399.968.224		
			Sub Kegiatan Penyediaan Kebutuhan Rumah Tangga Sekretariat Daerah	Jumlah Paket Kebutuhan Rumah Tangga Sekretariat Daerah yang Disediakan								3 paket	Rp 52.830.360	3 paket	Rp 55.849.628	6 paket	Rp 108.679.988		
				Indikator Program Persentase Terlaksananya Kegiatan Keprotokolan dan Komunikasi Pimpinan								100%		100%		100%			
			Kegiatan Pelaksanaan Protokol dan Komunikasi Pimpinan	Indikator Kegiatan Persentase pelayanan keprotokolan kepada kepala daerah dan wakil kepala daerah yang terfasilitasi								100%	Rp 1.359.727.350	100%	Rp 1.441.310.991	100%	Rp 2.801.038.341		
			Sub Kegiatan Fasilitas Keprotokolan	Jumlah Laporan Hasil Fasilitas Keprotokolan								500 laporan	Rp 862.615.430	500 laporan	Rp 793.721.640	1000 laporan	Rp 1.656.337.070		
				Indikator Kegiatan Persentase pelayanan komunikasi pimpinan KDH dan WKDH								100%		100%		100%			
			Sub Kegiatan Fasilitas Komunikasi Pimpinan	Jumlah Laporan Hasil Fasilitas Komunikasi Pimpinan								100 laporan	Rp 304.735.350	100 laporan	Rp 443.534.051	200 laporan	Rp 748.269.401		

Tujuan	Sasaran	Kode	Program dan Kegiatan, Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Tujuan, Sasaran, Program (outcome) dan Kegiatan (output)	Data Capaian pada Tahun Awal Perencanaan (2018)	Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan												Unit Kerja Perangkat Daerah Penanggungjawab	Lokasi
						Tahun 2019		Tahun 2020		Tahun 2021		Tahun 2022		Tahun 2023		Kondisi Kinerja pada akhir periode Renstra Perangkat Daerah			
						Target Kinerja	Rp	Target Kinerja	Rp	Target Kinerja	Rp	Target Kinerja	Rp	Target Kinerja	Rp	Target Kinerja	Rp		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)	(18)	(18)	(19)
				Indikator Kegiatan: Persentase Kegiatan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah yang didokumentasikan								100%		100%		100%			
			Sub Kegiatan Pendokumentasian Tugas Pimpinan	Jumlah Laporan Pendokumentasian Tugas Pimpinan								500 laporan	Rp 192.376.570	500 laporan	Rp 204.055.300	1000 laporan	Rp 396.431.870		
				Indikator Program: Persentase tersusunnya dokumen perencanaan, evaluasi kinerja dan administratif keuangan yang akuntabel								100%		100%		100%			
			Kegiatan Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Indikator Kegiatan: Persentase Fasilitas Penyusunan Dokumen Perencanaan Sekretariat Daerah yang akuntabel dan tepat waktu								100%	Rp 395.092.960	100%	Rp 418.799.566	100%	Rp 813.892.526		
			Sub Kegiatan Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Tersusunnya Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah								12 dokumen	Rp 243.190.360	12 dokumen	Rp 257.782.396	24 dokumen	Rp 500.972.756		
				Indikator Kegiatan: Persentase Fasilitas Pelaporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja Sekretariat Daerah yang tepat waktu								100%		100%		100%			
			Sub Kegiatan Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD								21 Laporan	Rp 151.902.600	21 Laporan	Rp 161.017.169	42 laporan	Rp 312.919.769		

Tujuan	Sasaran	Kode	Program dan Kegiatan, Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Tujuan, Sasaran, Program (outcome) dan Kegiatan (output)	Data Capaian pada Tahun Awal Perencanaan (2018)	Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan												Unit Kerja Perangkat Daerah Penanggungjawab	Lokasi
						Tahun 2019		Tahun 2020		Tahun 2021		Tahun 2022		Tahun 2023		Kondisi Kinerja pada akhir periode Renstra Perangkat Daerah			
						Target Kinerja	Rp	Target Kinerja	Rp	Target Kinerja	Rp	Target Kinerja	Rp	Target Kinerja	Rp	Target Kinerja	Rp		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)	(18)	(19)	
			Kegiatan Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Indikator Kegiatan Persentase Pemenuhan Administrasi Keuangan Sekretariat Daerah sesuai aturan yang berlaku dan tepat waktu								100%	Rp 18.653.110.540	100%	Rp 19.772.296.144	100%	Rp 38.425.406.684		
			Sub Kegiatan Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN								130 orang/bulan	Rp 17.169.562.820	130 orang/bulan	Rp 18.199.735.921	260 orang/bulan	Rp 35.369.298.741		
			Sub Kegiatan Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	Jumlah Dokumen Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD								425 Berkas	Rp 1.483.547.720	450 Berkas	Rp 1.572.560.223	875 berkas	Rp 3.056.107.943		
				3.2 Indikator Sasaran. Persentase Perangkat daerah yang Tepat Fungsi dan Tepat Ukuran								100%		100%		100%			
			PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Indikator Program Persentase penataan kelembagaan Perangkat Daerah yang dilaksanakan								100%		100%		100%			
			Kegiatan Renataan Organisasi	Indikator Kegiatan Persentase pelaksanaan penyusunan dokumen Evaluasi Kelembagaan dan Anjab ABK/SKJ/Evjab								100%	Rp 1.900.000.000	100%	Rp 2.014.000.000	100%	Rp 3.914.000.000		
			Sub Kegiatan Pengelolaan Kelembagaan dan Analisis Jabatan	Jumlah Dokumen Pengelolaan Kelembagaan dan Analisis Jabatan								4 dokumen	Rp 695.000.000	4 dokumen	Rp 954.000.000	8 dokumen	Rp 1.649.000.000		
				3.3 Indikator Sasaran. Persentase Perangkat Daerah yang berkinerja sangat baik / Nilai SAKIP minimal BB								95%		100%		100%			
			PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Indikator Program Persentase Perangkat Daerah yang dibangun menuju Nilai SAKIP minimal BB								95%		100%		100%			

Tujuan	Sasaran	Kode	Program dan Kegiatan, Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Tujuan, Sasaran, Program (outcome) dan Kegiatan (output)	Data Capaian pada Tahun Awal Perencanaan (2018)	Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan												Unit Kerja Perangkat Daerah Penanggungjawab	Lokasi
						Tahun 2019		Tahun 2020		Tahun 2021		Tahun 2022		Tahun 2023		Kondisi Kinerja pada akhir periode Renstra Perangkat Daerah			
						Target Kinerja	Rp	Target Kinerja	Rp	Target Kinerja	Rp	Target Kinerja	Rp	Target Kinerja	Rp	Target Kinerja	Rp		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)	(18)	(19)	
			Kegiatan Penataan Organisasi	Indikator Kegiatan Persentase kepatuhan penyelenggaraan pelayanan publik perangkat daerah								100%		100%		100%			
			Sub Kegiatan Fasilitasi Pelayanan Publik dan Tata Laksana	Jumlah Laporan Hasil Fasilitasi Pelayanan Publik dan Tata Laksana								4 laporan	Rp 605.000.000	4 laporan	Rp 530.000.000	8 laporan	Rp 1.135.000.000		
				Indikator Kegiatan Persentase kesesuaian laporan kinerja perangkat daerah dengan ketentuan								100%		100%					
			Sub Kegiatan Peningkatan Kinerja dan Reformasi Birokrasi	Jumlah Dokumen Peningkatan Kinerja dan Reformasi Birokrasi								6 dokumen	Rp 600.000.000	6 dokumen	Rp 530.000.000	12 dokumen	Rp 1.130.000.000		
													Rp 61.135.056.496		Rp 65.634.368.303		Rp 126.769.424.799		



## BAB VII

### KINERJA PENYELENGGARAAN BIDANG URUSAN

Indikator kinerja penyelenggaraan bidang urusan penunjang yang dilaksanakan Sekretariat Daerah yang secara langsung menunjukkan kinerja yang akan dicapai dalam waktu lima tahun mendatang sebagai komitmen untuk mendukung pencapaian tujuan dan sasaran RPJMD adalah Nilai SAKIP, target capaian nilai SAKIP dapat ditunjukkan dalam table VII.1.

**Tabel VII.1**  
**Indikator Kinerja Sekretariat Daerah Yang Mengacu pada Tujuan dan Sasaran RPJMD**

Indikator	Satuan	Kondisi Kinerja Awal RPJMD 2018	Target Capaian Tahun					Kondisi Kinerja Akhir RPJMD 2023	Masa Transisi Tahun 2024
			2019	2020	2021	2022	2023		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)
Nilai SAKIP		72,70 (BB)	79,00 (BB)	80,00 (BB)	84,00 (A)	87,00 (A)	89,00 (A)	89,00 (A)	89,00 (A)



## **BAB VIII**

### **PENUTUP**

Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (P-RPJMD) merupakan arah pembangunan yang ingin dicapai daerah dalam kurun waktu masa bakti Kepala Daerah yang disusun berdasarkan visi, misi dan program Kepala Daerah, diharapkan mampu memberikan nilai tambah bagi seluruh lapisan masyarakat. Oleh karenanya seluruh program pembangunan jangka menengah dalam kerangka regulasi dan kerangka anggaran, keterpaduan, sinkronisasi, integrasi dan sinergi antar kegiatan dengan tetap memperhatikan peran/ tanggung jawab/tugas yang melekat pada pemerintah Kabupaten Pasuruan, sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Untuk mencapai keterpaduan dan sinkronisasi perencanaan, pelaksanaan, dan pengendalian kegiatan yang telah diprogramkan, dapat dilakukan melalui regulasi, forum koordinasi dan musyawarah pembangunan dengan menerapkan prinsip-prinsip tata pengelolaan pemerintahan yang baik antara lain : prinsip-prinsip efisien, efektivitas, transparansi, akuntabilitas dan partisipasi dalam melaksanakan kegiatan dalam rangka pencapaian visi, misi, dan arah pembangunan yang tertuang dalam P-RPJMD Pemerintah Kabupaten Pasuruan 2018 - 2023.

Penyusunan Perubahan Rencana Strategis (P-Renstra) Sekretariat Daerah disusun dengan berpedoman pada P-RPJMD Pemerintah Kabupaten Pasuruan Tahun 2018-2023. Dalam Perubahan Renstra Sekretariat Daerah memuat tujuan, sasaran, strategi, kebijakan dan program, kegiatan prioritas pembangunan serta pendanaan indikatif.



Jika dalam penyusunan Perubahan Renstra ini masih terdapat berbagai kekurangan, kami mengharapkan masukan dan saran demi kesempurnaan dokumen Perubahan Renstra Sekretariat Daerah agar lebih baik lagi dimasa mendatang.

BUPATI PASURUAN,

ttd.

M. IRSYAD YUSUF